

JURNAL AKUNTANSI DAN KEUANGAN

The Journal of Accounting and Finance

Volume 14 Nomor 2, Juli 2009

RINDU RIKA GAMAYUNI

Perkembangan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia Menuju
International Financial Reporting Standards

EINDE EVANA

Analisis Hubungan *Investment Opportunity Set* Berdasarkan
Nilai Pasar dan Nilai Buku dengan Realisasi Pertumbuhan

AGRIANTI KSA

Analisis Pengaruh Karakteristik Perusahaan, Kualitas Auditor, Pergantian Auditor
terhadap Intensi Penggunaan Teknologi *World Wide Web*

FARICHAH

Analisis Hubungan Antara Karakteristik dan Kualitas
Pengungkapan pada Laporan Keuangan Perusahaan Indonesia

LENY NOFIANTI

Penerapan *Good Corporate Governance* di Indonesia

PIGO NAULI

Perbedaan Persepsi Mahasiswa Akuntansi Semester Awal dan
Semester Akhir Terhadap Profesi Akuntan
(Studi Kasus di Fakultas Ekonomi Universitas Lampung)

SUSI

Why Firms Disclose Environmental Information?
A Literature Review

Jurnal Ilmiah Berkala Enam Bulanan ISSN 1410 - 1831

JURNAL AKUNTANSI DAN KEUANGAN

The Journal of Accounting and Finance

Penanggung Jawab:

Einde Evana

Ketua Penyunting:

Tri Joko Prasetyo

Penyunting Pelaksana:

Agrianti Komalasari

Dewi Sukmasari

Lindrianasari

Retno Yuni Nur Susilowati

Penyunting Ahli/Mitra Bestari:

Gudono

Universitas Gadjah Mada

Hiro Tugiman

Universitas Padjadjaran

Indra Wijaya

Universitas Gadjah Mada

Mahatma Kufepaksi

Universitas Lampung

Ratna Septiyanti

Universitas Lampung

Zaki Baridwan

Universitas Gadjah Mada

Anggota Administrasi/Tata Usaha:

Mega Metalia

Yana Suryana

Alamat Redaksi/Penerbit:

Redaksi Jurnal Akuntansi dan Keuangan

Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi

Universitas Lampung

Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro no.1 Gedungmeneng

Bandarlampung 35145

Telp. (0721) 705903, Fax. (0721) 705903

e-mail: jife@mail.wima.ac.id

Frekuensi terbit: enam bulanan

JURNAL AKUNTANSI DAN KEUANGAN

The Journal of Accounting and Finance

Volume 14 Nomor 2, Juli 2009

Redaksi	i
Daftar isi	ii

RINDU RIKA GAMAYUNI

Perkembangan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia Menuju International Financial Reporting Standards	153-166
---	---------

EINDE EVANA

Analisis Hubungan Investment Opportunity Set Berdasarkan Nilai Pasar dan Nilai Buku dengan Realisasi Pertumbuhan	167-186
---	---------

AGRIANTI KSA

<i>Analisis Pengaruh Karakteristik Perusahaan, Kualitas Auditor, Pergantian Auditor</i> terhadap Intensi Penggunaan Teknologi <i>World Wide Web</i>	187-198
--	---------

FARICHAH

Analisis Hubungan Antara Karakteristik dan Kualitas Pengungkapan pada Laporan Keuangan Perusahaan Indonesia	199-210
--	---------

LENY NOFIANTI

Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> di Indonesia	211-234
---	---------

PIGO NAULI

Perbedaan Persepsi Mahasiswa Akuntansi Semester Awal dan Semester Akhir Terhadap Profesi Akuntan (Studi Kasus Di Fakultas Ekonomi Universitas Lampung)	235-248
--	---------

SUSI

<i>Why Firms Disclose Environmental Information?</i> <i>A Literature Review</i>	249-262
--	---------

PERKEMBANGAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN INDONESIA MENUJU INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS

Rindu Rika Gamayuni¹

ABSTRACT

The Indonesian Financial Accounting Standards needs to adopt IFRS, so that the Indonesian financial reports can be accepted globally and the Indonesian companies are able to enter the global competition to attract the international investors. Currently, the adoption by Indonesian PSAK is in the form of harmonization, which means partial adoption. However, Indonesian is planning to fully adopt the IFRS by 2012. Such an adoption will be mandatory for listed and multinational companies.

The decision as to whether Indonesia will fully adopt the IFRS or partly adopt for harmonization purposes needs to be considered carefully. Full adoption of IFRS will enhance the reliability and comparability of the financial reports internationally. However, it may contradict the Indonesian tax systems and other economic and political situations.

If Indonesia were to adopt fully the IFRS by 2012, the challenges are faced firstly by the academic society and the companies. The curriculum, syllabi, and literature need to be adjusted to accommodate the changes. These will take considerable time and efforts due to the many aspects related to the changes. Adjustments also need to be done by corporations or organizations, particularly those with international transactions and interactions.

Full adoption also means the changing of accounting principles that has been applied as accounting standards worldwide. This might not be achieved in a short period, due to a number of reasons: (1) accounting standards are highly related with the tax systems. Adoption to IFRS internationally may change the tax systems in each country that fully adopt the IFRS. (2) Accounting standards are accounting policies in order to fulfil the national political and economic necessities that vary in each country. This might be the significant challenges in fully adopting the IFRS.

Keyword : International Financial Reporting Standards, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, fully adoption, accounting policies, tax systems.

A. PENDAHULUAN

Standar akuntansi di Indonesia saat ini belum menggunakan secara penuh (*full adoption*) standar akuntansi internasional atau *International Financial Reporting Standard*

¹ Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Lampung

(IFRS). Standar akuntansi di Indonesia yang berlaku saat ini mengacu pada US GAAP (*United States Generally Accepted Accounting Standard*), namun pada beberapa pasal sudah mengadopsi IFRS yang sifatnya harmonisasi. Adopsi yang dilakukan Indonesia saat ini sifatnya belum menyeluruh, baru sebagian (harmonisasi). Era globalisasi saat ini menuntut adanya suatu sistem akuntansi internasional yang dapat diberlakukan secara internasional di setiap negara, atau diperlukan adanya harmonisasi terhadap standar akuntansi internasional, dengan tujuan agar dapat menghasilkan informasi keuangan yang dapat diperbandingkan, mempermudah dalam melakukan analisis kompetitif dan hubungan baik dengan pelanggan, supplier, investor, dan kreditor. Namun proses harmonisasi ini memiliki hambatan antarlain nasionalisme dan budaya tiap-tiap negara, perbedaan sistem pemerintahan pada tiap-tiap negara, perbedaan kepentingan antara perusahaan multinasional dengan perusahaan nasional yang sangat mempengaruhi proses harmonisasi antar negara, serta tingginya biaya untuk merubah prinsip akuntansi.

Teknologi informasi yang berkembang pesat membuat informasi menjadi tersedia di seluruh dunia. Pesatnya teknologi informasi ini merupakan akses bagi banyak investor untuk memasuki pasar modal di seluruh dunia, yang tidak terhalangi oleh batasan negara, misalnya: Investor dari Belanda bisa dengan mudah berinvestasi di Jepang, Amerika, Singapore, atau bahkan Indonesia. Kebutuhan ini tidak bisa terpenuhi apabila perusahaan-perusahaan masih memakai prinsip pelaporan keuangan yang berbeda-beda. Amerika memakai FASB dan US GAAP, Indonesia memakai PSAK-nya IAI, uni eropa memakai IAS dan IASB. Hal tersebut melatarbelakangi perlunya adopsi IFRS saat ini.

Pengadopsian standar akuntansi internasional ke dalam standar akuntansi domestik bertujuan menghasilkan laporan keuangan yang memiliki tingkat kredibilitas tinggi, persyaratan akan item-item pengungkapan akan semakin tinggi sehingga nilai perusahaan akan semakin tinggi pula, manajemen akan memiliki tingkat akuntabilitas tinggi dalam menjalankan perusahaan, laporan keuangan perusahaan menghasilkan informasi yang lebih relevan dan akurat, dan laporan keuangan akan lebih dapat diperbandingkan dan menghasilkan informasi yang valid untuk aktiva, hutang, ekuitas, pendapatan dan beban perusahaan (Petreski, 2005).

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mencanangkan bahwa Standar akuntansi internasional (IFRS) akan mulai berlaku di Indonesia pada tahun 2012 secara keseluruhan atau full adoption (sumber: Ikatan Akuntan Indonesia, 2009). Pada tahun 2012 tersebut diharapkan Indonesia sudah mengadopsi keseluruhan IFRS, sedangkan khusus untuk perbankan diharapkan tahun 2010. Dengan pencanangan tersebut timbul permasalahan mengenai sejauhmana adopsi IFRS dapat diterapkan dalam Laporan Keuangan di Indonesia, bagaimana sifat adopsi yang cocok apakah adopsi seluruh atau sebagian (harmonisasi), dan manfaat bagi perusahaan yang mengadopsi khususnya dan bagi perekonomian Indonesia pada umumnya, serta bagaimana kesiapan Indonesia untuk mengadopsi IFRS, mungkinkah tahun 2012 Indonesia mengadopsi penuh IFRS?

B. PEMBAHASAN

Harmonisasi Standar Akuntansi Internasional

Choi dan Mueller (1998) mendefinisikan akuntansi internasional adalah akuntansi internasional yang memperluas akuntansi yang bertujuan umum, yang berorientasi nasional, dalam arti yang luas untuk: (1) analisa komparatif internasional, (2) pengukuran dan isu-isu pelaporan akuntansinya yang unik bagi transaksi bisnis-bisnis internasional dan bentuk bisnis perusahaan multinasional, (3) kebutuhan akuntansi bagi pasar-pasar keuangan internasional, dan (4) harmonisasi akuntansi di seluruh dunia dan harmonisasi keragaman pelaporan keuangan melalui aktivitas-aktivitas politik, organisasi, profesi dan pembuatan standar.

Choi, et al. (1999) menyatakan bahwa Harmonisasi merupakan proses untuk meningkatkan kompatibilitas (kesesuaian) praktik akuntansi dengan menentukan batasan-batasan seberapa besar praktik-praktik tersebut dapat beragam. Standart harmonisasi ini bebas dari konflik logika dan dapat meningkatkan komparabilitas (daya banding) informasi keuangan yang berasal dari berbagai Negara.

Saat ini harmonisasi standar akuntansi internasional menjadi isu hangat karena berhubungan erat dengan globalisasi dalam dunia bisnis yang terjadi saat ini. Globalisasi bisnis tampak dari kegiatan perdagangan antar negara yang mengakibatkan munculnya perusahaan multinasional. Hal ini mengakibatkan timbulnya kebutuhan akan suatu standar akuntansi yang berlaku secara luas di seluruh dunia. Akuntansi sebagai penyedia informasi bagi pengambilan keputusan yang bersifat ekonomi juga dipengaruhi oleh lingkungan bisnis yang terus menerus berubah karena adanya globalisasi. Adanya transaksi antar negara dan prinsip-prinsip akuntansi yang berbeda antar negara mengakibatkan munculnya kebutuhan akan harmonisasi standar akuntansi di seluruh dunia.

IASC (*International Accounting Standard Committee*) adalah lembaga yang bertujuan merumuskan dan menerbitkan standar akuntansi sehubungan dengan pelaporan keuangan dan mempromosikannya untuk bisa diterima secara luas di seluruh dunia, serta bekerja untuk pengembangan dan harmonisasi standar dan prosedur akuntansi sehubungan dengan pelaporan keuangan (Choi & Mueller, 1998). IFRS (*International Financial Accounting Standard*) adalah suatu upaya untuk memperkuat arsitektur keuangan global dan mencari solusi jangka panjang terhadap kurangnya transparansi informasi keuangan. Tujuan IFRS adalah memastikan bahwa laporan keuangan interim perusahaan untuk periode-periode yang dimaksudkan dalam laporan keuangan tahunan, mengandung informasi berkualitas tinggi yang: (1). Menghasilkan transparansi bagi para pengguna dan dapat dibandingkan sepanjang periode yang disajikan., (2). menyediakan titik awal yang memadai untuk akuntansi yang berdasarkan pada IFRS., (3). dapat dihasilkan dengan biaya yang tidak melebihi manfaat untuk para pengguna.

Sejarah, perkembangan, dan pengadopsian Standar Akuntansi Internasional di Indonesia

Sejarah dan perkembangan Standar Akuntansi di Indonesia

Berikut adalah perkembangan standar akuntansi Indonesia mulai dari awal sampai dengan saat ini yang menuju konvergensi dengan IFRS (Sumber: Ikatan Akuntan Indonesia, 2008).

- a) di Indonesia selama dalam penjajahan Belanda, tidak ada standar Akuntansi yang dipakai. Indonesia memakai standar (Sound Business Practices) gaya Belanda.
- b) sampai Thn. 1955 : Indonesia belum mempunyai undang – undang resmi / peraturan tentang standar keuangan.
- c) Tahun. 1974 : Indonesia mengikuti standar Akuntansi Amerika yang dibuat oleh IAI yang disebut dengan prinsip Akuntansi.
- d) Tahun. 1984 : Prinsip Akuntansi di Indonesia ditetapkan menjadi standar Akuntansi.
- e) Akhir Tahun 1984 : Standar Akuntansi di Indonesia mengikuti standar yang bersumber dari IASC (International Accounting Standart Committee)
- f) Sejak Tahun. 1994 : IAI sudah committed mengikuti IASC / IFRS.
- g) Tahun 2008 : diharapkan perbedaan PSAK dengan IFRS akan dapat diselesaikan.
- h) Tahun. 2012 : Ikut IFRS sepenuhnya?

Pengadopsian Standar Akuntansi Internasional di Indonesia

Saat ini standar akuntansi keuangan nasional sedang dalam proses konvergensi secara penuh dengan International Financial Reporting Standards (IFRS) yang dikeluarkan oleh IASB (International Accounting Standards Board. Oleh karena itu, arah penyusunan dan pengembangan standar akuntansi keuangan ke depan akan selalu mengacu pada standar akuntansi internasional (IFRS) tersebut.

Posisi IFRS/IAS yang sudah diadopsi hingga saat ini dan akan diadopsi pada tahun 2009 dan 2010 adalah seperti yang tercantum dalam daftar- daftar berikut ini (sumber: Ikatan Akuntan Indonesia, 2009).

Tabel 1: IFRS/IAS yang Telah Diadopsi ke dalam PSAK hingga 31 Desember 2008
<ol style="list-style-type: none">1. IAS 2 Inventories2. IAS 10 Events after balance sheet date3. IAS 11 Construction contracts4. IAS 16 Property, plant and equipment5. IAS 17 Leases6. IAS 18 Revenues7. IAS 19 Employee benefits8. IAS 23 Borrowing costs9. IAS 32 Financial instruments: presentation10. IAS 39 Financial instruments: recognition and measurement11. IAS 40 Investment propert

Tabel 2: IFRS/IAS yang Akan Diadopsi ke dalam PSAK pada Tahun 2009
<ol style="list-style-type: none">1. IFRS 2 Share-based payment2. IFRS 4 Insurance contracts3. IFRS 5 Non-current assets held for sale and discontinued operations4. IFRS 6 Exploration for and evaluation of mineral resources5. IFRS 7 Financial instruments: disclosures6. IAS 1 Presentation of financial statements7. IAS 27 Consolidated and separate financial statements8. IAS 28 Investments in associates9. IFRS 3 Business combination10. IFRS 8 Segment reporting11. IAS 8 Accounting policies, changes in accounting estimates and errors12. IAS 12 Income taxes13. IAS 21 The effects of changes in foreign exchange rates14. IAS 26 Accounting and reporting by retirement benefit plans15. IAS 31 Interests in joint ventures16. IAS 36 Impairment of assets17. IAS 37 Provisions, contingent liabilities and contingent assets18. IAS 38 Intangible assets

Tabel 3: IFRS/IAS yang Akan Diadopsi ke dalam PSAK pada Tahun 2010
<ol style="list-style-type: none">1. IAS 7 Cash flow statements2. IAS 20 Accounting for government grants and disclosure of government assistance3. IAS 24 Related party disclosures4. IAS 29 Financial reporting in hyperinflationary economies5. IAS 33 Earning per share6. IAS 34 Interim financial reporting7. IAS 41 Agriculture

Untuk hal-hal yang tidak diatur standar akuntansi internasional, DSAK akan terus mengembangkan standar akuntansi keuangan untuk memenuhi kebutuhan nyata di Indonesia, terutama standar akuntansi keuangan untuk transaksi syariah, dengan semakin berkembangnya usaha berbasis syariah di tanah air. Landasan konseptual untuk akuntansi transaksi syariah telah disusun oleh DSAK dalam bentuk Kerangka

Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Hal ini diperlukan karena transaksi syariah mempunyai karakteristik yang berbeda dengan transaksi usaha umumnya sehingga ada beberapa prinsip akuntansi umum yang tidak dapat diterapkan dan diperlukan suatu penambahan prinsip akuntansi yang dapat dijadikan landasan konseptual.

Revisi terbaru PSAK yang mengacu pada IFRS

Sejak Desember 2006 sampai dengan pertengahan tahun 2007 kemarin, Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah merevisi dan mengesahkan lima Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Revisi tersebut dilakukan dalam rangka konvergensi dengan International Accounting Standards (IAS) dan International financial reporting standards (IFRS). 5 butir PSAK yang telah direvisi tersebut antara lain: PSAK No. 13, No. 16, No. 30 (ketiganya revisi tahun 2007, yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2008), PSAK No. 50 dan No. 55 (keduanya revisi tahun 2006 yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2009).

1. PSAK No. 13 (revisi 2007) tentang Properti Investasi yang menggantikan PSAK No. 13 tentang Akuntansi untuk Investasi (disahkan 1994),
2. PSAK No. 16 (revisi 2007) tentang Aset Tetap yang menggantikan PSAK 16 (1994) : Aktiva Tetap dan Aktiva Lain-lain dan PSAK 17 (1994) Akuntansi Penyusutan,
3. PSAK No. 30 (revisi 2007) tentang Sewa menggantikan PSAK 30 (1994) tentang Sewa Guna Usaha.
4. PSAK No. 50 (revisi 2006) tentang Instrumen Keuangan : Penyajian dan Pengungkapan yang menggantikan Akuntansi Investasi Efek Tertentu
5. PSAK No. 55 (revisi 2006) tentang Instrumen Keuangan : Pengakuan dan Pengukuran yang menggantikan Akuntansi Instrumen Derivatif dan Aktivitas Lindung Nilai.

Kelima PSAK tersebut dalam revisi terakhirnya sebagian besar sudah mengacu ke IAS/IFRS, walaupun terdapat sedikit perbedaan terkait dengan belum diadopsinya PSAK lain yang terkait dengan kelima PSAK tersebut.

Dengan adanya penyempurnaan dan pengembangan PSAK secara berkelanjutan dari tahun ke tahun, saat ini terdapat tiga PSAK yang pengaturannya sudah disatukan dengan PSAK terkait yang terbaru sehingga nomor PSAK tersebut tidak berlaku lagi, yaitu :

1. PSAK No. 9 (Revisi 1994) tentang Penyajian Aktiva Lancar dan Kewajiban Jangka Pendek pengaturannya disatukan dalam PSAK No. 1 (Revisi 1998) tentang Penyajian Laporan Keuangan;

2. PSAK No. 17 (Revisi 1994) tentang Akuntansi Penyusutan pengaturannya disatukan dalam PSAK No. 16 (Revisi 2007) tentang Aset Tetap;
3. PSAK No. 20 tentang Biaya Riset dan Pengembangan (1994) pengaturannya disatukan dalam PSAK No. 19 (Revisi 2000) tentang Aset Tidak Berwujud.

PSAK yang sedang dalam proses revisi

Ikatan Akuntan Indonesia merencanakan untuk konvergensi dengan IFRS mulai tahun 2012, untuk itu Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) sedang dalam proses merevisi 3 PSAK berikut (Sumber: Deloitte News Letter, 2007):

- PSAK 22 : *Accounting for Business Combination, which is revised by reference to IFRS 3 : Business Combination;*
- PSAK 58 : *Discontinued Operations, which is revised by reference to IFRS 5 : Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations;*
- PSAK 48 : *Impairment of Assets, which is revised by reference to IAS 36 : Impairment of Assets*

Berikut adalah program pengembangan standar akuntansi nasional oleh DSAK dalam rangka konvergensi dengan IFRS (Sumber: Ikatan Akuntan Indonesia, 2008):

- Pada akhir 2010 diharapkan seluruh IFRS sudah diadopsi dalam PSAK;
- Tahun 2011 merupakan tahun penyiapan seluruh infrastruktur pendukung untuk implementasi PSAK yang sudah mengadopsi seluruh IFRS;
- Tahun 2012 merupakan tahun implementasi dimana PSAK yang berbasis IFRS wajib diterapkan oleh perusahaan-perusahaan yang memiliki akuntabilitas publik. Namun IFRS tidak wajib diterapkan oleh perusahaan-perusahaan lokal yang tidak memiliki akuntabilitas publik. Pengembangan PSAK untuk UKM dan kebutuhan spesifik nasional didahulukan.

Efek penerapan International Accounting Standard (IAS) terhadap Laporan Keuangan

Beberapa penelitian di luar negeri telah dilakukan untuk menganalisa dan membuktikan efek penerapan IAS (IFRS) dalam laporan keuangan perusahaan domestik. Penelitian itu antara lain dilakukan oleh Barth, Landsman, Lang (2005), yang melakukan pengujian untuk membuktikan pengaruh Standar Akuntansi Internasional (SAI) terhadap kualitas akuntansi. Penelitian lain dilakukan oleh Marjan Petreski (2005), menguji efek adopsi SAI terhadap manajemen perusahaan dan laporan keuangan.

Hung & Subramanyan (2004) menguji efek adopsi SAI terhadap laporan keuangan perusahaan di Jerman. Hasil penelitian ini memberikan bukti bahwa total aktiva, total kewajiban dan nilai buku ekuitas, lebih tinggi yang menerapkan IAS dibanding standar akuntansi Jerman, dan tidak ada perbedaan yang signifikan pada pendapatan dan laba bersih yang didasarkan atas Standar Akuntansi Internasional dan Standar Akuntansi Jerman. Adopsi SAI juga berdampak pada rasio keuangan, antarlain rasio ROE, RAO, ATO, rasio LEV dan PM, rasio nilai buku terhadap nilai pasar ekuitas, rasio Earning to Price.

Pricewaterhouse Coopers (2005) menyatakan bahwa perubahan standar akuntansi tersebut akan berdampak pada berbagai area antara lain: *Product viability, Capital Instruments, Derivatives dan hedging, Employee benefits, fair valuations, capital allocation, leasing, segment reporting, revenue recognition, impairment reviews, deferred taxation, cash flows, disclosures, borrowing arrangements and banking covenants.*

Peranan dan keuntungan harmonisasi atau adopsi IFRS sebagai standar akuntansi domestik

Keuntungan harmonisasi menurut Lecturer Ph. Diaconu Paul (2002) adalah: (1) Informasi keuangan yang dapat diperbandingkan, (2) Harmonisasi dapat menghemat waktu dan uang, (3) Mempermudah transfer informasi kepada karyawan serta mempermudah dalam melakukan training pada karyawan, (4) Meningkatkan perkembangan pasar modal domestik menuju pasar modal internasional, (5) Mempermudah dalam melakukan analisis kompetitif dan operasional yang berguna untuk menjalankan bisnis serta mempermudah dalam pengelolaan hubungan baik dengan pelanggan, supplier, dan pihak lain.

Pricewaterhouse Coopers (2005) dalam publikasinya “Making A change To IFRS” mengatakan: *“Financial reporting that is not easily understood by global users is unlikely to bring new business or capital to a company. This is why so many are either voluntarily changing to IFRS, or being required to by their governments. Communicating in one language to global stakeholders enhances confidence in the business and improves finance-raising capabilities. It also allows multinational groups to apply common accounting across their subsidiaries, which can improve internal communications, and the quality of management reporting and group decision-making. At the same time, IFRS can ease acquisitions and divestments through greater certainty and consistency of accounting interpretation. In increasingly competitive markets, IFRS allows companies to benchmark themselves against their peers worldwide, and allows investors and others to compare the company’s performance with competitors globally. Those companies that do not make themselves comparable (or can’t, because national laws stand in the way) will be at a disadvantage and their ability to attract capital and create value going forward will be undermined”*

Dalam publikasi tersebut, Pricewaterhouse Coopers sebagai perusahaan jasa profesional atau kantor akuntan terbesar di dunia saat ini, menyatakan bahwa laporan keuangan dituntut untuk dapat memberikan informasi yang lebih dapat dipahami oleh pemakai global, dengan demikian dapat menarik modal ke dalam

perusahaan. Hal inilah yang mendorong atau menuntut perubahan peraturan akuntansi domestik ke arah IFRS. Dengan mengadopsi IFRS berarti laporan keuangan berbicara dengan bahasa akuntansi yang sama, hal ini akan memudahkan perusahaan multinasional dalam berkomunikasi dengan cabang-cabang perusahaannya yang berada dalam negara yang berbeda, meningkatkan kualitas pelaporan manajemen dan pengambilan keputusan. Dengan mengadopsi IFRS juga berarti meningkatkan kepastian dan konsistensi dalam interpretasi akuntansi, sehingga memudahkan proses akuisisi dan divestasi. Dengan mengadopsi IFRS kinerja perusahaan dapat diperbandingkan dengan pesaing lainnya secara global, apalagi dengan semakin meningkatnya persaingan global saat ini. Akan menjadi suatu kelemahan bagi suatu perusahaan jika tidak dapat diperbandingkan secara global, yang berarti kurang mampu dalam menarik modal dan menghasilkan keuntungan di masa depan.

Perlunya harmonisasi standar akuntansi internasional di Indonesia

Indonesia perlu mengadopsi standar akuntansi internasional untuk memudahkan perusahaan asing yang akan menjual saham di negara ini atau sebaliknya. Namun demikian, untuk mengadopsi standar internasional itu bukan perkara mudah karena memerlukan pemahaman dan biaya sosialisasi yang mahal. Indonesia sudah melakukannya namun sifatnya baru harmonisasi, dan selanjutnya akan dilakukan full adoption atas standar internasional tersebut. Adopsi standar akuntansi internasional tersebut terutama untuk perusahaan publik. Hal ini dikarenakan perusahaan publik merupakan perusahaan yang melakukan transaksi bukan hanya nasional tetapi juga secara internasional. Jika ada perusahaan dari luar negeri ingin menjual saham di Indonesia atau sebaliknya, tidak akan lagi dipersoalkan perbedaan standar akuntansi yang dipergunakan dalam menyusun laporan.

Ada beberapa pilihan untuk melakukan adopsi, menggunakan IAS apa adanya, atau harmonisasi. Harmonisasi adalah, kita yang menentukan mana saja yang harus diadopsi, sesuai dengan kebutuhan. Contohnya adalah PSAK (pernyataan standar akuntansi keuangan) nomor 24, itu mengadopsi sepenuhnya IAS nomor 19. Standar ini berhubungan dengan imbalan kerja atau employee benefit.

Kerugian apa yang akan kita hadapi bila kita tidak melakukan harmonisasi, kerugian kita berkaitan dengan kegiatan pasar modal baik modal yang masuk ke Indonesia, maupun perusahaan Indonesia yang listing di bursa efek di Negara lain. Perusahaan asing yang ingin listing di BEI akan kesulitan untuk menerjemahkan laporan keuangannya dulu sesuai standart nasional kita, sedangkan perusahaan Indonesia yang akan listing di Negara lain, juga cukup kesulitan untuk menerjemahkan atau membandingkan laporan keuangan sesuai standart di negara tersebut. Hal ini jelas akan menghambat perekonomian dunia, dan aliran modal akan berkurang dan tidak mengglobal.

C. RINTANGAN DALAM PROSES MENUJU HARMONISASI

Menurut Nobes dan Parker (2002), rintangan yang paling fundamental dalam proses harmonisasi adalah: (1) perbedaan praktek akuntansi yang berlaku saat ini pada berbagai negara, (2) kurangnya atau lemahnya tenaga profesional atau lembaga profesional di bidang akuntansi pada beberapa negara, (3) perbedaan sistem politik dan ekonomi pada tiap-tiap negara.

Menurut Lecturer Ph. Diaconu Paul (2002), hambatan dalam menuju harmonisasi adalah: (1) Nasionalisme tiap-tiap negara, (2) Perbedaan sistem pemerintahan pada tiap-tiap negara, (3) Perbedaan kepentingan antara perusahaan multinasional dengan perusahaan nasional yang sangat mempengaruhi proses harmonisasi antar negara, (4) Tingginya biaya untuk merubah prinsip akuntansi.

Tantangan atau rintangan bagi perusahaan.

Penerapan IFRS dalam sebuah perusahaan atau organisasi bukanlah suatu keharusan. Sebuah perusahaan ketika akan beralih ke IFRS terlebih dahulu akan mempertimbangkan cost and benefit-nya. Perusahaan akan menerapkan IFRS apabila memperoleh incremental benefit atas penerapan IFRS tersebut. Namun bagi perusahaan multinasional, wajib menerapkan IFRS dalam laporan keuangannya dikarenakan perusahaan ini berpatner dengan perusahaan-perusahaan lain secara global. Jika perusahaan multinasional tidak mau mengadopsi IFRS, maka ia akan ditinggalkan oleh patner usahanya yang membutuhkan laporan keuangan yang berstandar internasional.

IFRS adalah sebuah sistem pengukuran kinerja baru. Prinsip akuntansi yang baru ini harus di umumkan kepada semua pihak di sebuah perusahaan (organisasi). Merubah standar akuntansi dari standar domestik menjadi standar internasional bukanlah sekedar berganti aturan akuntansi semata, tetapi juga berarti perubahan dalam pola pikir pegawai accounting/keuangan dan bagian lain di perusahaan dalam bekerja, mereka dituntut untuk mengetahui dan bisa membuat laporan keuangan ber-standar IFRS. Hal ini tentu saja membutuhkan waktu dan usaha yang keras.

Tantangan atau rintangan bagi kalangan akademisi.

Indonesia akan mengadopsi IFRS secara penuh pada tahun 2012. Untuk tujuan itu, sampai dimana kesiapan kalangan akademisi khususnya bidang akuntansi di Indonesia? Mengingat kalangan akademisi adalah ujung tombak dalam mempersiapkan atau menghasilkan generasi-generasi penerus yang akan berhadapan langsung dengan IFRS dalam dunia kerjanya di masa depan. Apakah akademisi Indonesia (seperti guru, dosen dan guru besar akuntansi) sudah siap mengganti kurikulum, buku literature, silabus dan bahan/alat ajar akuntansi lainnya? Mengubah kurikulum akuntansi bukanlah pekerjaan mudah, menyangkut banyak aspek.

Michael Cangemi (President dan CEO dari FEI) dalam tulisannya di “March issue“ mengatakan: “*This means that all of the GAAP books you own, everything you learned in college and in your entire career will change*”, semua buku mengenai GAAP yang anda miliki beserta segala sesuatu yang anda pelajari di sekolah dan *career* akan berubah. “*Major accounting schools - the Universities of Texas, Illinois and Wisconsin - will teach IFRS*”, kata Larry Rittenberg, Ph.D., Ernst & Young professor, University of Wisconsin. Hampir semua universitas yang menyelenggarakan jurusan akuntansi di semua negara bagian amerika serikat telah memiliki kelas khusus IFRS, katanya, seperti di lansir oleh Financial Executive Online.

D. KESIMPULAN

1. Standar Akuntansi Keuangan Indonesia perlu mengadopsi IFRS karena kebutuhan akan info keuangan yang bisa diakui secara global untuk dapat bersaing dan menarik investor secara global.
2. Saat ini, adopsi yang dilakukan oleh PSAK Indonesia sifatnya adalah harmonisasi, belum adopsi secara utuh, namun indonesia mencanangkan akan adopsi seutuhnya IFRS pada tahun 2012. Adopsi ini wajib diterapkan terutama bagi perusahaan publik yang bersifat multinasional, untuk perusahaan non publik yang bersifat lokal tidak wajib diterapkan.
3. Perlu dipertimbangkan lebih jauh lagi sifat adopsi apa yang cocok diterapkan di Indonesia, apakah adopsi secara penuh IFRS atau adopsi IFRS yang bersifat harmonisasi yaitu mengadopsi IFRS disesuaikan dengan kondisi ekonomi, politik, dan sistem pemerintahan di Indonesia. Adopsi secara penuh IFRS akan meningkatkan keandalan dan daya banding informasi laporan keuangan secara internasional, namun adopsi seutuhnya akan bertentangan dengan sistem pajak pemerintahan Indonesia atau kondisi ekonomi dan politik lainnya. Hal ini merupakan rintangan dalam adopsi sepenuhnya IFRS di Indonesia.
3. Untuk mencapai adopsi seutuhnya (*full adoption*) pada 2012, tantangan terutama dihadapi oleh kalangan akademisi dan perusahaan di Indonesia. Jika ingin full adoption IFRS pada tahun 2012, berarti sebelum tahun 2012 kalangan akademisi khususnya bidang akuntansi harus siap terlebih dahulu terhadap perubahan ini dengan cara melakukan penyesuaian terhadap kurikulum, silabi, dan literatur. Penyesuaian terhadap perubahan ini memerlukan waktu dan usaha yang keras, karena penyesuaian terhadap peraturan yang baru menyangkut banyak aspek dan bukanlah hal yang dapat terjadi dalam waktu yang singkat. Bagi perusahaan atau organisasi, perubahan dilakukan terutama oleh perusahaan go publik atau perusahaan multinational yang melakukan transaksi dan berinteraksi dengan perusahaan lainnya secara international.
4. Adopsi seutuhnya (*full adoption*) terhadap IFRS, berarti merubah prinsip-prinsip akuntansi yang selama ini telah dipakai menjadi suatu standar akuntansi berlaku

secara internasional. Hal ini kemungkinan besar tidak akan dapat tercapai dalam waktu dekat, mengingat kendala yang dihadapi antaralain: (1) standar akuntansi sangat berhubungan dengan sistem perpajakan. Sistem perpajakan setiap negara bervariasi. Jika prinsip akuntansi distandarkan secara internasional, berarti sistem perpajakannya juga harus distandarkan secara internasional, masalahnya mungkinkah ini terjadi? (2) standar akuntansi adalah suatu kebijakan akuntansi yang dibuat berdasarkan kebutuhan politik dan ekonomi suatu negara. Politik dan ekonomi setiap negara bervariasi, sehingga masalah politik dan ekonomi akan selalu menjadi hambatan dalam adopsi IFRS secara utuh dalam suatu negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Fahmi. 2008. Bank wajib terapkan revisi PSAK pada 2010. *Bisnis Indonesia*. <http://web.bisnis.com/edisi-cetak/edisi-harian/keuangan/1id39361.html>
- American Institute Certified Public Accountants. 2008. *IFRS: An AICPA (American Institute Certified Public Accountants) Background*. Newyork. www.IFRS.com. 1 April 2009.
- American Institute Certified Public Accountants. 2008. *IFRS Primer for Audit Committees*. Newyork. www.IFRS.com. 1 April 2009.
- Ashbaugh and Pincus. 1999. "Domestic Accounting Standard, International Accounting Standards, and The Predictability of Earning".
- Barth, Landsman and Lang. 2005. "International Accounting Standards and Accounting Quality". *Journal of Accounting*.
- Basir, Syarief. 2008. Adopsi Standar Auditing dan Assurance Internasional, Sudah Sampai Dimana?. *Majalah Akuntan Indonesia* edisi No. 6 Tahun II Maret 2008.
- Belkaoui, Ahmed, 1998, *Accounting Theory*, Penerjemah Marwata, dkk., Salemba Empat, Jakarta.
- Choi, Frederich, D.S.Frost, Carol A. and Meek, Gary K. 1999. *International Accounting*. Prentice Hall, Upper Saddle River, NY.
- Choi & Mueller. 1998. *Akuntansi Internasional*. Salemba Empat. Jakarta.
- Delloitte News Letter. 2007. *IFRS Convergence Planning. The Standards Up Date*, Vol.1. 24 September 2007. www.auditmepost.blogspot.com. (Desember 2008).

- Hardi. 2008. SPAP, kapan full adoption ke ISA ? www.auditmepost.blogspot.com (Desember, 2008)
- Hardi. 2008. 3 PSAK revisian DSAK-IAI berlaku efektif sejak 1 Januari 2008. Sudah siapkah Anda ? <http://web.bisnis.com/edisi-cetak/edisi-harian/keuangan/1id39361.html>, (Februari, 2009).
- Hendricksen, Eldon S. (Marianus Sinaga, Editor), 1996, *Teori Akuntansi*, Edisi 4, Salemba Empat, Jakarta.
- Hung and Subramanyan. 2004. "Financial Statement Effects of Adoption International Accounting Standards: The Case of Germany". *Working Paper, University of Southern Carolina*.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 1999. *Standar Akuntansi Keuangan*, Salemba Empat. Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 2009. *Program Konvergensi IFRS 2009*. www.iaiglobal.or.id. 3 April 2009.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2008. *Prinsip Akuntansi: Sejarah SAK*. www.iaiglobal.or.id
- International Accounting Standards Committee. 1999. *International Accounting Standards 1999*.
- Kanaka Puradiredja Suhartono. Public Accountant, tax and business advisory services. 2009. Menuju Konvergensi IFRS di tahun 2012. www.kanaka.co.id. 3 April 2009.
- Kanaka Puradiredja Suhartono. Public Accountant, tax and business advisory services. 2009. Konvergensi IFRS di Indonesia. www.kanaka.co.id. 3 April 2009.
- Lecturer Ph. Diaconu Paul. 2002. "Harmonization of The International Accounting System". *Academy of Economic Studies Bucharest*.
- Osman Ramli Satrio dan rekan. 2007, a member of deloitte Touche Tohmatsu. IFRS and Indonesian GAAP: a Comparison. Deloitte, audit and assurance.
- Petreski, Marjan. 2005. "The Impact of International Accounting Standards on Firms".
- Pricewaterhouse Coopers. 2005. Similarities and Differences: a Comparison of IFRS, Indonesian GAAP, US GAAP. Published by *Kantor Akuntan Haryanto Sabari dan rekan*.

Saudagaran, Sharokh. 2001. *“International Accounting: A User Perspective”*. Thompson Learning.

Syafri Adnan dan Jamason Sinaga. 2005. *Peningkatan Standar Akuntansi Intenasional* (Improvement to International Public Sector Accounting Standards).

Tarca, Ann. 2002.”International Convergence of Accounting Practise: Choosing Between IAS and US GAAP”. *University of Western Australia*.

Zaitul. 2003. Tinjauan Kritis tentang Pengaruh Budaya Terhadap Sistem Akuntansi. *Fakultas Ekonomi Universitas Bung Hatta*.

ANALISIS HUBUNGAN INVESTMENT OPPORTUNITY SET (IOS) BERDASARKAN NILAI PASAR DAN NILAI BUKU DENGAN REALISASI PERTUMBUHAN

Einde Evana²

ABSTRAK

The goal of this research is to prove empirically connection between IOS (Investment Opportunity Set) and growth realization. IOS proxy that is used in this research is proxy based on value that is market to book value of equity (MVEBVE). To prove IOS proxy validation, we earlier prove empirically that is significantly different between market value and book value.

The selection of samples is done by purposive judgment sampling method. This sample researches are 53 companies from 148 manufacture companies which are registered in Indonesian Stock Exchange. The researcher use paired sample t-test as analytical test to try the first hypothesis. Whereas to 2nd, 3rd, 4th and 5th IOS' are correlated with growth realization by use one-tailed percent correlation. Growth realization of company is proxies by growth of assets, equity, sales and earnings.

The result of paired-sample t-test shows that there is significantly different between market value and book value so that proportion ratio of market value and book value can be used as IOS proxy that valid enough. Whereas the test result use one-tailed pearson correlation with significant rate (α) : 1% shows that there is significant positive correlation between IOS and assets growth realization, equity and selling. For IOS correlation and earning growth realization there is positive correlation but not significant. It is maybe caused by earning assignment sample's company for dividend is bigger than earning assignment for retained earning.

Key words : Investment Opportunity Set (IOS)

A. LATAR BELAKANG PENELITIAN

Sedikit sekali penelitian pasar modal yang diasosiasikan dengan struktur modal perusahaan, terutama dengan set peluang investasi. Kemudian muncul konsep baru dalam menilai suatu perusahaan dengan mengkombinasikan aset yang dimiliki dan opsi investasi di masa depan, yaitu konsep Investment Opportunity Set (IOS).

IOS merupakan nilai sekarang dari pilihan-pilihan perusahaan untuk membuat investasi di masa depan. Menurut Smith dan Watts (1992) dalam Hartono (2000) potensi pertumbuhan terlihat pada kesempatan investasi yang diprosikan dengan

² Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Lampung

berbagai kombinasi nilai set kesempatan investasi (*Investment Opportunity Set*). Munculnya istilah IOS dikemukakan oleh Myers (1977) dalam Hartono (2000) yang menguraikan pengertian perusahaan, yaitu sebagai suatu kombinasi antara aktiva riil (*assets in place*) dan opsi investasi masa depan.

Menurut Gaver dan Gaver (1993) opsi investasi masa depan tidak semata-mata hanya ditunjukkan dengan adanya proyek-proyek yang didukung oleh kegiatan riset dan pengembangan saja, tetapi juga dengan kemampuan perusahaan dalam mengeksplorasi kesempatan mengambil keuntungan dibandingkan dengan perusahaan lain yang setara dalam suatu kelompok industrinya.

Penelitian Kallapur dan Trombley ditindaklanjuti oleh Sami et al. pada tahun 1999, Tettet Fijrijanti dan Jogiyanto Hartono (2000) serta Adi Prasetyo pada tahun 2000. Tabel 1 menunjukkan daftar penelitian empiris mengenai IOS yang disajikan secara lengkap.

Berdasarkan penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa penting sekali menilai suatu perusahaan terutama mengenai struktur modalnya. Dari struktur modal tersebut kita dapat melihat nilai buku dan nilai pasarnya. Dari sinilah kita dapat mengetahui apakah perusahaan tersebut bertumbuh atau tidak bertumbuh. Informasi ini dapat digunakan untuk pengambilan keputusan investasi.

Asosiasi antara IOS dan kinerja manajemen tercermin pada pertumbuhan nilai perusahaan yang dikelola manajemen (Subekti dan Kusuma, 2001). Realisasi pertumbuhan ini ditunjukkan melalui pertumbuhan nilai buku aktiva, penjualan, laba, dan nilai buku perusahaan (Kallapur dan Trombley, 1999 dalam Utami, 2007). Nilai IOS suatu perusahaan juga mempengaruhi keputusan kebijakan perusahaan.

Dalam penelitian Kallapur dan Trombley (1999) dalam Utami (2007), rasio yang diuji yaitu market to book value asset (MVABVA), dengan dasar pemikiran bahwa prospek pertumbuhan perusahaan terefleksi dalam harga saham, pasar menilai perusahaan yang sedang bertumbuh lebih besar dari nilai bukunya, market to book value of equity (MVEBVE) mencerminkan pasar menilai return dari investasi perusahaan di masa datang akan lebih besar dari return yang diharapkan ekuitasnya, price to earning (PER), capital expenditure to book value asset (CAPBVA) dan capital expenditure to market value of asset (CAPMVA).

Bertitik tolak dari penjelasan diatas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa rasio antara nilai buku dan nilai pasar saham dapat menunjukkan pertumbuhan suatu perusahaan. Perbandingan antara nilai buku dan nilai pasar saham dapat digunakan sebagai pengukur perusahaan yang bertumbuh (growth) dan dapat memberikan kesempatan pilihan-pilihan investasi di masa datang bagi investor. Harga pasar saham merupakan harga saham yang terjadi di pasar bursa pada saat tertentu, sedangkan nilai buku merupakan nilai yang dicatat oleh perusahaan (Hartono, 2003). Dengan demikian investor dapat memiliki kesempatan berinvestasi yang

menguntungkan dengan cara menganalisis pertumbuhan suatu perusahaan yang terlihat dari nilai buku dan nilai pasar saham perusahaan.

Dari pengertian tersebut para peneliti telah mengembangkan proksi pertumbuhan perusahaan menjadi IOS sesuai dengan tujuan dan jenis data yang tersedia dalam penelitiannya. Menurut Gaver dan Gaver (1993), IOS perusahaan merupakan sesuatu yang secara melekat bersifat tidak dapat diobservasi. Sifatnya yang tidak dapat diobservasi menyebabkan IOS memerlukan sebuah proksi. Berbagai jenis proksi telah digunakan oleh banyak peneliti dalam studi empirisnya secara tidak seragam. Salah satu proksi IOS yaitu mengukur pertumbuhan perusahaan dengan membandingkan nilai pasar dan nilai buku saham. Menurut Hartono (2003) menyatakan bahwa perusahaan yang bertumbuh memiliki rasio nilai pasar yang lebih tinggi dari nilai buku sahamnya. Hal ini serupa dengan Charles P. Jones (1998) dalam Sari (2002) yang menyatakan bahwa rasio antara nilai pasar dan nilai buku saham perusahaan yang bertumbuh sama atau lebih dari satu.

B. KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pengertian IOS

Istilah Investment Opportunity Set (IOS) pertama kali dikemukakan oleh Myers (1976) dalam Utami (2007). Menurut Myers (1976) dalam Utami (2007) IOS merupakan keputusan investasi dalam bentuk kombinasi aktiva yang dimiliki (*assets in place*) dan pilihan pertumbuhan pada masa yang akan datang dengan Net Present Value (NPV) positif. Menurut Kallapur dan Trombley (2001) dalam Utami (2007) pertumbuhan merupakan kemampuan perusahaan untuk meningkatkan size-nya, sementara IOS merupakan opsi untuk berinvestasi pada suatu proyek yang memiliki net present value positif. Menurut kedua penelitian tersebut, IOS juga dapat meningkatkan size perusahaan, sedangkan tidak semua *growth opportunities* mampu menghasilkan net present value positif. Menurut Gaver dan Gaver (1993), IOS merupakan nilai perusahaan yang besarnya tergantung pada pengeluaran-pengeluaran yang ditetapkan manajemen di masa yang akan datang, yang pada saat ini merupakan pilihan-pilihan investasi yang diharapkan akan menghasilkan return yang lebih besar.

Komponen nilai perusahaan yang merupakan hasil dari pilihan-pilihan untuk melakukan investasi di masa yang akan datang merupakan set kesempatan investasi Myers (1976) dalam Utami (2007) IOS menunjukkan opsi pertumbuhan bagi perusahaan. Nilai opsi pertumbuhan tersebut tergantung pada *discretionary expenditure* dari manajer (Myers, 1976 dalam Utami, 2007). Opsi pertumbuhan tersebut bisa berupa investasi tradisional atau *discretionary expenditure* yang diperlukan untuk kesuksesan perusahaan seperti penelitian dan pengembangan teknologi baru (Jones dan Sharma, 2001 dalam Utami, 2007).

Klasifikasi Proksi IOS

IOS merupakan variabel yang tidak dapat diobservasi (variabel laten), oleh karena itu diperlukan proksi. Hal ini didukung oleh Kallapur dan Trombley (2001) dalam Utami (2007), yang menyatakan bahwa set kesempatan investasi perusahaan tidak dapat diobservasi untuk pihak-pihak di luar perusahaan. Berbagai variabel yang digunakan sebagai proksi set kesempatan investasi telah banyak diteliti dan diuji pada berbagai penelitian. Proksi ini diklasifikasikan dalam tiga tipe (Gaver dan Gaver, 1993), yaitu

Proksi berdasarkan harga (*price-based proxies*)

IOS berdasarkan harga merupakan proksi yang menyatakan bahwa prospek pertumbuhan perusahaan sebagian dinyatakan dalam harga pasar. Proksi yang menyatakan bahwa prospek pertumbuhan perusahaan secara parsial dinyatakan dalam harga-harga saham, dan perusahaan-perusahaan yang tumbuh akan memiliki nilai pasar yang lebih tinggi secara relatif untuk aktiva yang dimiliki (*assets in place*). Rasio-rasio yang telah digunakan dalam beberapa penelitian yang berkaitan dengan proksi pasar adalah sebagai berikut: *market to book value of asset*, *market to book value of equity*, *tobin's q*, *ratio of property, plant and equipment to firm value*, *earnings to price ratios*, *ratio of depreciation to firm value* dan *firm value to book value property, plant and equipment*.

Proksi berdasarkan investasi (*investment-based proxies*)

Proksi berbasis investasi menunjukkan bahwa tingkat aktivitas investasi yang tinggi berkaitan secara positif dengan nilai IOS suatu perusahaan. Perusahaan-perusahaan yang memiliki suatu IOS yang tinggi juga akan memiliki tingkatan investasi yang tinggi, yang dikonversi menjadi aset yang dimiliki. Bentuk dari proksi ini merupakan suatu rasio yang membandingkan suatu investasi yang telah diinvestasikan dalam bentuk aktiva tetap, atau suatu hasil operasi yang diproduksi dari aktiva yang telah diinvestasikan. Proksi IOS berbasis investasi yang biasanya digunakan dalam penelitian adalah *ratio capital expenditure to book value asset*, *ratio capital expenditure to market value of assets*, *ratio investment to net sales*, *ratio investment to earnings*.

Proksi berdasarkan varian (*variance measures*)

Proksi ini mengungkapkan bahwa suatu opsi akan menjadi lebih bernilai jika menggunakan variabilitas ukuran untuk memperkirakan besarnya opsi yang tumbuh, seperti variabilitas return yang mendasari peningkatan aktiva. Ukuran yang digunakan dalam beberapa penelitian, diantaranya: *variance of returns*, *the variance of asset deflated sales*, *asset betas*.

Smith dan Watts (1992) dan Gaver dan Gaver (1993) menyatakan bahwaterdapat alternatif proksi gabungan sebagai upaya untuk mengurangi adanya kesalahan pengukuran yang terdapat pada proksi dengan rasio individual. Alternatif dari proksi gabungan yang pernah dilakukan adalah dengan menggunakan analisis sensitivitas dengan menggunakan common factor analysis.

Penggabungan dari beberapa alternatif proksi IOS dilakukan sebagai upaya untuk mengurangi *measurement error* yang ada pada proksi dengan rasio individual, sehingga akan menghasilkan pengukuran yang baik untuk set kesempatan investasi.

Adanya berbagai macam proksi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya menunjukkan bahwa selalu ada proksi yang tidak dapat digunakan. Hal ini menyebabkan belum adanya kesepakatan tentang proksi yang dapat mewakili IOS dengan baik

Penelitian-Penelitian Terdahulu dan Perumusan Hipotesis

Penelitian ini menggunakan 5 variabel proksi IOS yang dipakai oleh peneliti sebelumnya, yaitu; 1) rasio market to book value equity (MVE/BVE), 2) rasio market value to book value of assets (MVA/BVA), 3) rasio price to earning (PER), 4) rasio capital expenditure to assets book value (CAP/BVA), 5) rasio capital expenditure to assets market value (CAP/MVA).

Penggunaan nilai pasar dalam membentuk rasio IOS menurut Hartono (2000) sudah tepat karena nilai pasar dapat mengindikasikan adanya potensi kesempatan perusahaan untuk tumbuh dan berinvestasi di masa depan. Smith dan Watts (1992) dalam Utami (2007) menunjukkan bukti bahwa perusahaan yang tumbuh memiliki nilai rasio nilai pasar terhadap nilai bukunya yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang tidak tumbuh. Rasio MVA/BVA dan MVE/BVE berkorelasi positif terhadap pertumbuhan aktiva dan ekuitas. Kallapur dan Trombley (1999) dalam Utami (2007) juga menemukan bukti atas korelasi tersebut secara signifikan. Fijrijanti, Tettet, dan Hartono (2000) menunjukan arah korelasi positif antara rasio MVE/BVE dan MVA/BVA terhadap pertumbuhan aktiva secara konsisten.

Hasil penelitian Rokhiyati (2005) menyebutkan bahwa terdapat korelasi yang positif signifikan untuk perusahaan yang tumbuh terjadi antara MVE/BVE terhadap pertumbuhan penjualan sebesar 0,389 dan terhadap pertumbuhan ekuitas sebesar 0,708. Rasio MVA/BVA terhadap pertumbuhan ekuitas sebesar 0,667. Rasio CAP/BVA terhadap pertumbuhan aset sebesar 0,377. Sedangkan hasil penelitian Utami (2007) menemukan bahwa MVE/BVE berkorelasi positif dengan pertumbuhan aktiva. Rasio MVA/BVA berkorelasi negatif terhadap pertumbuhan aktiva dan ekuitas.

Simpulan teori dan bukti empiris yang telah dipaparkan sebelumnya dapat menjadi acuan bahwa perusahaan yang berpotensi tumbuh mendapatkan respon positif dari

pasar dibandingkan dengan perusahaan yang tidak berpotensi tumbuh. Potensi pertumbuhan perusahaan ini dapat diketahui dari laporan keuangan. Oleh karena itu, saat publikasi laporan keuangan seharusnya pasar segera merespon informasi tersebut, kemudian menginterpretasi dan menganalisis informasi yang diterima lebih lanjut. Sehingga keputusan yang diambil tidak hanya cepat, namun memiliki nilai ekonomis dan keakuratan yang tinggi. Hal tersebut tergantung dari interpretasi investor terhadap informasi laporan keuangan.

Hipotesis

Atas dasar kerangka teori dan hasil-hasil penelitian terdahulu maka hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah :

H1 : Terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai pasar dan nilai buku saham.

H2 : Terdapat korelasi positif signifikan antara proksi IOS berdasarkan nilai pasar dan nilai buku dengan realisasi pertumbuhan aktiva.

H3 : Terdapat korelasi positif signifikan antara proksi IOS berdasarkan nilai pasar dan nilai buku dengan realisasi pertumbuhan ekuitas.

H4 : Terdapat korelasi positif signifikan antara proksi IOS berdasarkan nilai pasar dan nilai buku dengan realisasi pertumbuhan penjualan.

H5 : Terdapat korelasi positif signifikan antara proksi IOS berdasarkan nilai pasar dan nilai buku dengan realisasi pertumbuhan laba.

C. METODE PENELITIAN

6. Jenis dan Sumber Data

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data sekunder, meliputi laporan keuangan tahunan perusahaan-perusahaan yang dimuat dalam Indonesian Capital Market Directory (ICMD). Sumber data yang digunakan untuk menghitung variabel-variabel dalam penelitian ini diperoleh dari Bursa Efek Indonesia periode 2004 hingga 2006. Sumber data diperoleh dari (1) Indonesian Capital Market Directory 2004 - 2006 dan dari database BEI (www.jsx.co.id) (2) laporan keuangan tahunan yang terdiri dari neraca dan laporan laba/rugi.

7. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah semua perusahaan manufaktur yang listing di BEI periode 2004-2006. Didasarkan pada metode *purposive sampling*, dengan kriteria pemilihan:

- ✓ Perusahaan telah terdaftar di BEI minimal sejak Januari 2004. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh sampel yang berusia minimal 3 tahun (sampai dengan tahun 2006).
- ✓ Perusahaan menerbitkan laporan keuangan per 31 Desember berturut-turut selama periode 2004-2006. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya pengaruh waktu parsial dalam pengukuran variabel.
- ✓ Laporan keuangan perusahaan sampel tidak menunjukkan adanya saldo total ekuitas dan laba yang negatif selama periode 2004-2006. Penggunaan ekuitas dan laba negatif menyebabkan proksi-proksi IOS menjadi bias dan tidak bermakna.

Berdasarkan kriteria-kriteria tersebut, hanya sebanyak 53 perusahaan yang memenuhi kriteria sebagai sampel penelitian. Daftar perusahaan yang menjadi sampel penelitian disajikan pada Tabel 2.

Operasionalisasi Variabel

- a.. IOS berdasarkan nilai pasar dengan alternatif proksi harga:

$$MVE/BVE =$$

- b. Perhitungan nilai buku per lembar saham yaitu:

$$NB/lb =$$

- c. Variabel Realisasi Pertumbuhan Perusahaan

Masing-masing pertumbuhan perusahaan dihitung dengan rumus sebagai berikut:

- 1) Pertumbuhan Aktiva = $[\text{total aktiva tahun } X - \text{total aktiva tahun } X-1] : [\text{total aktiva tahun } X-1]$
- 2) Pertumbuhan Ekuitas = $[\text{total ekuitas tahun } X - \text{total ekuitas tahun } X-1] : [\text{total ekuitas tahun } X-1]$
- 3) Pertumbuhan Penjualan = $[\text{total penjualan neto tahun } X - \text{total penjualan neto tahun } X-1] : [\text{total penjualan neto } X-1]$
- 4) Pertumbuhan Laba = $[\text{laba } X - \text{laba } X-1] : [\text{laba } X-1]$

(Fijrijanti dkk 2000)

Alat Uji

a. Pengujian Hipotesis 1

Untuk menguji hipotesis 1 digunakan uji paired sample t-test pada tingkat keyakinan 95% dengan pengambilan keputusan sebagai berikut:

1. Jika $\text{sig} > 0.05$ maka H_a ditolak.
2. Jika $\text{sig} < 0.05$ maka H_a diterima.

b. Pengujian Hipotesis 2, 3, 4, dan 5

Pengujian terhadap hipotesis 2, 3, 4 dan 5 dilakukan menggunakan alat uji Pearson Correlation dengan tingkat keyakinan 99%. Kaidah pengambilan keputusan adalah:

1. Jika $\text{sig} < 0,01$ maka H_a diterima.
2. Jika $\text{sig} > 0,01$ maka H_a ditolak

D. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Tabel di atas menyajikan ringkasan hasil analisis statistik deskriptif atas variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Data di tabel 3 terdiri dari 5 kelompok yaitu (1) variabel IOS, (2) rata-rata realisasi pertumbuhan aktiva (2004-2006), (3) rata-rata realisasi pertumbuhan ekuitas (2004-2006), (4) rata-rata realisasi pertumbuhan penjualan (2004-2006), (5) rata-rata realisasi pertumbuhan laba (2004-2006).

Berdasarkan hasil statistik deskriptif pada tabel 3 di atas, diperoleh sebanyak 53 sampel perusahaan manufaktur yang sesuai dengan kriteria sampling seperti telah dijelaskan pada Bab III. IOS (Investment Opportunity Set) yang diprosikan dengan rasio MVE/BVE menunjukkan besarnya perbandingan antara nilai pasar saham dengan besarnya ekuitas perusahaan. Perusahaan dengan rasio MVE/BVE yang tinggi mengindikasikan bahwa perusahaan memiliki pertumbuhan nilai pasar saham yang besar. Berdasarkan hasil pada tabel 3 di atas, statistik deskriptif terhadap rasio MVE/BVE menunjukkan nilai minimum sebesar 0,16, nilai maksimum sebesar 3,97, dengan rata-rata sebesar 1,3553. Berdasarkan nilai rata-rata yang dihasilkan, dapat disimpulkan bahwa perusahaan sampel secara umum memiliki pertumbuhan nilai pasar saham yang cukup tinggi. Hal ini ditunjukkan dengan besarnya rata-rata

pertumbuhan nilai pasar saham perusahaan yang hampir mendekati dua kali lipat apabila dibandingkan dengan nilai buku ekuitas perusahaan.

Sedangkan realisasi pertumbuhan perusahaan yang diukur dengan rata-rata total aktiva, ekuitas, penjualan, dan laba juga menunjukkan hasil yang cukup baik. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata dari masing-masing realisasi pertumbuhan yang bernilai positif.

Perhitungan Rasio Investment Opportunity Set (IOS)

Analisis IOS dalam penelitian ini dengan menggunakan salah satu bentuk proksi IOS yaitu hanya menggunakan sebuah rasio sebagai proksi IOS dalam menjalankan penelitian ini. Rasio yang digunakan yaitu perhitungan market to book value equity (MVE/BVE). Rumus MVE/BVE sebagai berikut :

$$\text{MVE/BVE} = \frac{\text{(Jumlah lembar saham beredar X Harga Penutupan)}}{\text{Total Ekuitas}}$$

MVE/BVE sebagai nilai IOS dapat pula dihitung dengan cara membagi nilai pasar saham dengan nilai buku saham, sebagai berikut :

$$\text{IOS} = \frac{\text{Nilai Pasar Saham}}{\text{Nilai Buku Saham}}$$

Hasil Perhitungan MVE/BVE dapat dilihat pada Tabel 3.

Rasio dari market to book value of equity mencerminkan pasar yang menilai return dari investasi perusahaan di masa datang akan lebih besar dari return yang diharapkan dari ekuitasnya. Rasio perbandingan antara nilai pasar dan nilai buku saham dapat digunakan untuk mengetahui dan menilai bagaimana keadaan perusahaan tersebut, apakah termasuk dalam klasifikasi perusahaan bertumbuh (*growth*) atau perusahaan yang tidak bertumbuh (*non growth*).

Penelitian ini termasuk dalam jenis proksi IOS berdasarkan harga, yaitu percaya pada gagasan bahwa prospek yang tumbuh dari suatu perusahaan sebagian dinyatakan dalam harga pasar. Perusahaan yang bertumbuh akan memiliki harga pasar saham yang lebih besar dari pada nilai buku sahamnya. Ini berarti bahwa perusahaan-perusahaan yang menunjukkan rasio MVE/BVE yang tinggi akan memiliki pertumbuhan ekuitas yang besar.

Perusahaan yang bertumbuh memiliki kebijakan yang berfokus pada pertumbuhan perusahaan. Porter (1980) dalam Utami (2007) menyatakan bahwa perusahaan bertumbuh memiliki pertumbuhan margin, laba dan penjualan yang tinggi. Hal ini

merupakan berita baik bagi investor, sehingga perusahaan bertumbuh akan direspon positif oleh pasar (Utami, 2007).

Sedangkan hasil perhitungan rata-rata realisasi pertumbuhan dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4 memperlihatkan rata-rata realisasi pertumbuhan perusahaan. Dari tabel dapat dilihat rata-rata pertumbuhan aktiva perusahaan selama 3 tahun. Terdapat 47 perusahaan yang mengalami pertumbuhan positif dan 6 perusahaan yang mengalami pertumbuhan negatif. Pada rata-rata pertumbuhan ekuitas selama 3 tahun terdapat 51 perusahaan yang mengalami pertumbuhan positif dan 2 perusahaan yang mengalami pertumbuhan negatif. Sedangkan rata-rata pertumbuhan penjualan selama 3 tahun terdapat 51 perusahaan yang mengalami pertumbuhan positif dan 2 perusahaan yang mengalami pertumbuhan negatif. Pada rata-rata pertumbuhan laba selama 3 tahun terdapat 37 perusahaan yang mengalami pertumbuhan positif dan 16 perusahaan yang mengalami pertumbuhan negatif. Peluang investasi (IOS) rata-rata mengarah ke investasi aktual, oleh karena itu mempengaruhi pertumbuhan sesungguhnya dalam periode 3-5 tahun.

Pengujian Hipotesis

Pengujian Hipotesis 1

Pengujian hipotesis ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan signifikan antara nilai pasar dan nilai buku sehingga perbandingan antara nilai pasar dan nilai buku dapat digunakan sebagai proksi IOS. Pengujian hipotesis ke-1 dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan alat uji paired sample t-test pada tingkat keyakinan 95% dan tingkat kesalahan dalam analisis (α) 5% dengan hasil pada tabel berikut ini.

Hasil Pengujian H_1 (Paired Sample T-Test)

	Mean	Std. Deviation	t	Sig. (2-tailed)
Nilai Pasar dibandingkan Nilai Buku	1739,647	7427,84390	2,953	0,004

Nilai sig (two-tailed) = 0,004 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa bukti empiris mendukung hipotesis 1, yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara nilai pasar dan nilai buku. Hasil pengujian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Sari (2002) bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai pasar dan nilai buku sehingga perbandingan antara nilai pasar dan nilai buku dapat digunakan sebagai proksi IOS yang valid. Informasi ini dapat digunakan untuk pengambilan keputusan investasi dengan cara menganalisis pertumbuhan suatu perusahaan yang terlihat dari nilai buku dan nilai pasar saham perusahaan.

Pengujian Hipotesis 2

Pengujian hipotesis ke-2, 3, 4, dan 5 dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan alat uji one-tailed Pearson Correlation. Untuk pengujian hipotesis ke-2 penulis ingin menguji apakah terdapat korelasi positif signifikan antara IOS dengan realisasi pertumbuhan aktiva. Hasil pengujian dapat dilihat pada tabel berikut :

Hasil Pengujian H₂ (One-Tailed Pearson Correlation)

	N	Koef. Korelasi	Sig. (1-Tailed)
IOS dengan Realisasi Pertumbuhan Aktiva	53	0,382	0,002

Pada hipotesis kedua nilai koefisien korelasi sebesar 0,382 dengan sig (one tailed) = 0,002 lebih kecil dari $\alpha = 0,01$. Hasil pengujian ini menerima hipotesis 2, yang menyatakan bahwa terdapat korelasi positif signifikan antara IOS dengan realisasi pertumbuhan aktiva. Nilai korelasi sebesar 0,382 menunjukkan hubungan korelasi yang cukup berarti. Sedangkan nilai korelasi positif menunjukkan korelasi yang searah dimana kenaikan nilai IOS akan meningkatkan nilai realisasi pertumbuhan aktiva (Guilford, (1956:145) dalam Utami 2007). Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan Fijrijanti, Tettet, dan Jogiyanto Hartono (2000) yang menunjukkan arah korelasi positif antara rasio MVE/BVE dan MVA/BVA terhadap pertumbuhan aktiva secara konsisten. Bukti penelitian ini mendukung teori yang dinyatakan oleh Gaver dan Gaver (1993) bahwa prospek pertumbuhan secara parsial dinyatakan dalam harga saham, dan perusahaan-perusahaan yang tumbuh akan memiliki nilai pasar yang lebih tinggi secara relatif untuk aktiva yang dimiliki (assets in place). Sementara Myers (1976) dalam Utami (2007) menyatakan IOS merupakan keputusan investasi dalam bentuk kombinasi aktiva yang dimiliki (assets in place) dan pilihan pertumbuhan pada masa yang akan datang dengan Net Present Value (NPV) positif.

Pengujian Hipotesis 3

Pada hipotesis ke-3 ini akan diuji pula apakah terdapat korelasi positif signifikan antara IOS dengan realisasi pertumbuhan ekuitas. Hasil pengujian dapat dilihat pada tabel berikut :

Hasil Pengujian H₄ (one-tailed Pearson Correlation)

	N	Koef. Korelasi	Sig. (1-Tailed)
IOS dengan Realisasi Pertumbuhan Penjualan	53	0,404	0,001

Pada hipotesis ketiga nilai koefisien korelasi sebesar 0,558 dengan sig. (one tailed) = 0,000 lebih kecil dari $\alpha = 0,01$. Hasil pengujian ini menerima hipotesis 3, yang menyatakan bahwa terdapat korelasi positif signifikan antara IOS dengan realisasi pertumbuhan ekuitas. Nilai korelasi sebesar 0,558 menunjukkan hubungan korelasi yang kuat. Sedangkan nilai korelasi positif menunjukkan korelasi yang searah dimana kenaikan nilai IOS akan meningkatkan nilai realisasi pertumbuhan ekuitas (Guilford,

(1956:145) dalam Utami, 2007). Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian Kallapur dan Trombley (1999) dalam Utami (2007) yang menemukan bukti atas korelasi tersebut secara signifikan. Kallapur dan Trombley (2001) dalam Utami (2007) juga menyatakan bahwa pertumbuhan merupakan kemampuan perusahaan untuk meningkatkan size-nya dalam hal ini ekuitasnya, sementara IOS merupakan opsi untuk berinvestasi pada suatu proyek yang memiliki net present value positif.

Pengujian Hipotesis 4

Pengujian hipotesis ke-4 dilakukan untuk mengetahui apakah IOS dengan realisasi pertumbuhan penjualan berkorelasi positif secara signifikan. Hasil pengujian dapat dilihat pada tabel berikut:

Hasil Pengujian H₅ (one-tailed Pearson Correlation)

	N	Koef. Korelasi	Sig. (1-Tailed)
IOS dengan Realisasi Pertumbuhan Laba	58	0,112	0,213

Pada hipotesis keempat nilai koefisien korelasi sebesar 0,404 dengan sig (one tailed) = 0,001 lebih kecil dari $\alpha = 0,01$. Hasil pengujian ini menerima hipotesis 4, yang menyatakan bahwa terdapat korelasi positif signifikan antara IOS dengan realisasi pertumbuhan penjualan. Nilai korelasi sebesar 0,404 menunjukkan hubungan korelasi yang cukup berarti. Sedangkan nilai korelasi positif menunjukkan korelasi yang searah dimana kenaikan nilai IOS akan meningkatkan nilai realisasi pertumbuhan penjualan (Guilford, (1956:145) dalam Utami, 2007). Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian rokhayati (2005) yang menyebutkan bahwa terdapat korelasi positif signifikan untuk perusahaan yang tumbuh antara MVE/BVE terhadap pertumbuhan penjualan. Hal ini juga berarti bahwa investor sudah merespon informasi mengenai IOS dan realisasi pertumbuhan penjualan yang dapat menjadi indikator adanya kesempatan berinvestasi sehingga memungkinkan adanya pertumbuhan perusahaan di masa depan.

Adanya hubungan positif signifikan pada H₂, H₃, dan H₄ tersebut menunjukkan bahwa rasio nilai pasar dan nilai buku tersebut memiliki akurasi yang tinggi dalam memprediksi pertumbuhan perusahaan.

Pengujian Hipotesis 5

Pengujian hipotesis ke-5 ini juga dilakukan untuk mengetahui apakah IOS dengan realisasi pertumbuhan laba berkorelasi positif secara signifikan. Hasil pengujian dapat dilihat pada tabel berikut:

Hasil Pengujian H₅ (one-tailed Pearson Correlation)

	N	Koef. Korelasi	Sig. (1-Tailed)
IOS dengan Realisasi Pertumbuhan Laba	58	0,112	0,213

Pada hipotesis kelima nilai koefisien korelasi hanya sebesar 0,112 dengan sig. (one tailed) = 0,213 lebih besar dari $\alpha = 0,01$. Hasil pengujian ini menolak hipotesis 5, yang menyatakan bahwa terdapat korelasi positif signifikan antara IOS dengan realisasi pertumbuhan laba. Nilai korelasi sebesar 0,112 menunjukkan hubungan korelasi yang lemah sekali (Guilford, (1956:145) dalam Utami, 2007). Tidak terjadinya korelasi signifikan antara IOS dengan realisasi pertumbuhan laba kemungkinan besar disebabkan oleh pembagian laba untuk dividen yang lebih besar dibandingkan pembagian laba untuk retained earning sehingga hanya sebagian kecil instrument dari laba yang digunakan untuk investasi. Pecking Order Theory menyatakan bahwa perusahaan memprioritaskan pendanaan kesempatan investasi dengan pembiayaan internal baru selanjutnya dengan pembiayaan eksternal (Keown et.al 1996: 555). Hal ini sejalan dengan contracting hypotheses yang menyebutkan bahwa pendanaan perusahaan bertumbuh lebih banyak bersumber dari internal yaitu laba ditahan, daripada faktor eksternal yaitu hutang dan pengeluaran saham.

Hasil pengujian ini juga mendukung pernyataan IAI bahwa investor membutuhkan informasi untuk membantu menentukan apakah harus membeli, menahan atau menjual investasi tersebut. Pemegang saham juga tertarik pada informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan perusahaan untuk membayar dividen.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai hubungan *Investment Opportunity Set* (IOS) berdasarkan nilai pasar dan nilai buku dengan realisasi pertumbuhan maka kesimpulan yang dapat diambil adalah :

- i) Pengujian hipotesis pertama menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai pasar dan nilai buku saham yang konsisten dengan hasil penelitian Sari (2002) sehingga perbandingan antara nilai pasar dan nilai buku saham merupakan salah satu proksi *Investment Opportunity Set* (IOS) yang dapat menunjukkan pertumbuhan suatu perusahaan.
- j) Berdasarkan hasil pengujian hipotesis kedua, ketiga dan keempat penelitian ini berhasil membuktikan adanya korelasi positif signifikan antara IOS dengan realisasi pertumbuhan aktiva, ekuitas dan penjualan. Hal ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Fijrijanti, Tettet, dan Hartono (2000) serta Rokhiyati (2005) yang menunjukkan bukti empiris adanya korelasi positif signifikan antara MVEBVE dengan realisasi pertumbuhan aktiva dan penjualan secara konsisten.
- k) Berdasarkan hasil pengujian hipotesis kelima, penelitian ini tidak berhasil membuktikan adanya korelasi positif signifikan antara IOS dengan realisasi

laba. Hal ini kemungkinan besar disebabkan oleh variabilitas laba yang cukup tinggi dan pembagian laba yang lebih besar terhadap dividen dibandingkan dengan retained earnings.

Saran

Berdasarkan simpulan di atas, saran yang dapat dikemukakan dari penelitian ini yaitu:

- l) Untuk penelitian selanjutnya, sebaiknya menggunakan alternatif proksi IOS yang lebih banyak sehingga dapat mengobservasi IOS lebih detail.
- m) Hendaknya penelitian yang akan datang dapat menambah jumlah sampel perusahaan yang berasal dari berbagai sektor dan dilakukan dalam periode tahun yang lebih banyak
- n) Hendaknya penelitian dilakukan lebih mendetail memperhitungkan faktor-faktor lain seperti pembagian dividen, penambahan aktiva dan lain sebagainya.
- o) Hendaknya penelitian yang akan datang menjelaskan tentang korelasi antara IOS dengan faktor-faktor lain seperti kebijakan pendanaan, dividen, dan perubahan harga saham.

DAFTAR PUSTAKA

- Fijrijanti, Tettet, dan Jogiyanto Hartono M. 2000. Analisis Korelasi Pokok IOS Dengan Realisasi Pertumbuhan, Kebijakan Pendanaan dan Dividen. *Simposium Nasional Akuntansi III*. Jakarta.
- Gaver, Jennifer J., & Kenneth M.Gaver. 1993. Additional Evidence on The Association between the Investment Opportunity Set and Corporate Financing, dividend, and Compensation Policies. *Journal of Accounting and Economics*. 16. (<http://www.elsevier.com/>)
- Hartono, Jogiyanto. 2003. *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*. Edisi Ketiga. Yogyakarta: BPFE.
- Husnan, Suad. 2001. *Dasar-dasar Teori Portofolio dan Analisis Sekuritas*. Edisi Kedua. AMP, YKPN. Yogyakarta.
- IAI.2004. "Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan" *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta : Penerbit Salemba.
- Keown J, Arthur, David F. Scott Jr, John D Martin dan J. William Petty. 1996. *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*. Buku Dua. Jakarta: Salemba Empat.

- Makky, Resianty Dhini. Analisis Set Kesempatan Investasi Periode Sebelum Krisis dan Pada Krisis (Tahun 1996 & Tahun 1998) pada Perusahaan Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta. *Skripsi FE*.
- Prasetyo, Adi. 2000. Asosiasi Antara Investment Opportunity Set (IOS) dengan Kebijakan Pendanaan, Kebijakan Dividen, Kebijakan Kompensasi, Beta dan Perbedaan Reaksi Pasar: Bukti Empiris Dari Bursa Efek Jakarta. *Simposium Nasional Akuntansi III. Jakarta*.
- Parawiyati, Ambar Woro Hastuti dan Edi Subiyanto. 2000. Penggunaan Informasi Keuangan Untuk Memprediksi Keuntungan Investasi Bagi Investor di Pasar Modal. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*. Vol 3, No. 2. Juli: 214-228.
- Rokhayati, Isnaeni. 2005. Analisis Hubungan Investment Opportunity Set (IOS) dengan Realisasi Pertumbuhan serta Perbedaan Perusahaan yang Tumbuh dan Tidak Tumbuh Terhadap Kebijakan Pendanaan dan Dividen di Bursa Efek Jakarta. *SMART*. Vol 1 No 2.
- Sari, Dinna Nurmalita. Analisis Investment Opportunity Set (IOS) Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar di BEJ. *Skripsi FE. Universitas Lampung*. Lampung.
- Subekti, Imam dan Indra Wijaya Kusuma. 2001. Asosiasi antara Set Kesempatan. Investasi dengan Kebijakan Pendanaan dan Dividen Perusahaan serta Implikasinya pada Perubahan Harga Saham. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*. Vol 4. No 1.
- Sunariyah. 2003. *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal*. UMP AMP YKPN.
- Utami, Sih Widhi. 2007. Asosiasi antara Investment Opportunity Set (IOS) dengan kebijakan pendanaan, kebijakan dividen, dan Implikasinya Terhadap Perubahan Harga Saham. *Skripsi FE. Universitas Brawijaya. Malang*.
- Winarni, Yuli. 2003. Analisis Variabel-Variabel yang Mempengaruhi Earning Per Share Pada Perusahaan Tekstil di Bursa Efek Jakarta. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen*. Vol. 4, No. 1. April.
- Wijayanti, Ajeng 2006. Reaksi Pasar Modal Terhadap Potensi Pertumbuhan Perusahaan Publik di Indonesia. *Skripsi FE. Universitas Brawijaya. Malang*.
-----, www.jsx.co.id

Tabel 1. Penelitian Empiris Tentang IOS

No	Peneliti	Tahun Publikasi	Tujuan Penelitian	Hasil
1	Smith & Watts	1992	Untuk mengetahui asosiasi antara IOS dengan kebijakan pendanaan, deviden, dan kompensasi.	Perusahaan dengan peluang pertumbuhan yang lebih tinggi menggunakan hutang yang lebih kecil dengan struktur modalnya, membayar deviden lebih kecil dan membayar kompensasi eksekutif lebih besar daripada perusahaan tidak bertumbuh
2	Gaver & Gaver	1993	Untuk mengetahui level perusahaan dengan menggunakan gabungan ukuran IOS.	Perusahaan yang bertumbuh memiliki rasio debt to equity yang lebih rendah membayar kompensasi eksekutif yang lebih tinggi dari perusahaan yang tidak bertumbuh
3	Skinner	1993	Untuk mengetahui pengaruh IOS terhadap pilihan prosedur akuntansi dan kebijakan disclosure perusahaan.	Terdapat hubungan antara pilihan prosedur akuntansi perusahaan dengan IOS
4	Kallapur & Trombley	1999	Mengevaluasi berbagai proksi untuk IOS berdasarkan hubungan dengan pertumbuhan sesungguhnya (Realized Growth).	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Peluang investasi (IOS) rata-rata mengarah ke investasi aktual, oleh karena itu mempengaruhi pertumbuhan sesungguhnya dalam periode 3-5 tahun. ❖ Rasio book to market merupakan proksi yang valid untuk pertumbuhan.
5	Sami et al	1999	Memperluas penelitian Gaver & Gaver (1993).	IOS memiliki pengaruh yang besar dalam hal kebijakan pendanaan, kompensasi dan leasing.
6	Tettet Fijrijanti & Jogyanto Hartono	2000	Untuk mengetahui hubungan antara pokok IOS dengan realisasi pertumbuhan, kebijakan pendanaan, dan deviden.	Perusahaan bertumbuh membayar deviden lebih rendah, mengalokasikan dana untuk investasi lebih tinggi daripada perusahaan tidak bertumbuh.
7	Adi Prasetyo	2000	Melihat asosiasi antara IOS dengan kebijakan pendanaan, deviden, kompensasi, beta, dan perbedaan reaksi pasar.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Perusahaan bertumbuh mengalokasikan dana untuk investasi lebih besar, membayar deviden tidak lebih rendah, membayar kompensasi eksekutif tidak lebih besar dibandingkan dengan perusahaan tidak bertumbuh. ➤ Tidak terdapat korelasi yang signifikan antara beta sekuritas dengan IOS.

Sumber: Simposium Nasional Akuntansi 2000

Tabel 2. Daftar nama perusahaan sampel penelitian

NO	NAMA PERUSAHAAN
1	PT. INDOFOOD SUKSES MAKMUR
2	PT. DAVOMAS
3	PT. MAYORA INDAH
4	PT. AQUA GOLDEN MISSISSIPPI TBK
5	PT. DELTA DJAKARTA
6	PT. FAST FOOD INDONESIA
7	PT. SIANTAR TOP TBK.
8	PT. TUNAS BARU LAMPUNG
9	PT. GUDANG GARAM
10	PT. HM SAMPOERNA
11	PT. INDORAMA SYNTETICS
12	PT. SEPATU BATA
13	PT. PAN BROTHER TEX
14	PT. TIRTA MAHAKAM PLAY WOOD INDUSTRI
15	PT. FAJAR SURYA WISESA
16	PT. UNGGUL INDAH CAHAYA
17	PT. LAUTAN LUAS
18	PT. SORINI CORPORATION
19	PT. BUDI ACID JAYA
20	PT. COLORPAK INDONESIA
21	PT. EKADHARMA TAPE INDUSTRI
22	PT. TRIAS SENTOSA
23	PT. BERLINA
24	PT. KAGEO IGAR JAYA
25	PT. ARGHA KARYA PRIMA INDUSTRI
26	PT. INDOCEMENT TUNGGAL PERKASA
27	PT. SEMEN GRESIK
28	PT. CITRA TUBINDO
29	PT. LION METAL WORKS
30	PT. ALAKASA INDIRINDO
31	PT. TIRA AUSTENITE
32	PT. LION MESH PRIMA
33	PT. BETON JAYA MANUNGGAL
34	PT. JAYA PARI STEEL
35	PT. SURYA TOTO INDONESIA
36	PT. ARWANA CITRA MULIA
37	PT. ASTRA GRAPHIA
38	PT. METRODATA ELECTRONIC
39	PT. ASTRA INTERNASIONAL
40	PT. GAJAH TUNGGAL
41	PT. ASTRA OTOPARTS
42	PT. BRANTA MULIA
43	PT. TUNAS RIDEAN
44	PT. SELAMAT SEMPURNA
45	PT. HEXINDO ADI PERKASA
46	PT. INTRACO PENTA
47	PT. UNITED TRACTOR
48	PT. TEMPO SCAN PACIFIK
49	PT. KALBE FARMA
50	PT. KIMIA FARMA
51	PT. DARYA-VARIA LABORATORIUM
52	PT. MANDOM INDONESIA
53	PT. MUSTIKA RATU

Tabel 3. Nilai IOS Tahun 2004, 2005, 2006, dan rata-rata nilai IOS

No	Nama Emiten	2004	2005	2006	Rata-rata
1	PT. INDOFOOD SUKSES MAKMUR	1,78	1,99	2,59	2,12
2	PT. DAVOMAS	0,36	0,64	3,75	1,58
3	PT. MAYORA INDAH	0,51	0,73	0,63	0,62
4	PT. AQUA GOLDEN MISSISSIPPI TBK	1,06	0,70	1,28	1,01
5	PT. DELTA DJAKARTA	0,74	0,60	0,80	0,71
6	PT. FAST FOOD INDONESIA	0,66	1,42	0,83	0,97
7	PT. SIANTAR TOP TBK.	0,36	0,64	3,75	1,58
8	PT. TUNAS BARU LAMPUNG	2,14	1,71	1,49	1,78
9	PT. GUDANG GARAM	1,04	1,07	0,96	1,02
10	PT. HM SAMPOERNA	0,19	0,13	0,15	0,16
11	PT. INDORAMA SYNTETICS	0,19	0,13	0,15	0,16
12	PT. SEPATU BATA	1,04	1,07	0,96	1,02
13	PT. PAN BROTHER TEX	1,94	1,52	1,43	1,63
14	PT. TIRTA MAHAKAM PLAY WOOD IND	1,00	0,65	0,51	0,72
15	PT. FAJAR SURYA WISESA	2,21	2,31	2,43	2,31
16	PT. UNGGUL INDAH CAHAYA	0,90	0,92	0,94	0,92
17	PT. LAUTAN LUAS	0,63	0,75	0,62	0,67
18	PT. SORINI CORPORATION	0,48	0,62	0,60	0,57
19	PT. BUDI ACID JAYA	0,71	0,59	0,83	0,71
20	PT. COLORPAK INDONESIA	2,78	2,12	4,62	3,18
21	PT. EKADHARMA TAPE INDUSTRI	1,02	1,39	1,55	1,32
22	PT. TRIAS SENTOSA	0,60	0,44	0,42	0,49
23	PT. BERLINA	0,80	0,71	0,49	0,67
24	PT. KAGEO IGAR JAYA	0,69	0,65	0,56	0,63
25	PT. ARGHA KARYA PRIMA INDUSTRI	0,54	0,60	0,57	0,57
26	PT. INDOCEMENT TUNGGAL PERKASA	2,43	2,32	3,51	2,75
27	PT. SEMEN GRESIK	3,00	2,35	3,92	3,09
28	PT. CITRA TUBINDO	1,17	1,09	1,84	1,37
29	PT. LION METAL WORKS	0,73	0,77	0,76	0,76
30	PT. ALAKASA INDUSTRINDO	5,74	2,89	2,46	3,70
31	PT. TIRA AUSTENITE	1,45	1,19	1,22	1,28
32	PT. LION MESH PRIMA	0,84	0,86	0,69	0,80
33	PT. BETON JAYA MANUNGGAL	1,56	1,45	1,40	1,47
34	PT. JAYA PARI STEEL	1,04	0,73	1,33	1,03
35	PT. SURYA TOTO INDONESIA	2,05	1,38	1,16	1,53
36	PT. ARWANA CITRA MULIA	1,83	1,52	1,16	1,50
37	PT. ASTRA GRAPHIA	1,30	1,40	1,39	1,36
38	PT. METRODATA ELECTRONIC	0,73	0,57	0,62	0,64
39	PT. ASTRA INTERNASIONAL	2,36	2,02	2,84	2,41
40	PT. GAJAH TUNGGAL	1,22	0,87	0,86	0,99
41	PT. ASTRA OTOPARTS	1,06	1,32	1,21	1,20
42	PT. BRANTA MULIA	0,51	0,51	1,03	0,68
43	PT. TUNAS RIDEAN	1,59	1,42	1,47	1,49
44	PT. SELAMAT SEMPURNA	1,10	1,07	1,12	1,09
45	PT. HEXINDO ADI PERKASA	1,82	2,34	2,19	2,12
46	PT. INTRACO PENTA	0,67	0,32	0,67	0,55
47	PT. UNITED TRACTOR	2,09	2,55	4,07	2,90
48	PT. TEMPO SCAN PACIFIK	2,00	1,42	0,21	1,21
49	PT. KALBE FARMA	3,66	4,21	4,04	3,97
50	PT. KIMIA FARMA	1,40	0,95	1,05	1,13
51	PT. DARYA-VARIA LABORATORIUM	1,23	1,08	2,05	1,45
52	PT. MANDOM INDONESIA	1,57	1,39	2,07	1,68
53	PT. MUSTIKA RATU	0,71	0,45	0,52	0,56

Tabel 4. Hasil Perhitungan Rata-rata Realisasi Pertumbuhan

No	Nama Emiten	Aktiva	Ekuitas	Penjualan	Laba
1	PT. INDOFOOD SUKSES MAKMUR	0,018961	0,06548	0,073053	1,095355
2	PT. DAVOMAS	0,474011	0,183298	0,257045	0,388267
3	PT. MAYORA INDAH	0,067174	0,060378	0,213993	-0,06319
4	PT. AQUA GOLDEN MISSISSIPPI TBK	0,153192	0,185335	0,158552	0,199064
5	PT. DELTA DJAKARTA	0,132706	0,103063	0,102993	-0,02074
6	PT. FAST FOOD INDONESIA	0,200284	0,202928	0,171929	0,079787
7	PT. SIANTAR TOP TBK.	-0,02509	0,045157	-0,07262	0,269739
8	PT. TUNAS BARU LAMPUNG	0,124922	0,022188	0,277064	-0,11823
9	PT. GUDANG GARAM	0,081454	0,063396	0,04427	-0,45452
10	PT. HM SAMPOERNA	0,075593	0,009477	0,266006	-0,32952
11	PT. INDORAMA SYNTETICS	0,059022	0,034096	0,13431	-0,14582
12	PT. SEPATU BATA	0,06094	0,06334	0,017711	0,364576
13	PT. PAN BROTHER TEX	0,875458	0,179668	1,013137	-0,18168
14	PT. TIRTA MAHAKAM PLAY WOOD	0,084523	0,099708	0,278084	-0,16834
15	PT. FAJAR SURYA WISESA	0,094755	0,033349	0,120331	0,206386
16	PT. UNGGUL INDAH CAHAYA	0,07193	0,105631	0,120496	2,317675
17	PT. LAUTAN LUAS	0,142182	0,083613	0,246484	-0,08977
18	PT. SORINI CORPORATION	0,021607	0,109525	0,109379	5,262443
19	PT. BUDI ACID JAYA	0,002259	0,174304	0,205099	0,045573
20	PT. COLORPAK INDONESIA	0,313955	0,112206	0,761069	1,788319
21	PT. EKADHARMA TAPE INDUSTRI	0,073916	0,051666	0,113171	0,112911
22	PT. TRIAS SENTOSA	0,062731	0,007238	0,150617	2,53001
23	PT. BERLINA	0,177884	-0,00616	0,081168	0,20517
24	PT. KAGEO IGAR JAYA	0,075058	0,088723	0,044617	0,100348
25	PT. ARGHA KARYA PRIMA IND	0,025392	0,020252	0,151823	-0,2278
26	PT. INDOCEMENT TUNGGAL PERK	-0,01586	0,102585	0,150942	-0,23205
27	PT. SEMEN GRESIK	0,041589	0,164469	0,171466	-0,04584
28	PT. CITRA TUBINDO	0,371257	0,139618	0,644306	0,002403
29	PT. LION METAL WORKS	0,162043	0,131649	0,178083	1,449952
30	PT. ALAKASA INDISTRINDO	0,59861	1,11872	0,771013	0,511962
31	PT. TIRA AUSTENITE	-0,00079	0,031368	0,050951	2,05726
32	PT. LION MESH PRIMA	0,090476	0,231748	0,099926	0,256503
33	PT. BETON JAYA MANUNGGAL	0,136903	0,054077	0,57017	1,278094
34	PT. JAYA PARI STEEL	0,299326	0,332922	0,142513	1,176357
35	PT. SURYA TOTO INDONESIA	0,181545	0,303439	0,208553	0,53887
36	PT. ARWANA CITRA MULIA	0,245982	0,141347	0,221067	6,682783
37	PT. ASTRA GRAPHIA	-0,05127	-0,03503	-0,04046	1,267411
38	PT. METRODATA ELECTRONIC	0,185055	0,063592	0,205335	0,504734
39	PT. ASTRA INTERNASIONAL	0,287212	0,247399	0,231356	0,142241
40	PT. GAJAH TUNGGAL	0,162561	0,160019	0,183969	0,764884
41	PT. ASTRA OTOPARTS	-0,10893	0,175058	0,00999	0,416702
42	PT. BRANTA MULIA	0,000912	0,096208	0,080304	4,736401
43	PT. TUNAS RIDEAN	0,25473	0,132571	0,15577	-0,02923
44	PT. SELAMAT SEMPURNA	0,042821	0,085818	0,115935	0,11414
45	PT. HEXINDO ADI PERKASA	0,298484	0,196327	0,304787	-0,45564
46	PT. INTRACO PENTA	0,090661	0,448196	0,127148	0,181183
47	PT. UNITED TRACTOR	0,248777	0,508663	0,20725	-0,01683
48	PT. TEMPO SCAN PACIFIK	0,08475	0,076599	0,087449	0,115464
49	PT. KALBE FARMA	0,259184	0,561278	0,311872	0,207689
50	PT. KIMIA FARMA	-0,0223	0,049131	0,185265	0,918479
51	PT. DARYA-VARIA LAB	0,147821	0,148829	0,142229	0,683519
52	PT. MANDOM INDONESIA	0,203237	0,212928	0,146143	-0,05379
53	PT. MUSTIKA RATU	0,02103	0,041726	0,000845	0,314474

ANALISIS PENGARUH KARAKTERISTIK PERUSAHAAN, KUALITAS AUDITOR, PERGANTIAN AUDITOR, DAN INDEPENDENSI AUDITOR, TERHADAP INTEGRITAS LAPORAN KEUANGAN

Agrianti KSA³

ABSTRACT

Earnings management is a manager's choice to influence earnings number, both income-increasing and income-decreasing. This behavior may be done, because until now accounting standard gives choices for manager to choose the method which will be used. This research uses proxy of discretionary accruals (abnormal accruals) to detect earnings management on the period before and after the regulation implementation the audit committee in private enterprises. Researcher expects that empirical evidence from this research can give benefit for the government (as the owner of BUMN), investors and academics.

The result of this study that takes 20 government's enterprises (BUMN and 25 private enterprises). This evidence shows that managers were motivated to increase or decrease the earnings at the end of his incumbency. This result consistent with political cost hypothesis,. This might be caused by the difference of manager's behavior. On the government enterprise and private enterprises managers want to decrease the earnings (negative mean value) with the expectation that they can get the increasing trends on next periods. The Statistic test with regression failed to support hypothesis 1, 2, 3, 5, 6. However as expected the study provided support for the fourth hypothesis.

Key words : financial reporting integrity, company characteristic, auditor quality, auditor changes, and auditor independency.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pada 2004 Asia Pacific Fraud Convention. Deloitte Touche Tohmatsu melakukan polling terhadap 125 delegasi. Polling tersebut menunjukkan bahwa kebanyakan peserta (82%) menyatakan bahwa mereka mengalami peningkatan dalam corporate fraud dibandingkan dengan tahun sebelumnya (Tuanakotta, 2007). Khusus di Indonesia persepsi mengenai tingkat korupsi ditunjukkan dalam tabel berikut ini:

³ Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Lampung

Tabel 1. Corruption Perception Index Indonesia 2001-2005

Tahun	Ranking	Jumlah Negara yang disurvei	Score
2001	88	91	1,9
2002	96	102	1,9
2003	122	133	1,9
2004	137	146	2,0
2005	140	159	2,2

Sumber (Tuanakotta, 2007)

Dibandingkan dengan negara Asia lainnya Indonesia menduduki tingkat korupsi tertinggi dan rasio akuntan yang terendah. Jumlah akuntan yang banyak dari suatu Negara dapat mengurangi tingkat korupsi yang terjadi. Kimbro (2002) dalam Hubudi (2004) meneliti tentang korupsi, hasil penelitiannya menunjukkan semakin besar jumlah akuntan yang dimiliki oleh suatu Negara akan mengurangi tingkat korupsi.

Di Indonesia contoh kasus manipulasi keuangan menurut press release Bapepam adalah kasus Kimia Farma dan Lippo yang berawal dari dideteksinya manipulasi dalam laporan keuangan auditan. Salah satu penyebab adalah adanya pengakuan laba bersih yang overstated pada laporan keuangan untuk auditan tahun 2001. Peran akuntan independen sangat dipengaruhi oleh kualitas personal akuntan dan kantor akuntan publik. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi investor dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap akuntan adalah dengan mengeluarkan peraturan yang mengatur tentang pembentukan dewan komisaris independen dan komite audit pada tanggal 1 Juli 2001 Bursa Efek Jakarta.

Salah satu dampak dari manipulasi laporan keuangan terhadap tekanan profesi akuntan di Indonesia adalah dengan diberlakukannya beberapa surat edaran dan keputusan menteri keuangan yang terkait dengan perlindungan terhadap kepentingan investor KMK bernomor 423/KMK.06/2002 tentang jasa akuntan publik. Dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan tersebut adalah larangan bagi kantor akuntan yang sedang mengaudit suatu perusahaan publik untuk memberikan pelayanan lain dalam waktu yang bersamaan di perusahaan yang sama.

2. Masalah Penelitian

Isu yang diangkat dalam penelitian ini adalah melakukan investigasi terhadap pengaruh regulasi informasi perusahaan publik dan BUMN untuk menegakkan *good corporate governance* yang diukur dari kepatuhan mereka terhadap peraturan menteri keuangan dan peraturan Bapepam tentang pembentukan komite audit, pergantian auditor sehingga laporan keuangan auditan sebagai salah satu informasi yang dipergunakan investor dapat melindungi informasi agar tidak dimanipulasi oleh pihak manapun.

Berdasarkan uraian di atas maka masalah dalam penelitian ini adalah:

- p) Apakah perbedaan karakteristik perusahaan antara BUMN dan perusahaan mempublik berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan;
- q) Apakah adanya komite audit dapat mengurangi *earnings management*;
- r) Apakah adanya auditor yang berkualitas dapat mengurangi *earnings management*;
- s) Apakah adanya pergantian auditor dapat berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan;
- t) Apakah independensi auditor dapat berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menginvestigasi karakteristik perusahaan berupa peran komite audit, struktur kepemilikan perusahaan dan kualitas auditor eksternal dan Independensi auditor dalam meningkatkan integritas laporan keuangan.

B. KERANGKA PEMIKIRAN DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

1. Integritas Laporan Keuangan

Integritas laporan keuangan adalah sejauh mana laporan keuangan yang disajikan menunjukkan informasi yang benar dan jujur. Ukuran integritas laporan keuangan selama ini belum ada walaupun demikian secara intuitif dapat dibedakan menjadi konservatisme dan keberadaan manipulasi laporan keuangan yang biasanya dikukur dengan manajemen laba (Mayangsari, 2004). Beberapa peneliti menyatakan auditor lebih menyukai pelaporan yang konservatif Defond dan Subranyaman, 1998.

2. Karakteristik Perusahaan di Indonesia

BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Badan usaha milik negara adalah salah satu pilar ekonomi, karena beberapa BUMN berada dalam industri vital dan strategis sehingga peningkatan kinerja BUMN harus memberikan implikasi positif terhadap perekonomian Indonesia.

Karakteristik perusahaan publik bisa dilihat dari kepemilikan saham. Setelah perusahaan melakukan proses *go public* maka perusahaan bisa mendapatkan manfaat berkaitan dengan resiko bisnis perusahaan. Manfaat *go public* diantaranya adalah pemilik perusahaan akan membagi kepemilikan perusahaan kepada masyarakat yang berminat untuk membeli saham perusahaan tersebut, sehingga pemilik perusahaan dapat membagi risiko bisnis yang ditanggung apabila menjadi pemilik tunggal perusahaan.

3. Konsentrasi Kepemilikan Saham dalam Perspektif Teori Keagenan

Kualitas audit dipandang sebagai sistem kontrol yang kompleks yang mengurangi ketidakmampuan relatif kepemilikan yang tersebar untuk memonitor dan mengendalikan tindakan manajemen secara langsung. Sebaliknya, perusahaan dengan kepemilikan yang terkonsentrasi pada investor terbesar cenderung lebih mudah mengatur dan mengendalikan manajemen. Kontrol terhadap keputusan internal lebih mudah dilakukan oleh perusahaan dengan kepemilikan saham yang terkonsentrasi sehingga kualitas audit tidak begitu dibutuhkan seperti perusahaan dengan kepemilikan yang tersebar membutuhkan kualitas audit. Diduga bahwa konsentrasi kepemilikan saham oleh investor terbesar berhubungan secara negatif dengan integritas laporan keuangan. Berdasarkan hal ini maka diturunkan hipotesis sebagai berikut: Ha1: perusahaan publik dengan tingkat konsentrasi kepemilikan yang tinggi akan berpengaruh negatif terhadap integritas laporan keuangan.

4. Kepemilikan Saham Oleh Pihak Manajemen dalam Perspektif Teori Keagenan

Masalah keagenan bisa terjadi karena adanya asimetri informasi antara agen dan prinsipal. Akibat dari asimetri ini adalah agen mempunyai potensi untuk bertindak tidak sesuai dengan keinginan prinsipal. Oleh karena itu prinsipal tidak akan begitu saja mempercayai agen. Masalah keagenan berupa self interest behaviour akan terjadi bila terdapat proporsi kepemilikan manajemen atas saham perusahaan. Kepemilikan saham oleh manajemen mengakibatkan adanya ketidakseimbangan informasi, yaitu manajemen memiliki informasi yang tidak dimiliki pemegang saham. Masalah ini bisa diminimasi oleh perusahaan dan sebagai akibatnya perusahaan menanggung kos keagenan berupa biaya audit.

Ha2: Perusahaan publik dengan tingkat kepemilikan saham oleh pihak manajemen yang tinggi akan berpengaruh negatif terhadap integritas laporan keuangan.

5. Hubungan antara Komite Audit dan *Earnings Management*

Earnings management terjadi karena pemegang saham saat ini terlibat kontrak yang mahal dengan manajemen berdasarkan kondisi ketidakpastian dan informasi asimetri. Teori menunjukkan bahwa, dalam kondisi ekuilibrium, kontrak manajemen memungkinkan beberapa kebijakan atau fleksibilitas. Motivasi *earnings management* adalah komitmen untuk menyediakan informasi ke pasar modal yang dapat menciptakan konflik antara manajer dan investor (sekarang dan potensial). Konstrain utama atas *earnings management* adalah GAAP yang didukung oleh diperlukannya audit eksternal dan pemantauan internal. *Earnings management* merupakan biaya yang mahal bagi pemegang saham, maka pemantauan yang dilakukan oleh komite audit secara efektif akan menurunkan tingkat earnings management.

Ha3: Adanya komite audit akan berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat integritas laporan keuangan.

6. Kualitas Audit

Menurut Jensen dan Meckling (1976) kos keagenan meliputi biaya pembuatan kontrak (biaya transaksi, opportunity cost dan biaya insentif bagi manajemen), biaya monitoring (audit) dan kerugian yang ditanggung pemilik akibat penyimpangan tindakan yang lolos dari monitoring. DeAngelo (1981) dalam Manao (2002) dan Khrisnan (2002) mendefinisikan kualitas audit sebagai probabilitas auditor menemukan dan melaporkan kesalahan dan ketidakberesan. Penelitian Noviyani (2002) menunjukkan bahwa pengalaman berpengaruh positif terhadap pengetahuan auditor tentang jenis-jenis kekeliruan yang berbeda. Penelitian ini menggunakan asumsi semakin banyak jumlah perusahaan dalam suatu industri yang menjadi klien jasa audit suatu KAP maka tingkat spesialisasi industri KAP semakin tinggi sehingga kualitas audit KAP semakin tinggi sehingga dapat mendeteksi adanya manipulasi laporan keuangan. Ha4: perusahaan publik dengan tingkat kualitas auditor spesialisasi berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan.

7. Pergantian Auditor

Auditor berperan penting dalam memonitor kontrak antara agen dan prinsipal. Auditor bertugas melaporkan pelanggaran kontrak yang dilakukan oleh agen. Dengan demikian auditor independen diharapkan memberikan pandangan yang obyektif sehingga bisa diterima oleh semua pihak yang berkepentingan. Analisis data harian pada penelitian Mark, 1994 menyatakan bahwa terdapat reaksi negatif terhadap pengunduran diri auditor pada tanggal surat pengunduran diri, walaupun sangat sedikit auditor mengindikasikan adanya permasalahan yang harus disadari oleh pemegang saham dan kreditor. Hal ini mengindikasikan bahwa audit akan mengambil tindakan pengunduran diri dari tugasnya dikarenakan ada bad news dalam laporan keuangan sehingga hipotesis yang diangkat adalah: Ha5: Pergantian Auditor berpengaruh negatif terhadap tingkat integritas laporan keuangan.

8. Independensi Auditor

Independensi akuntan dimonitor oleh dewan direksi dan komite audit yang harus ikut aktif dari mulai penunjukkan sampai dengan selesainya tugas. Auditor hanya menilai dari yang diungkapkan oleh pihak manajemen. Seberapa jauh manajemen akan mengungkap hal itu yang menjadi titik kritis pengaturan pergantian auditor oleh Bapepam, juga ruang lingkup audit yang dilakukan akan memiliki efek yang sangat kecil pada kualitas transparan dalam berkomunikasi dengan akuntan independent. Berdasarkan hal ini maka hipotesis yang diajukan adalah: Ha6 : Penugasan selain tugas sebagai auditor berpengaruh negatif terhadap integritas laporan keuangan.

C. METODA PENELITIAN

1. Sampel dan Data

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan BUMN yang mengeluarkan laporan keuangan tahun 1999-2006. Perusahaan finansial tidak dimasukkan dalam sampel, karena perbedaan karakteristik pos-pos keuangannya.

2. Variabel Dependen

Integritas Laporan Keuangan

Proksi yang sering digunakan dalam penelitian-penelitian sebelumnya untuk mendeteksi manajemen laba adalah dengan *discretionary accruals* (abnormal accruals). Studi ini juga menggunakan discretionary accruals untuk mendeteksi manajemen laba yang dilakukan pada perioda sebelum dan setelah penerapan regulasi good corporate governance (GCG). Model Jones menghubungkan total akrual dengan perubahan penjualan dan ativa tetap. Residu dari regresi yang dilakukan akan menghasilkan angka yang dianggap sebagai discretionary accruals. Model Jones digambarkan dalam persamaan berikut:

$$AT = \alpha_1 + \alpha_2 \Delta \text{Sales}_{it} + \alpha_3 \text{PPE}_{it} + \epsilon_{it}$$

Keterangan:

AT	= Accruals Total
ΔSales_{it}	= Perubahan saldo penjualan pada perioda t
PPE_{it}	= Saldo akun aktiva tetap pada perioda t
ϵ_{it}	= error term

Model yang dipergunakan adalah sebagai berikut (Kin, 2006):

$$AT_{it} = \alpha_1 + \alpha_2 (\Delta \text{Sales}_{it} - \Delta \text{Recv}_{it-}) + \alpha_3 \text{PPE}_{it} + \alpha_4 \text{CaFlit}_{it} + \epsilon_{it}$$

Keterangan:

AT	= Accruals Total
ΔSales_{it}	= Perubahan saldo penjualan pada perioda t
ΔRecv_{it}	= Perubahan saldo piutang pada perioda t
PPE_{it}	= Saldo akun aktiva tetap pada perioda t
CaFlit	= Arus kas pada perioda t
ϵ_{it}	= error term

Semua variabel akan dibagi dengan jumlah total aktiva awal periode untuk menghindari terjadi heterokesdatisitas. Selanjutnya discretionary accrual dihitung dengan

$$\text{DAC} = \text{AT}/\text{TA-1} - \text{NDTAC}$$

Keterangan :

DAC	=	Discretionary accruals
AT	=	Accruals total
TA-1	=	total aktiva awal periode
NDTAC	=	non discretionary accruals

3. Variabel Independen

Kepemilikan saham dikatakan terkonsentrasi apabila pemegang saham tunggal terbesar memiliki lebih dari 50 persen saham suatu perusahaan. Jadi, variabel konsentrasi kepemilikan diberi kode 1 (satu) apabila pemilik terbesar memiliki 50 persen atau lebih saham beredar dan kode 0 (nol) jika individu terbesar menguasai kurang dari 50 persen saham. Pengukuran kepemilikan manajemen diukur dengan ada tidaknya saham yang dimiliki oleh pihak manajemen dengan persentase yang lebih dari 2%. Komite audit Variabel ini diukur dengan menggunakan variabel dummy 1 jika perusahaan memiliki dan 0 jika sebaliknya. Kualitas audit, auditor spesialis industri dijadikan proksi untuk mengukur tingkat kualitas audit yang lebih tinggi dan auditor non spesialis industri mewakili tingkat kualitas audit yang lebih rendah. Auditor spesialis industri diberi simbol 1 (satu) dan auditor non spesialis industri diberi simbol 0 (nol). Pergantian auditor diproksikan dengan variabel dummy 1 jika ada pergantian dan 0 jika tidak terjadi pergantian auditor. Independensi Auditor auditor diproksikan dengan variabel dummy 1 jika ada penerimaan penugasan pada KAP di tahun penugasan selain sebagai auditor dan 0 jika tidak terjadi penugasan lain.

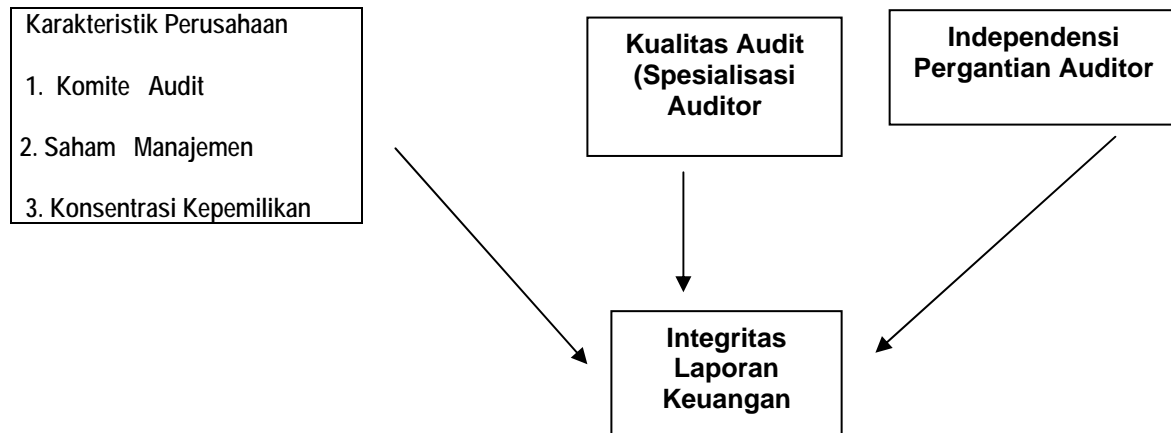
4. Pengujian Hipotesis dan Model Penelitian

Pengujian hipotesis:

Pengujian beda untuk mengetahui perbedaan karakteristik antara BUMN dan perusahaan mempublik dilakukan dengan menggunakan t test selain itu dilakukan juga uji beda untuk mengetahui perbedaan antara perusahaan mempublik dan BUMN sebelum dan sesudah menerapkan regulasi informasi menggunakan paired test.

5. Model Penelitian

Model Penelitian



D. PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

1. Sampel Penelitian

Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdapat di BEJ dan BUMN yang telah mempublikasi laporan tahunannya. Seleksi sampel menggunakan purposive sampling sehingga diperoleh 20 BUMN dan 25 perusahaan publik dari 1999 - 2006 dengan 231 sampel perusahaan amatan.

2. Statistik Deskriptif

Proses pengujian hipotesis dimulai dengan penentuan nilai nilai total akrual. Nilai total akrual ini dijadikan variabel dependen kemudian dilakukan regresi untuk menentukan nilai estimasi nondiscretionary accruals.

Dari 231 sampel perusahaan publik rata-rata perusahaan yang tidak melakukan earnings management sebanyak 12 perusahaan, 117 perusahaan mempunyai nilai discretionary accrual (DAC) negatif dan 102 perusahaan mempunyai DAC positif. Nilai DAC negatif mengindikasikan adanya decreasing Nilai rata-rata discretionary accrual sebesar -0,45 dengan standar deviasi sebesar 0,32 sehingga dapat disimpulkan perusahaan publik dan BUMN pada sampel penelitian ini diindikasikan akan menurunkan labanya untuk menghindari political cost karena banyak perusahaan publik yang mempunyai laba tinggi.

Hasil uji t test untuk mengetahui perbedaan karakteristik BUMN dan perusahaan publik menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan pada variabel kepemilikan

manajemen, konsentrasi kepemilikan, independensi dan tingkat kepatuhan terhadap regulasi GCG. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya DAC antara BUMN dan perusahaan publik tidak mempunyai perbedaan yang signifikan. Sedangkan hasil uji t test untuk variabel DAC antara perusahaan yang telah menerapkan GCG dan yang belum menerapkan GCG dari jumlah tahun amatan 1999-2006 dengan tahun pembeda 2002 tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan sehingga ada indikasi bahwa, ada atau tidaknya regulasi GCG terhadap BUMN dan perusahaan publik hal ini tidak dapat mempengaruhi adanya earnings management..

3. Uji Asumsi Klasik

Uji Multikolinieritas, hasil pengujian menunjukkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas yang ditunjukkan oleh nilai VIF dari semua variabel independen yang <10 . Uji Heterokedastisitas, hasil pengujian dengan scatterplot menunjukkan pola menyebar. Uji Autokorelasi, nilai DW pengujian statistik senilai 1,56 hal ini menunjukkan tidak terdapat autokorelasi pada model. Uji Normalitas, hasil pengujian menunjukkan gambar histogram yang menggambarkan distribusi normal sehingga terbukti bahwa model yang dipergunakan memenuhi uji normalitas.

4. Pengujian hipotesis dan Diskusi Hasil Pengujian

Hipotesis pertama perusahaan publik dengan tingkat konsentrasi kepemilikan yang tinggi akan berpengaruh negatif terhadap integritas laporan keuangan. Hasil pengujian menunjukkan konsentrasi kepemilikan yang tinggi akan mengurangi integritas laporan keuangan tetapi besarnya pengaruh dari konsentrasi kepemilikan terhadap integritas laporan keuangan secara statistik tidak signifikan sehingga hipotesis pertama ditolak. Hipotesis kedua perusahaan publik dengan tingkat kepemilikan saham oleh pihak manajemen yang tinggi akan berpengaruh negatif terhadap integritas laporan keuangan secara statistik tidak berhasil diterima. Hasil pengujian membuktikan bahwa kepemilikan saham oleh pihak manajemen mempunyai korelasi negatif terhadap integritas laporan keuangan. Penelitian ini searah dengan penelitian yang dilakukan oleh Peasnell (2000) bahwa terdapat korelasi negatif antara kepemilikan institusional dengan *discretionary accrual*.

Hipotesis ketiga adanya komite audit akan berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat integritas laporan keuangan ditolak karena p value >0.05 , tetapi hasil pengujian ini membuktikan bahwa adanya komite audit berkorelasi positif dengan tingginya integritas laporan keuangan. Penelitian ini searah dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa puncak sistem governance internal pada perusahaan besar, sehingga dewan direksi mempunyai peran dalam pemantauan. Hipotesis keempat berhasil diterima sehingga perusahaan publik dengan tingkat kualitas auditor spesialisasi berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan. Hasil penelitian ini mendukung penelitian DeAngelo (1981) dalam Manao (2002) dan Khrisnan (2002) mendefinisikan kualitas audit sebagai probabilitas auditor menemukan dan melaporkan kesalahan dan ketidakberesan. Bagaimanapun juga

kualitas audit sulit diamati dengan demikian pemakai jasa audit harus mengevaluasi kualitas audit dengan menggunakan ukuran pengganti. Salah satu ukuran pengganti yang membantu mengindikasikan kualitas audit adalah spesialisasi industri auditor. Craswell et al (1995) dalam Mayangsari (2002) menyatakan bahwa kualitas audit kantor akuntan terbentuk sejalan dengan pengembangan keahlian spesifik industri. Penelitian Noviyani (2002) menunjukkan bahwa pengalaman berpengaruh positif terhadap pengetahuan auditor tentang jenis-jenis kekeliruan yang berbeda. Krishnan (2002) yang menyatakan secara statistik ada perbedaan akrual antara klien KAP (big five) dan yang bukan big five.

Hipotesis kelima pergantian Auditor berpengaruh negatif terhadap tingkat integritas laporan keuangan berdasarkan pengujian statistik hipotesis ini tidak berhasil diterima. Hasil pengujian statistik juga menunjukkan bahwa terdapat korelasi negatif antara pengunduran diri auditor terhadap integritas laporan keuangan. Arah pengujian ini searah dengan penelitian yang dilakukan oleh Mark Klock tentang reaksi pasar saham terhadap pergantian akuntan publik dengan menggunakan event-time methodology dan menguji faktor-faktor potensial yang mempengaruhi reaksi pasar tersebut. Hipotesis keenam penugasan selain tugas sebagai auditor berpengaruh negatif terhadap integritas laporan keuangan tidak berhasil diterima. Independensi akuntan dimonitor oleh dewan direksi dan komite audit yang harus ikut aktif dari mulai penunjukkan sampai dengan selesainya tugas. Regulasi yang kuat oleh Bapepam pada tahun 2002 dengan mengeluarkan KMK 423 diduga mengakibatkan hal yang dihipotesiskan tidak terbukti.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Isu yang diangkat dalam penelitian ini adalah melakukan investigasi terhadap pengaruh regulasi informasi perusahaan publik dan BUMN untuk menegakkan good corporate governance yang diukur dari kepatuhan mereka terhadap peraturan menteri keuangan dan peraturan Bapepam tentang pembentukan komite audit, pergantian auditor sehingga laporan keuangan auditan sebagai salah satu informasi yang dipergunakan investor dalam pengambilan dapat melindungi informasi agar tidak dimanipulasi oleh pihak manapun. Tujuan penelitian ini adalah untuk menginvestigasi karakteristik perusahaan berupa peran komite audit, struktur kepemilikan perusahaan dan kualitas auditor eksternal dan Independensi auditor dalam meningkatkan integritas laporan keuangan.

1. Kesimpulan

Dari hasil pengujian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a) Tidak terdapat perbedaan karakteristik perusahaan antara BUMN dan perusahaan mempublik terhadap integritas laporan keuangan. Tetapi terdapat korelasi antara karakteristik perusahaan dengan tingkat integritas laporan keuangan;

- b) Adanya komite audit secara statistik tidak dapat mempengaruhi tinggi rendahnya earnings management tetapi ada korelasi yang menunjukkan bahwa adanya komite audit maka tingkat integritas laporan keuangan juga tinggi;
- c) Perusahaan yang merupakan klien auditor yang berkualitas ternyata dapat mengurangi earnings management hal ini terbukti dari hasil pengujian yang dilakukan;
- d) Adanya pergantian auditor ternyata tidak mempunyai berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan. Tetapi terdapat korelasi negatif antara terjadinya pergantian auditor dengan integritas laporan keuangan;
- e) Independensi auditor tidak mempunyai pengaruh terhadap integritas laporan keuangan tetapi hasil pengujian membuktikan adanya korelasi negatif antara independensi auditor dengan integritas laporan keuangan.

2. Saran

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian, maka manajemen laba selama tidak melanggar prinsip akuntansi yang berterima umum dapat ditujukan untuk meningkatkan laba atau menurunkan laba. Hal ini membuka peluang bagi manajer untuk meningkatkan kemakmurannya. Secara statistik discretionary accruals perusahaan yang telah membentuk dan melaksanakan komite audit tidak mempunyai perbedaan. Hal ini oleh keberadaan komite audit yang secara struktural tidak independen diindikasikan menjadi penyebabnya, sehingga disarankan kepada regulator (Bapepam dan Menteri BUMN) agar secara struktur organisasi mereka menjadi lebih independen.

3. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini tidak dapat mendukung keseluruhan hipotesis. Hal ini dimungkinkan adanya kekurangan dalam penelitian ini. Pertama, jumlah data yang digunakan. Kedua pendekatan yang dilakukan hanya merupakan proksi yang menggunakan pengukuran ordinal sehingga bagi dunia akademisi diharapkan mengembangkan metoda pendeteksian manajemen laba yang lebih powerful dari yang telah dikenal selama ini.

4. Implikasi Penelitian

Bagi pemerintah ataupun investor, penelitian ini bisa menunjukkan bahwa dalam mengambil keputusan perlu melakukan analisis terlebih dahulu terhadap laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan ternyata memang rentan terhadap kebijakan yang diambil manajer. Faktor regulasi dari pemerintah secara keseluruhan juga dimungkinkan mempengaruhi hasil penelitian, karena perioda pengamatan yang diteliti berada dalam masa penerapan awal good corporate governance. Saran untuk penelitian lebih lanjut dapat dikembangkan dengan pengambilan sampel yang lebih

besar dan berasal dari beberapa jenis industri. Penggunaan beberapa jenis industri dapat menguatkan hasil penelitian sekaligus dapat menganalisis apakah terdapat perbedaan perilaku manajemen laba pada industri yang berbeda. Selain itu juga agar digunakan tahun yang lebih panjang, sehingga dapat memberikan hasil yang lebih akurat..

DAFTAR PUSTAKA

- Hubudi, Media Akuntansi, Oktober 2004.
- Jones, JJ., 1991, Earnings Management during Important Relief Investigation, *Journal of Accounting Research* 29.
- Kin, Wai Lee, Baruch Lev, dan Gillian Yeo, 2006, Organizational Structure and Earnings Management, *Journal of Accounting and Auditing & Finance*.
- Manao, Hekinus., 2002, An Audit Quality Comparison Between Large and Small CPA Firms in Indonesia in the Context of “Going Concern” Opinion: Evidence Based on Auditees’ Financial Ratios. SNA V, Semarang.
- Mark, Clock, 1994, ”The Stock Market Reaction to in a Change in Certifying Accountant” *Journal of Accounting, Auditing & Finance*.
- Mayangsari, Sekar, 2002., Bukti Empiris Pengaruh Spesialisasi Industri Auditor terhadap Earnings per Share, Makalah SNA V, Semarang.
- Mayangsari, Sekar, 2003., Analisis Pengaruh Independensi, Kualitas Audit, Serta Mekanisme Corporate Governance terhadap Integritas Laporan Keuangan. Makalah SNA VI, Surabaya.
- Noviyani, Putri dan Bandi, 2002, Pengaruh Pengalaman dan Pelatihan terhadap Struktur Pengetahuan Auditor tentang Kekeliruan, Makalah Simposium Nasional Akuntansi V, Semarang.
- Peasnell, K.V., Pope, P.F., dan Young, S., 2000. Board Monitoring and Earnings Management: Do Outside Directors Influence Abnormal Accruals?. Working Paper.
- Singgih, Santoso, 2006, *Buku Latihan SPSS, Parametrik*, Elex Media Komputindo.

ANALISIS HUBUNGAN ANTARA KARAKTERISTIK DAN KUALITAS PENGUNGKAPAN PADA LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN DI INDONESIA

Farichah⁴

ABSTRACT

This research examined influence of six independent variables of a firm characteristic's to dependent variable that is level of disclosure (mandatory and voluntary disclosure) quality in firm annual reports in Indonesia. The extent of disclosures in firm annual report are measured by disclosure index, there are 35 information items must be and can be disclosed in annual report. The six independent variable are level of liquidity (that is measured by current ratio), level of solvability (that is measured by leverage ratio), level of rentability (that is measure by ROI), firm size (that is measure by firm total assets), group of industry (that is classified into manufacture and non-manufacture), and firm status (that is classified into PMA and PMDN). There are eighty companies listed in JSX on 2004 were selected for firm samples in this study. The problem are indentificate whether and how the firm characteristic above influence the level of disclosure quality in annual report.

This study uses multiple regression, F – Test, and NPar – Test to examine the study hypothesis. The empirical test showed; independent variables can be used as predictors on disclosure quality. The second result showed that the independent variables just explain 42.5% (is mean there are other variables influence dependent variable). The third result showed there are two variables (group of industry and firm status) can be proven have positive and significant correlation with annual report disclosure quality. The next result showed there is significant difference (sig 0.019) on level disclosure quality between groups of firm status.

Key words: mandatory, voluntary, full disclosure, and annual report

A. PENDAHULUAN

Tujuan utama pengungkapan informasi pada laporan keuangan adalah untuk memberikan bantuan kepada investor, kreditur dan pengguna laporan keuangan lainnya dalam memahami resiko portofolio investasi sebagai dasar untuk melakukan keputusan ekonomi yang rasional. Oleh karenanya laporan keuangan haruslah memuat pengungkapan informasi yang cukup (*full disclosure*).

⁴ Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Lampung

Pengungkapan informasi pada laporan keuangan dikelompokkan ke dalam pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) dan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*). Pengungkapan wajib adalah pengungkapan yang diharuskan oleh peraturan atau ketentuan seperti yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal, Departemen Keuangan Republik Indonesia atau oleh organisasi profesi akuntansi (Ikatan Akuntan Indonesia) dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Sedangkan pengungkapan sukarela adalah pengungkapan tambahan yang melebihi dari pengungkapan yang diwajibkan.

Pada penelitian terdahulu, pengungkapan yang dilakukan oleh masing-masing perusahaan berbeda satu dengan lainnya, tergantung pada faktor-faktor tertentu yang mempengaruhi kelengkapan pengungkapan yang dilakukan. Faktor-faktor yang berpengaruh antara lain adalah a). tingkat likuiditas perusahaan (Cooke,1998), b). tingkat solvabilitas perusahaan (Meek, Roberts, dan Gray, 1995), c). tingkat rentabilitas perusahaan, d). ukuran perusahaan (Suripto, 1998), e). jenis industri (Suripto, 1998), dan f). status perusahaan (Susanto,1992).

B. PERUMUSAN MASALAH

Permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

- a) Bagaimana kualitas pengungkapan informasi pada laporan keuangan perusahaan di Indonesia.
- b) Apakah tingkat likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, ukuran perusahaan, jenis industri, dan status perusahaan mempengaruhi kualitas pengungkapan pada laporan keuangan.
- c) Apakah ada perbedaan yang signifikan praktek pengungkapan pada laporan keuangan perusahaan di Indonesia.

C. METODE PENELITIAN

Model yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = f (X_1, X_2 \dots , X_6)$$

Y adalah variabel dependen dan X1 sampai X6 merupakan variabel independen. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda, F – Test, dan NPar – Test. Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini, dinyatakan sebagai berikut :

$$Y = \beta_0 + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \beta_4X_4 + \beta_5X_5 + \beta_6X_6 + e$$

dengan keterangan :

- Y = indek skor pengungkapan
X1 = tingkat likuiditas (current ratio)

X2	= tingkat solvabilitas (leverage ratio)
X3	= tingkat rentabilitas (ROI)
X4	= total assets
X5	= dummy jenis industri (manufaktur/non-manufaktur)
X6	= dummy status perusahaan (PMA/PMDN)
β	= konstanta atau parameter
e	= error

Hipotesis Penelitian

Hipotesis Nol (H0) penelitian dirumuskan bahwa (1). tingkat likuiditas, tingkat solvabilitas, tingkat rentabilitas, ukuran perusahaan, jenis industri, dan status perusahaan tidak mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kelengkapan pengungkapan informasi pada laporan keuangan, (2). tidak terdapat perbedaan tingkat kelengkapan pengungkapan informasi antara masing-masing ukuran perusahaan, jenis industri dan status perusahaan. Dengan demikian hipotesis alternatif penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

- Ha₁: Tingkat likuiditas mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kelengkapan pengungkapan informasi pada laporan keuangan.
- Ha₂: Tingkat solvabilitas mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kelengkapan pengungkapan informasi pada laporan keuangan.
- Ha₃: Tingkat rentabilitas mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kelengkapan pengungkapan informasi pada laporan keuangan.
- Ha₄: Ukuran perusahaan mempunyai hubungan positif dan signifikan dengan tingkat kelengkapan pengungkapan informasi pada laporan keuangan.
- Ha₅: Terdapat perbedaan tingkat kelengkapan pengungkapan informasi antara masing-masing ukuran perusahaan.
- Ha₆: Jenis industri mempunyai hubungan positif dan signifikan dengan tingkat kelengkapan pengungkapan informasi pada laporan keuangan.
- Ha₇: Terdapat perbedaan tingkat kelengkapan pengungkapan informasi antara masing-masing jenis industri.
- Ha₈: Status perusahaan mempunyai hubungan positif dan signifikan dengan tingkat kelengkapan pengungkapan informasi pada laporan keuangan.
- Ha₉: Terdapat perbedaan tingkat kelengkapan pengungkapan informasi antara masing-masing status perusahaan.

Sampel Penelitian

Populasi penelitian meliputi semua perusahaan yang sahamnya terdaftar di Bursa Efek Jakarta pada tahun 2004. Untuk menjamin bahwa variabel-variabel yang akan diuji dalam penelitian ini terwakili maka sampel dipilih dengan metode *proportionate stratified sampling*. Dengan metode tersebut populasi dikelompokkan menurut urutan variabel-variabel *dummy*. Dari masing-masing kelompok tersebut kemudian ditentukan sejumlah sampel secara proporsional dan dipilih secara random. Berdasarkan tingkat keyakinan 95%, jumlah sampel ditentukan sebanyak 115 buah perusahaan. Setelah dihitung jumlah sampel melampaui 5% dari populasi yang berjumlah 333 perusahaan. Oleh karena itu penulis perlu melakukan koreksi. Setelah koreksi atas jumlah sampel dilakukan jumlah sampel menjadi 80 buah perusahaan atau sebanyak 24 % dari populasi.

Variabel-variabel Penelitian

Literatur empirik dan teoritik menunjukkan bahwa terdapat beberapa variabel yang mungkin menjelaskan variasi luas pengungkapan dalam laporan tahunan. Bagian ini akan membahas variabel-variabel yang diuji dalam penelitian ini. Variabel-variabel tersebut meliputi tingkat likuiditas, tingkat solvabilitas, tingkat rentabilitas, ukuran perusahaan, jenis industri, dan status perusahaan.

Pengukuran Variabel Independen

Penelitian ini menggunakan regresi berganda dengan enam variabel independen. Pengukuran masing-masing variabel diuraikan berikut ini;

Tingkat Likuiditas

Penelitian ini menggunakan variabel likuiditas sebagai salah satu variabel independen. Variabel likuiditas diukur berdasarkan ratio likuiditas yang dihitung berdasarkan perbandingan aktiva lancar dengan hutang lancar. Data ratio likuiditas diperoleh dari Capital Market Directory 2004.

Tingkat Solvabilitas

Dalam penelitian ini, ratio solvabilitas diukur dengan tingkat leverage. Data mengenai tingkat leverage diperoleh dari Capital Market Directory 2004.

Tingkat Rentabilitas

Ratio rentabilitas dimasukkan sebagai salah satu variabel independen yang diukur dengan laba sebelum dikurang dengan beban bunga dan pajak dibagi dengan total aktiva (ROI). Data mengenai tingkat rentabilitas diperoleh dari Capital Market Directory 2004.

Ukuran Perusahaan

Variabel ukuran perusahaan dapat diukur dengan total aktiva, penjualan tahunan dan jumlah pemegang saham. Dalam penelitian ini, variabel ukuran perusahaan diukur dengan menggunakan total aktiva. Data mengenai total aktiva diperoleh dari Capital Market Directory 2004.

Jenis Industri

Dalam penelitian ini, untuk mengidentifikasi kelompok industri digunakan dummy: 1 untuk perusahaan manufaktur dan 0 untuk perusahaan non-manufaktur. Data mengenai kelompok industri diperoleh dari Capital Market Directory 2004.

Status Perusahaan

Dalam penelitian ini, variable dummy 0, dan 1 digunakan untuk menunjukkan status perusahaan: 1 untuk perusahaan berbasis asing (PMA) dan 0 untuk perusahaan berbasis domestik (PMDN). Data mengenai status perusahaan diperoleh dari Capital Market Directory 2004.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil pengolahan data yang dilakukan seperti tampak dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1 : Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
DISCLOSU	24.99	5.283	80
CURRENT	1.7304	1.32206	80
LEVERAGE	.6391	.43777	80
ROI	3.2949	7.14872	80
ASSETS	1.2499	1.81110	80
JENIS_IN	.66	.476	80
STATUS_P	.33	.471	80

Tabel 2 : Model Summary(b)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.652 (a)	.425	.378	4.167	1.596

a Predictors: (Constant), STATUS_P, ASSETS, ROI, LEVERAGE, JENIS_IN, CURRENT

b Dependent Variable: DISCLOSU

Tabel 3 : ANOVA(b)

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	937.555	6	156.259	9.000	.000(a)
	Residual	1267.433	73	17.362		
	Total	2204.987	79			

a Predictors: (Constant), STATUS_P, ASSETS, ROI, LEVERAGE, JENIS_IN, CURRENT

b Dependent Variable: DISCLOSU

Tabel 4 : Coefficients(a)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	21.824	1.647		13.253	.000
	CURRENT	-.336	.433	-.084	-.776	.440
	LEVERAGE	1.431	1.275	.119	1.122	.265
	ROI	-.101	.067	-.137	-1.499	.138
	ASSETS	.094	.263	.032	.359	.721
	JENIS_IN	1.000	1.055	.090	.948	.346
	STATUS_P	7.331	1.126	.654	6.512	.000

a Dependent Variable: DISCLOSU

Hasil pengolahan data dengan regresi linier berganda (Tabel 4) menyebutkan bahwa status perusahaan (yang digolongkan ke dalam kelompok PMA dan PMDN) menunjukkan angka yang signifikan sebesar 0.000. Hasil ini berarti bahwa status perusahaan mempunyai pengaruh yang cukup terhadap kelengkapan pengungkapan. Variabel independen lainnya seperti Current Ratio, Leverage Ratio, ROI, Total Assets, dan Jenis Industri, tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kelengkapan pengungkapan.

Sedangkan nilai R (Tabel 2) sebesar 0.652 dan R² sebesar 0.425. Hal ini berarti bahwa variabel independen yaitu Current Ratio, Leverage Ratio, ROI, Total Assets, dan Dummy Jenis Industri, serta Dummy Status Perusahaan hanya mampu menjelaskan sebesar 42,5% selebihnya terdapat variabel lain yang tidak dicakup dalam penelitian yang mempengaruhi kelengkapan pengungkapan.

Dari tabel pengolahan ANOVA, signifikansinya adalah 0.000. Hal ini berarti bahwa variabel independen yaitu Current Ratio, Leverage Ratio, ROI, Total Assets, dan Dummy Jenis Industri, serta Dummy Status Perusahaan dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen (kelengkapan pengungkapan). Dari tabel correlations diperoleh hasil bahwa dua variabel yaitu jenis industri dan status perusahaan terbukti mempunyai hubungan positif dan signifikan dengan tingkat kelengkapan pengungkapan informasi pada laporan keuangan. Hasil pengujian

berikutnya memperlihatkan bahwa terdapat perbedaan tingkat kelengkapan pengungkapan yang signifikan (pada tingkat signifikansi 0,019) antara kelompok status perusahaan (PMA dan PMDN).

D. HASIL PENGUJIAN HIPOTESIS

Hipotesis pertama penelitian ini adalah tingkat likuiditas mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kelengkapan pengungkapan informasi pada laporan keuangan. Pengujian yang dilakukan terhadap hipotesis pertama tersebut dapat dilihat pada hasil analisis regresi yang menyimpulkan tingkat signifikansi pengujian *current ratio* sebesar 0.440 (> 0.05). Hal ini berarti bahwa hipotesis pertama tersebut tidak berhasil ditolak. Sehingga hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tingkat likuiditas tidak mempunyai pengaruh (positif) dan signifikan terhadap tingkat kelengkapan pengungkapan informasi pada laporan keuangan

Hipotesis kedua penelitian ini adalah tingkat solvabilitas mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kelengkapan pengungkapan informasi pada laporan keuangan. Pengujian yang dilakukan terhadap hipotesis kedua tersebut dapat dilihat pada hasil analisis regresi yang menyimpulkan tingkat signifikansi pengujian terhadap *leverage ratio* sebesar 0.265 (> 0.05). Hal ini berarti bahwa hipotesis kedua tersebut tidak berhasil ditolak. Sehingga hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tingkat solvabilitas tidak mempunyai pengaruh (positif) dan signifikan terhadap tingkat kelengkapan pengungkapan informasi pada laporan keuangan

Hipotesis ketiga penelitian ini adalah tingkat rentabilitas mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kelengkapan pengungkapan informasi pada laporan keuangan. Pengujian yang dilakukan terhadap hipotesis ketiga tersebut dapat dilihat pada hasil analisis regresi yang menyimpulkan tingkat signifikansi pengujian terhadap *return on investment (ROI)* sebesar 0.138 (> 0.05). Hal ini berarti bahwa hipotesis ketiga tersebut tidak berhasil ditolak. Sehingga hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tingkat rentabilitas tidak mempunyai pengaruh (positif) dan signifikan terhadap tingkat kelengkapan pengungkapan informasi pada laporan keuangan

Hipotesis keempat penelitian ini adalah ukuran perusahaan mempunyai hubungan positif dan signifikan dengan tingkat kelengkapan pengungkapan informasi pada laporan keuangan. Pengujian yang dilakukan terhadap hipotesis keempat tersebut dapat dilihat pada hasil analisis regresi (*tabel correlations*) yang menyimpulkan tingkat signifikansi pengujian terhadap *total assets* sebesar 0.391 (> 0.05). Hal ini berarti bahwa hipotesis keempat tersebut tidak berhasil ditolak. Sehingga hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan tidak mempunyai hubungan (positif) dan signifikan dengan tingkat kelengkapan pengungkapan informasi pada laporan keuangan.

Hipotesis kelima penelitian ini adalah terdapat perbedaan tingkat kelengkapan pengungkapan informasi antara masing-masing ukuran perusahaan. Pengujian yang dilakukan terhadap hipotesis kelima tersebut dapat dilihat pada hasil pengujian dengan alat analisis Npar Tests yang menyimpulkan nilai Chi-Square sebesar 0.091 (> 0.05). Hal ini berarti bahwa hipotesis kelima tersebut tidak berhasil ditolak. Sehingga hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan tingkat kelengkapan pengungkapan informasi antara masing-masing ukuran perusahaan.

Hipotesis keenam penelitian ini adalah jenis industri mempunyai hubungan positif dan signifikan dengan tingkat kelengkapan pengungkapan informasi pada laporan keuangan. Pengujian yang dilakukan terhadap hipotesis keenam tersebut dapat dilihat pada hasil analisis regresi (*tabel correlations*) yang menyimpulkan tingkat signifikansi pengujian terhadap jenis industri sebesar 0.004 (< 0.05). Di samping itu harus dilihat juga tabel coefficients yang menunjukkan tingkat signifikansi sebesar 0.346 (> 0.05). Hal ini berarti bahwa hipotesis keenam tersebut berhasil ditolak. Sehingga hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa jenis industri mempunyai hubungan (positif), tetapi (tidak signifikan) dengan tingkat kelengkapan pengungkapan informasi pada laporan keuangan.

Hipotesis ketujuh penelitian ini adalah terdapat perbedaan tingkat kelengkapan pengungkapan informasi antara masing-masing jenis industri. Pengujian yang dilakukan terhadap hipotesis ketujuh tersebut dapat dilihat pada hasil pengujian dengan alat analisis T - Tests (Levene's Test) yang menunjukkan nilai F sebesar 1.464 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.230 (> 0.05). Hal ini berarti bahwa hipotesis ketujuh tersebut tidak berhasil ditolak. Sehingga hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan tingkat kelengkapan pengungkapan informasi antara masing-masing jenis industri.

Hipotesis kedelapan penelitian ini adalah status perusahaan mempunyai hubungan positif dan signifikan dengan tingkat kelengkapan pengungkapan informasi pada laporan keuangan. Pengujian yang dilakukan terhadap hipotesis kedelapan tersebut dapat dilihat pada hasil analisis regresi (*tabel correlations*) yang menyimpulkan tingkat signifikansi pengujian terhadap status perusahaan sebesar 0.000 (< 0.05). Di samping itu harus dilihat juga *tabel coefficients* yang menunjukkan tingkat signifikansi sebesar 0.000 (< 0.05). Hal ini berarti bahwa hipotesis kedelapan tersebut berhasil ditolak. Sehingga hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa status perusahaan mempunyai hubungan (positif), dan signifikan dengan tingkat kelengkapan pengungkapan informasi pada laporan keuangan.

Hipotesis kesembilan penelitian ini adalah terdapat perbedaan tingkat kelengkapan pengungkapan informasi antara masing-masing status perusahaan. Pengujian yang dilakukan terhadap hipotesis kesembilan tersebut dapat dilihat pada hasil pengujian dengan alat analisis T - Tests (Levene's Test) yang menunjukkan nilai F sebesar 5.776 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.019 (< 0.05). Hal ini berarti bahwa hipotesis ketujuh tersebut berhasil ditolak. Sehingga hasil penelitian dapat

disimpulkan bahwa terdapat perbedaan tingkat kelengkapan pengungkapan informasi antara masing-masing status perusahaan.

E. SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN-SARAN

1. Simpulan

Hasil pengolahan data dengan regresi linier berganda menyebutkan bahwa status perusahaan (yang digolongkan ke dalam kelompok PMA dan PMDN) menunjukkan angka yang signifikan sebesar 0.000. Hasil ini berarti bahwa status perusahaan mempunyai pengaruh yang cukup terhadap kelengkapan pengungkapan. Variabel independen lainnya seperti Current Ratio, Leverage Ratio, ROI, Total Assets, dan Jenis Industri, tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kelengkapan pengungkapan.

Nilai R sebesar 0.652 dan R² sebesar 0.425. Hal ini berarti bahwa variabel independen yaitu Current Ratio, Leverage Ratio, ROI, Total Assets, dan Dummy Jenis Industri, serta Dummy Status Perusahaan hanya mampu menjelaskan sebesar 42,5% selebihnya terdapat variabel lain yang tidak dicakup dalam penelitian yang mempengaruhi kelengkapan pengungkapan.

Dari tabel pengolahan ANOVA, signifikansinya adalah 0.000. Hal ini berarti bahwa variabel independen yaitu Current Ratio, Leverage Ratio, ROI, Total Assets, dan Dummy Jenis Industri, serta Dummy Status Perusahaan dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen (kelengkapan pengungkapan).

2. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan yang ada dalam penelitian ini, adalah

- a) Item pengungkapan yang digunakan mangacu pada penelitian yang dilakukan di Amerika, yang mungkin kurang relevan dengan keadaan perekonomian dan industri di Indonesia.
- b) Sampel penelitian diambil dari laporan tahunan untuk tahun 2003 (satu tahun) dan tidak membandingkan dengan tahun sebelumnya.

3. Saran-saran

Berdasarkan keterbatasan penelitian ini, saran-saran yang dapat diberikan antara lain;

- a) Agar laporan tahunan yang diterbitkan sedapat mungkin bebas dari window dressing atau substance-over-form atau kesalahan-kesalan lainnya, maka diperlukan penelaahan lebih lanjut untuk mengetahui item pengungkapan yang sesuai dengan keadaan kondisi perekonomian dan perusahaan Indonesia pada umumnya dan perusahaan yang listing di Bursa Efek pada khususnya.

- b) Perlu ditambahkan variabel independen lainnya yang sesuai dan mempengaruhi secara signifikan tingkat kelengkapan pengungkapan pada perusahaan di Indonesia, terutama yang terdaftar pada Bursa Efek melalui penelitian lebih lanjut.
- c) Sampel yang digunakan mungkin tidak cukup hanya satu tahun, perlu dikembangkan dan dalam jumlah yang lebih banyak.

DAFTAR PUSTAKA

- Cerf, Alan R., *Corporate Reporting and Investment Decision*, Berkelay, CA: The University of California Press.
- Chow, Chee W., and Adrian Wong-Boren, Voluntary Financial Disclosure by Mexican Corporation, *Accounting Review*, July 1987, pp. 533 – 541.
- Cooke, T. E., Disclosure in the Corporate Annual Reports of Swedish Companies, Vol. 19, Spring 1989, pp. 113 – 124.
- , The Impact of Size, Stock Market Listing and Industry Type on Disclosure in The Annual Reports of Japanese Listed Corporations, *Accounting & Business Research*, vol. 22, Summer 1992, pp. 229 – 237.
- , Disclosure in Japanese Corporate Annual Repots, *Journal of Business Finance & Accounting*, Vol. 20, Juni 1993, pp. 521 – 535.
- Gray, Sidney J. Lee H. Radebaugh and Clare B. Roberts, International Perceptions of Cost Constrains on Voluntary Information Disclosures: A Comparative Study of U.K. and U.S. Multinationals, *Journal of International Business Studies*, 4 Qrt 1990, pp. 597 – 622.
- Gujarati, Damodar N., *Basic Econometrics*, Second Edition, USA: McGraw-Hill, Inc., 1988.
- Ikatan Akuntan Indonesia, *Standar Akuntansi Indonesia: Buku Satu*, Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 1994.
- , *Standar Akuntansi Indonesia: Buku Dua*, Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 1994.
- Lang, Mark and Russell Lundholm, Cross-Sectional Determinants of Analyst Ratings of Corporate Disclosures, *Journal Accounting Research*, Autumn 1993, pp. 246 – 271.

- , and -----, Corporate Disclosure Policy and Analyst Behavior, *The Accounting Review*, Vol. 71, Oct 1996, pp. 467 – 492.
- Lev, Baruch, Information Disclosure Strategy, *California Management Review*, Vol. 34, Summer 1992, pp. 9 – 32.
- Mason, Robert D. and Douglas A. Lind, *Statistical Techniques in Business & Economics*, Ninth Edition, Chicago: Richard D. Irwin, Inc., 1996.
- McKinnon, Jill L. and Lian Dalimunthe, Voluntary Disclosure of Segment Information by Australian Diversified Companies, *Accounting & Finance*, Vol. 33, May 1993, pp. 33 – 50.
- Meek, Gary K., Clare B. Roberts and Sidney J. Gray, Factors Influencing Voluntary Annual Report Disclosure by U.S., U.K. and Continental European Multinational Corporations, *Journal of International Business Studies*, Vol. 26, Third Quarter 1995, pp. 555 – 572.
- , and Gray S.J., Globalization of Stock Markets and Foreign Listing Requirements: Voluntary Disclosure by Continental European companies Listed on The London Stock Exchange, *Journal of International Business Studies*, Vol. 20, Summer 1989, pp. 315 – 336.
- Mitchell, Jason D., Chris W. L. Chia and Andrew S. Loh, *Voluntary Disclosure of Segment Information: Further Australian Evidence*, Vol 35, Nov. 1995, pp. 1 – 16.
- Myers, S. and N. Majluf, Corporate Financing and Investment Decision When Firms Have Information That Investors Do Not have, *Journal of Financial Economics*, Vol. 32, Jun 1984, pp. 187 – 221.
- Radebaugh, Lee h. and Sidney J. Gray, *International Accounting and Multinational Enterprises*, Fourth Edition, New York: John Wiley & Sons, Inc., 1997.

PENERAPAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (GCG) DI INDONESIA

Leny Nofianti⁵

ABSTRAK

Penerapan Tata Kelola Perusahaan kian menjadi faktor penentu yang strategis bagi perusahaan agar dapat senantiasa meningkatkan nilai serta memelihara proses pertumbuhan yang berkelanjutan. Oleh karenanya, setiap perusahaan perlu terus meningkatkan kerja kerasnya agar dapat mengambil manfaat dari penerapan Tata Kelola Perusahaan (Good corporate governance) yang baik.

Empat komponen utama yang diperlukan dalam konsep GCG ini, yaitu fairness, transparency, accountability, dan responsibility. Keempat komponen tersebut penting karena penerapan prinsip GCG secara konsisten terbukti dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan. Keempat komponen tersebut menjadi acuan dalam menentukan setiap langkah yang akan diambil oleh segenap jajaran manajemen dan karyawan Perseroan.

Jika prinsip GCG ini dilaksanakan secara sungguh-sungguh, bisa dipastikan perusahaan akan memiliki landasan yang kokoh dalam menjalankan bisnisnya. Secara eksternal, perusahaan akan lebih dipercaya investor, yang berarti nilai pasar sahamnya akan terus membung. Mitra kerja pun tak ragu mengembangkan hubungan bisnis lebih luas lagi. Para pemasok memiliki pegangan yang jelas dan terpercaya serta yakin akan diperlakukan secara adil sehingga bisa memberikan harga yang terbaik, yang berarti menciptakan efisiensi bagi perusahaan. Para kreditor pun memiliki kepercayaan tinggi untuk mengucurkan kreditnya yang mungkin kita perlukan buat perluasan usaha.

Kata kunci: Tata Kelola Perusahaan (Good corporate governance), fairness, transparency, accountability, dan responsibility

A. PENDAHULUAN

Setelah Indonesia dan negara-negara di Asia Timur lainnya mengalami krisis ekonomi yang telah meluluh lantakkan pondasi perekonomian negara yang telah susah payah dibangun, isu mengenai *corporate governance* telah menjadi salah satu bahasan penting dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi dan pertumbuhan perekonomian yang stabil di masa yang akan datang.

Good corporate governance (GCG) diperlukan untuk mendorong terciptanya pasar yang efisien, transparan serta konsisten dengan peraturan perundang-undangan. Penerapan GCG perlu didukung oleh tiga pilar yang saling berhubungan, yaitu

⁵ Dosen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau.

negara dan perangkatnya sebagai regulator, dunia usaha sebagai pelaku pasar, dan masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha. Prinsip dasar yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pilar adalah:

- a) Negara dan perangkatnya menciptakan peraturan perundang-undangan yang menunjang iklim usaha yang sehat, efisien dan transparan, melaksanakan peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum secara konsisten (*consistent law enforcement*).
- b) Dunia usaha sebagai pelaku pasar menerapkan GCG sebagai pedoman dasar pelaksanaan usaha.
- c) Masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha serta pihak yang terkena dampak dari keberadaan perusahaan, menunjukkan kepedulian dan melakukan kontrol sosial (*social control*) secara obyektif dan bertanggung jawab.

Governance merupakan suatu sistem, dimana yang mengoperasikannya adalah manusia, adapun kesuksesan penerapannya sangat bergantung pada integritas dan komitmen. *Good Governance* merupakan prinsip sangat universal, sehingga menjadi rujukan bagi semua umat beragama, serta dapat ditemukan pada kultur budaya dimanapun. Hal yang membedakan praktik *Good Governance* di suatu negara adalah *Good Governance* sebagai sistem, karena harus selalu menyesuaikan dengan sistem hukum, keadaan dan perkembangan kemajuan, serta kultur bangsa itu sendiri. Didalam menerapkan *governance* yang baik, diperlukan pendekatan yang berbeda-beda, disesuaikan dengan keadaan dan waktu. Pendekatan yang dilakukan ada dua yaitu pendekatan yang sarat sarat aturan atau sistem, dibanding pendekatan etika (*Hard Law*) dan pendekatan yang lebih menekankan pada tidak terlalu sarat aturan tetapi lebih pada pendekatan etika (*Soft Law*).. Sebagai contoh, Amerika dan Singapura lebih memilih pendekatan “Hard Law”, sedangkan negara-negara skandinavia, Inggris dan Australia lebih memilih pendekatan “Soft Low”. (Daniri, 2008)

Indonesia masih menganut menggunakan pendekatan yang lembut, meski ditengah kenyataan perilaku koruptif yang berlebihan. Beberapa kajian rating tentang penerapan *good corporate governance* di Indonesia memberikan indikasi bahwa memang diperlukan dorongan hukum untuk dapat merealisasikan perubahan kultur ke arah yang lebih baik. Namun tentu saja hal ini bukan satu-satunya jawaban dari semua persoalan. Pendekatan komprehensif mencakup penerapan regulasi, implementasi yang konsisten, termasuk dalam pemberian sanksi yang sangat diperlukan untuk menciptakan efek jera, juga didukung dengan sistem penilaian kinerja yang adil, secara jangka panjang dapat mengubah perilaku. Dalam rangka membangun kultur yang etis dan berbasis *governance* yang baik, peran pemimpin sangat diperlukan guna menjadi panutan dan membangun integritas. (Daniri, 2008).

Penerapan Tata Kelola Perusahaan kian menjadi faktor penentu yang strategis bagi perusahaan agar dapat senantiasa meningkatkan nilai serta memelihara proses pertumbuhan yang berkelanjutan. Oleh karenanya, setiap perusahaan perlu terus meningkatkan kerja kerasnya agar dapat mengambil manfaat dari penerapan Tata Kelola Perusahaan (*Good corporate governance*) yang baik.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a) Bagaimanakah penerapan *Good corporate governance* di Indonesia?
- b) Hal apa yang menyebabkan penerapan *Good corporate governance* di Indonesia belum bisa berjalan secara optimal?

C. PEMBAHASAN

1. Sejarah Corporate Governance

Di negara-negara maju, *corporate governance* baru ditelaah secara mendalam sejak tahun 1980. Menghangatnya *corporate governance* sejak tahun tersebut sejalan dengan kebutuhan sistem perekonomian untuk menanggapi banyaknya kebangkrutan pada beberapa perusahaan papan atas (Syakhroza, 2003). Black pada tahun 2001 menyatakan bahwa pelaksanaan *corporate governance* di negara-negara maju sudah merata karena adanya aturan hukum dan norma-norma yang kuat. Meratanya pelaksanaan *corporate governance* menyebabkan pelaksanaan *corporate governance* bukan merupakan faktor yang berdampak secara signifikan untuk meningkatkan nilai saham dari perusahaan (Black, Jang, dan Kim, 2003).

Di Asia, termasuk Indonesia, *corporate governance* mulai banyak diperbincangkan pada pertengahan tahun 1997, yaitu saat krisis ekonomi melanda negara-negara tersebut (Indaryanto, 2004). Black pada tahun 2001 menyatakan bahwa di negara-negara yang sedang berkembang (seperti di Asia) pelaksanaan *corporate governance* mempunyai variasi yang besar yang berbeda dengan pelaksanaan *corporate governance* di negara-negara maju. Besarnya variasi dalam pelaksanaan *corporate governance* menyebabkan *corporate governance* merupakan faktor yang berdampak signifikan untuk meningkatkan nilai saham dari perusahaan (Black, Jang, dan Kim, 2003).

Indonesia mulai menerapkan prinsip GCG sejak menandatangani letter of intent (LOI) dengan IMF, yang salah satu bagian pentingnya adalah pencatuman jadwal perbaikan pengelolaan perusahaan-perusahaan di Indonesia (YPPMI & SC, 2002). Sejalan dengan hal tersebut, Komite Nasional Kebijakan *corporate governance* (KNKCG) berpendapat bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia mempunyai tanggung jawab untuk menerapkan standar GCG yang telah diterapkan di tingkat internasional.

Jika dilihat dari sejarahnya, keberadaan *corporate governance* didasari oleh dua konsep penting. Konsep pertama, legitimasi penggunaan kekuasaan dengan dikotomi antara pemilik dan pengelola perusahaan (*agency problems*). Konsep kedua, pada kenyataannya tidak mungkin untuk membuat sebuah kontrak yang lengkap (*incomplete contracts*) antara pemilik dan pengelola perusahaan (Learmount, 2002). Secara singkat, masing-masing konsep dapat dijelaskan sebagai berikut.

Permasalahan Keagenan (*Agency Problem*)

Menurut Monks dan Minow (1995) dalam Susanti (2008), perusahaan merupakan mekanisme yang memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi dalam modal, keahlian, serta tenaga kerja dalam rangka memaksimalkan keuntungan dalam jangka panjang. Pihak-pihak yang berkontribusi dalam modal disebut sebagai pemilik (*prinsipal*), sedangkan pihak-pihak yang berkontribusi dalam keahlian dan tenaga kerja disebut agen (*pengelola perusahaan*). Adanya dua pihak tersebut (*pemilik dan agen*), telah menyebabkan timbulnya permasalahan tentang mekanisme seperti apa yang harus dibentuk untuk menyelaraskan kepentingan yang berbeda diantara keduanya. Setelah melakukan penempatan atas modal yang mereka miliki, pemilik akan meninggalkan perusahaan tanpa adanya suatu jaminan bahwa modal yang telah mereka tempatkan tidak akan disalurkan untuk investasi atau proyek yang tidak menguntungkan. Kesulitan yang dirasakan oleh pemilik ini merupakan inti dari permasalahan keagenan.

Kontrak yang Tidak Lengkap (*Incomplete Contract*)

Setelah tahun 1970 muncul teori-teori ekonomi baru tentang perusahaan. Teori-teori ini dimunculkan oleh Alchian dan Demset'z pada tahun 1972 serta Jensen dan Meckling pada tahun 1976. Alchian dan Demset'z serta Jensen dan Meckling memperkenalkan ide bahwa perusahaan merupakan *nexus of contract* (Learmount, 2002). Perusahaan merupakan *nexus of contract* mengandung arti bahwa di dalam perusahaan terdapat sebuah kontrak timbal balik (*quid pro quo contract*) yang memfasilitasi hubungan antara pemilik perusahaan, karyawan, pemasok, dan berbagai partisipan lainnya yang terkait dengan perusahaan

Terkait dengan perusahaan sebagai *nexus of contract*, Maher dan Andersson pada tahun 2000 menyatakan bahwa tidak mungkin untuk membuat sebuah kontrak yang lengkap antara pemilik modal dan agen yang akan menspesifikasikan bagaimana keuntungan dibagi antara pemilik modal dan agen; dan juga akan menggambarkan tindakan yang memadai bagi agen dalam semua situasi yang memungkinkan. Penyebab dari tidak adanya kontrak yang lengkap adalah sulitnya untuk memprediksikan setiap kemungkinan yang akan terjadi dimasa yang akan datang atau karena kendala biaya yang mahal untuk mengantisipasi setiap kemungkinan tersebut (Aries, 2008).

Tidak adanya kontrak yang lengkap telah menyebabkan munculnya sejumlah kondisi yang memerlukan tindakan dalam pengelolaan perusahaan yang tidak secara eksplisit dinyatakan dalam kontrak, contohnya hak untuk membuat keputusan pada saat pengelolaan suatu investasi menghadapi kondisi yang berbeda dengan apa yang direncanakan. Dalam kenyataannya, walaupun pemilik modal juga menerima hak-hak kontrol residual untuk dapat memutuskan sesuatu yang tidak terduga, pengalokasian hak-hak kontrol residual bagi pemilik modal seringkali tidak efektif karena sebagian besar pemilik modal seringkali tidak memiliki kemampuan atau tidak memiliki cukup informasi untuk mengetahui apa yang harus dilakukan. Bahkan, untuk kedua hal tersebutlah mereka memperkerjakan agen. Akibatnya, agen akan mendapatkan sebagian besar hak-hak kontrol residual tersebut dan kemudian memiliki kemampuan untuk mengalokasikan dana-dana perusahaan sesuai dengan pilihan mereka. Dalam hal ini, *corporate governance* merupakan suatu cara atau mekanisme untuk menjamin supaya pemilik modal mendapatkan imbal hasil (dividen) yang sesuai dengan kepentingan maupun investasi yang ditanamkan oleh mereka.

Masalah keagenan dan kontrak yang tidak lengkap, merupakan *shareholder model of governance* (Maher dan Andersson, 2000). Tujuan utama dari *shareholder model of governance* adalah memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham. Apabila *shareholder model of governance* hanya memandang perusahaan secara dangkal, yaitu dari sisi hubungan antara pemilik dan agen yang mengelola perusahaan, *stakeholder model of governance* memandang perusahaan secara lebih luas. Perusahaan harus bertanggung jawab pada sejumlah besar pemangku kepentingan (*stakeholders*), di luar pemegang saham. Pemangku kepentingan ini meliputi para kreditor dan konstituen-konstituen sosial seperti anggota masyarakat tempat perusahaan berlokasi, lingkungan, serta pemerintah daerah dan pusat. Dalam kerangka analisisnya, *stakeholder model of governance* menekankan pada keberadaan perusahaan sebagai institusi yang harus bertanggung jawab secara sosial dan sebagai institusi yang harus dikelola untuk kepentingan publik (Maher dan Andersson, 2000). Salah satu bentuk dari *stakeholder model of governance* adalah *corporate social responsibility*. *Corporate social responsibility* merupakan kepedulian perusahaan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui praktik-praktik bisnis yang sesuai dengan aturan, moral, dan etika, serta melalui kontribusi dari sumber-sumber yang dimiliki oleh perusahaan (Kottler, 2005).

2. Pengertian *Corporate Governance* dan *Good Corporate Governance*

Sampai saat ini para ahli tetap menghadapi kesulitan dalam mendefinisikan GCG yang dapat mengakomodasikan berbagai kepentingan. Tidak terbentuknya definisi yang akomodatif bagi semua pihak yang berkepentingan dengan GCG disebabkan karena cakupan GCG yang lintas sektoral. GCG dapat didekati dengan berbagai disiplin ilmu antara lain ilmu makroekonomi, teori organisasi, teori informasi, akuntansi, keuangan, manajemen, psikologi, sosiologi dan politik (Turnbull, 1977). Definisi CGC menurut Bank Dunia adalah aturan, standar dan organisasi di bidang ekonomi yang mengatur perilaku pemilik perusahaan, direktur dan manajer serta

perincian dan penjabaran tugas dan wewenang serta pertanggungjawabannya kepada investor (pemegang saham dan kreditor). Tujuan utama dari GCG adalah untuk menciptakan sistem pengendalian dan keseimbangan (check and balances) untuk mencegah penyalahgunaan dari sumber daya perusahaan dan tetap mendorong terjadinya pertumbuhan perusahaan.

Secara umum Tata kelola perusahaan (bahasa Inggris: *corporate governance*) adalah rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan, dan institusi yang mempengaruhi pengarahannya, pengelolaan, serta pengontrolan suatu perusahaan atau korporasi (dalam susana iriyani, 2008) Tata kelola perusahaan juga mencakup hubungan antara para pemangku kepentingan (stakeholder) yang terlibat serta tujuan pengelolaan perusahaan. Pihak-pihak utama dalam tata kelola perusahaan adalah pemegang saham, manajemen, dan dewan direksi. Pemangku kepentingan lainnya termasuk karyawan, pemasok, pelanggan, bank dan kreditor lain, regulator, lingkungan, serta masyarakat

Sementara Syakhroza (2003) mendefinisikan GCG sebagai suatu mekanisme tata kelola organisasi secara baik dalam melakukan pengelolaan sumber daya organisasi secara efisien, efektif, ekonomis ataupun produktif dengan prinsip-prinsip terbuka, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independen, dan adil dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Tata kelola organisasi secara baik apakah dilihat dalam konteks mekanisme internal organisasi ataupun mekanisme eksternal organisasi. Mekanisme internal lebih fokus kepada bagaimana pimpinan suatu organisasi mengatur jalannya organisasi sesuai dengan prinsip-prinsip diatas sedangkan mekanisme eksternal lebih menekankan kepada bagaimana interaksi organisasi dengan pihak eksternal berjalan secara harmoni tanpa mengabaikan pencapaian tujuan organisasi.

Ada empat kelompok yang mendefinisikan *corporate governance*, diantaranya :

<p><i>Corporate governance</i> sebagai suatu sistem</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sir Adrian Cadbury pada tahun 1992: <i>corporate governance is <u>the system</u> by which business corporations are directed and controlled</i> 2. OECD (<i>Organization for Economic Co-operation and Development</i>) pada tahun 1999,2001: <i>corporate governance is the <u>system by which</u> business corporations are directed and controlled. The corporate governance structure specifies the distribution of rights and responsibilities among different participants in the corporation, such as the board, managers, stakeholders and other stakeholders, and spells out the rules and procedures for making decisions on corporate affairs. By doing this, it also provides the structure through which the company objectives are set, and the means of attaining those objectives and monitoring performance.</i>
<p><i>Corporate governance</i> sebagai suatu mekanisme</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. La Porta, Silaens, Schleifer dan Vishny pada tahun 1997-1999: <i>corporate governance is a <u>set mechanism</u> through which outside investors protect themselves against expropriation by the insiders</i>
<p><i>Corporate governance</i> sebagai suatu proses dan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keasey dan Wright pada tahun 1993: <i>corporate governance concerns the structures and processes associated with production, decision making, control and so on within an organization.</i>

<p><i>struktur</i></p>	<p>2. Corporate governance Committee, Report of the Committee and Code of Governance, Singapura pada tahun 2001: <i>corporate governance refers to processes and structure by which the business and affairs of the company are directed and managed, in order enhance long term shareholder value through enhancing corporate performance and accountability, whilst taking into account the interest of the other stakeholders.</i></p> <p>3. Fujinuma pada tahun 1999: <i>corporate governance is a processes used to direct and manage the business activities designed to attain corporate objectives, align behavior with society's expectations and maintain accountability to shareholders; structure determined for decision making, accountability, control and behaviour at top of organizations</i></p>
<p><i>Corporate governance sebagai suatu hubungan</i></p>	<p>1. World Bank pada tahun 1999: <i>The World Bank defines corporate governance from the two different perspectives. From the standpoint of a corporation, the emphasis is put on the relations between the owners, management board and other stakeholders (the employees, customers, suppliers, investors and communities). Major significance in corporate governance is given to the board of directors and its ability to attain long-term sustained value by balancing these interests. From a public policy perspective, corporate governance refers to providing for the survival, growth and development of the company and at the same time its accountability in the exercise of power and control over companies. The role of public policy is to discipline companies and, at the same time, to stimulate them to minimize differences between private and social interests.</i></p>

Sumber : Aries (2008)

Berdasarkan definisi tentang sistem, mekanisme, proses, dan struktur serta hubungan, *corporate governance* merujuk pada sekumpulan komponen (sistem) yang dikendalikan dan diorganisasikan untuk menjalankan bisnis perusahaan. Komponen-komponen ini meliputi proses dan struktur dan berbagai partisipan (Dewan Direksi, Dewan Komisaris, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya). Proses dan struktur merupakan mekanisme atau aspek teknis yang diperlukan untuk mengendalikan dan mengkoordinasikan berbagai partisipan dalam menjalankan bisnis perusahaan. Proses akan mengatur serangkaian tindakan dari para partisipan, sedangkan struktur akan menentukan bagaimana partisipan berhubungan dengan partisipan lainnya.

Dari uraian di atas, *corporate governance* dapat didefinisikan sebagai sistem yang terdiri atas proses dan struktur (mekanisme) yang mengendalikan dan mengkoordinasikan berbagai partisipan dalam menjalankan bisnis perusahaan. Proses digunakan untuk mengarahkan dan mengelola aktivitas-aktivitas bisnis yang direncanakan dalam rangka mencapai tujuan perusahaan, menyelaraskan perilaku perusahaan dengan ekspektasi dari masyarakat, serta mempertahankan akuntabilitas perusahaan kepada pemegang saham. Struktur akan menspesifikasikan pendistribusian hak-hak dan tanggung jawab diantara berbagai partisipan dalam organisasi seperti Dewan Komisaris, manajer, pemegang saham, serta pemangku kepentingan lainnya, dan menjelaskan aturan-aturan maupun prosedur-prosedur untuk pengambilan keputusan dalam hubungan perusahaan. Pengertian dari *good corporate governance* dapat diuraikan sebagai berikut:

The Australian National Audit Office (ANAO) pada tahun 1999

Good corporate governance consists of processes and structures which will: ...facilitate decision-making and appropriate delegation of accountability and responsibility within and outside an organisation. This should ensure that the varying interests of stakeholders are appropriately balanced; that decisions are made in a rational, informed and transparent fashion; and that those decisions contribute to the overall efficiency and effectiveness of the organization

YPPMI & SC pada tahun 2002 (Sulistyanto,2003).

Good corporate governance secara definitif merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (value added) untuk semua pemangku kepentingan. Ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini. Pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar (akurat) dan tepat pada waktunya. Kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (disclosure) secara akurat, tepat waktu, dan transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan pemangku kepentingan dari perusahaan.

Dari kedua definisi tersebut dan mengacu pada definisi *corporate governance* yang telah terbentuk sebelumnya, tampak bahwa *good corporate governance* merupakan sistem yang mengendalikan dan mengkoordinasikan berbagai partisipan dalam menjalankan bisnis perusahaan sehingga jalannya bisnis perusahaan tersebut dapat memfasilitasi perusahaan untuk:

- a) Menunjukkan akuntabilitas dan tanggung jawab;
- b) Menjamin adanya keseimbangan diantara berbagai kepentingan dari pemangku kepentingan (memberikan perlakuan yang adil bagi seluruh pemangku kepentingan), termasuk menghargai hak dari pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar (akurat) dan tepat pada waktunya;
- c) Melakukan pengungkapan dan transparan dalam setiap informasi (seperti informasi tentang kinerja perusahaan, kepemilikan, maupun pemangku kepentingan), termasuk juga transparan dalam membuat suatu keputusan.

Corporate governance (Tata kelola perusahaan) merupakan suatu subjek yang memiliki banyak aspek. Salah satu topik utama dalam tata kelola perusahaan adalah menyangkut masalah akuntabilitas dan tanggung jawab mandat, khususnya implementasi pedoman dan mekanisme untuk memastikan perilaku yang baik dan melindungi kepentingan pemegang saham. Fokus utama lain adalah efisiensi ekonomi yang menyatakan bahwa sistem tata kelola perusahaan harus ditujukan untuk mengoptimalisasi hasil ekonomi, dengan penekanan kuat pada kesejahteraan para pemegang saham. Ada pula sisi lain yang merupakan subjek dari tata kelola perusahaan, seperti sudut pandang pemangku kepentingan, yang menuntut perhatian

dan akuntabilitas lebih terhadap pihak-pihak lain selain pemegang saham, misalnya karyawan atau lingkungan.

Terkait dengan kata *Good*, *good* yang terdapat dalam *good corporate governance* menegaskan adanya sistem yang superior atau sistem yang memiliki kualitas yang diinginkan yang dapat memfasilitasi perusahaan untuk ketiga hal di atas. Secara lebih spesifik, ketiga hal di atas (menunjukkan akuntabilitas dan tanggung jawab, menunjukkan perlakuan yang adil terhadap seluruh pemangku kepentingan, serta menunjukkan pengungkapan dan transparan dalam setiap informasi) dapat dinyatakan sebagai prinsip-prinsip *good corporate governance*. Hal ini mengacu pada: (i) Laporan Cadbury pada tahun 1992 yang menyatakan bahwa prinsip-prinsip utama dalam *good corporate governance* adalah keterbukaan, integritas, dan akuntabilitas, (ii) Organization for Economic Corporation and Development (OECD) pada tahun 2002 yang menyatakan bahwa seperangkat prinsip dasar dalam *good corporate governance* adalah keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab (Indaryanto, 2004), serta (iii) SK MENTERI BUMN NOMOR 117/M-MBU/2003 yang menyatakan bahwa prinsip-prinsip utama dalam *corporate governance* adalah keadilan, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan independensi.

Berdasarkan uraian di atas, *good corporate governance* dapat didefinisikan sebagai sistem yang terdiri atas proses dan struktur (mekanisme) yang superior yang mengendalikan dan mengkoordinasikan berbagai partisipan dalam menjalankan bisnis perusahaan sehingga jalannya bisnis perusahaan tersebut dapat: (i) memfasilitasi perusahaan untuk menunjukkan akuntabilitas dan tanggung jawab, (ii) memfasilitasi perusahaan untuk memberikan perlakuan yang adil bagi seluruh pemangku kepentingan, termasuk menghargai hak dari pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar (akurat) dan tepat pada waktunya, serta (iii) memfasilitasi perusahaan untuk melakukan pengungkapan (disclosure) secara akurat, tepat waktu dan transparan terhadap semua informasi tentang kinerja perusahaan, kepemilikan maupun pemangku kepentingan perusahaan, termasuk juga transparan dalam membuat suatu keputusan. Akuntabilitas, tanggung jawab, perlakuan yang adil, pengungkapan, serta transparansi dapat dinyatakan sebagai prinsip-prinsip yang harus dicapai untuk mewujudkan *good corporate governance*. Dengan membandingkan definisi *corporate governance* dan *good corporate governance*, dapat disimpulkan bahwa *good corporate governance* adalah kondisi superior dari *corporate governance*.

Empat komponen utama yang diperlukan dalam konsep GCG ini, yaitu *fairness*, *transparency*, *accountability*, dan *responsibility*. Keempat komponen tersebut penting karena penerapan prinsip GCG secara konsisten terbukti dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan (Beasley et al., 1996 dalam Sulistyanto, 2003). Keempat komponen tersebut menjadi acuan dalam menentukan setiap langkah yang akan diambil oleh segenap jajaran manajemen dan karyawan Perseroan, yaitu:

- a) Keadilan, yang menjamin bahwa setiap keputusan dan kebijakan yang diambil adalah demi kepentingan seluruh pihak yang berkepentingan, termasuk para pelanggan, pemasok, pemegang saham, investor serta masyarakat luas.
- b) Transparansi, berupa komitmen untuk memastikan ketersediaan dan keterbukaan informasi penting bagi pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders) mengenai keadaan keuangan, pengelolaan dan kepemilikan Perseroan secara akurat, jelas dan tepat waktu.
- c) Akuntabilitas, yang menjamin tersedianya mekanisme, peran tanggung jawab jajaran manajemen yang profesional atas semua keputusan dan kebijakan yang diambil sehubungan dengan aktivitas operasional Perseroan.
- d) Tanggung Jawab, yang mencakup adanya deskripsi yang jelas tentang peranan dari semua pihak dalam mencapai tujuan bersama, termasuk memastikan dipatuhinya peraturan serta nilai-nilai sosial.

Dalam menerapkan nilai-nilai Tata Kelola Perusahaan, Perseroan menggunakan pendekatan berupa keyakinan yang kuat akan manfaat dari penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik. Berdasarkan keyakinan yang kuat, maka akan tumbuh semangat yang tinggi untuk menerapkannya sesuai standar internasional. Guna memastikan bahwa Tata Kelola Perusahaan diterapkan secara konsisten di seluruh lini dan unit organisasi, Perseroan menyusun berbagai acuan sebagai pedoman bagi seluruh karyawan. Selain acuan yang disusun sendiri, perseroan juga mengadopsi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perseroan menyadari bahwa penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik hanya akan efektif dengan adanya asas kepatuhan dalam kegiatan bisnis sehari-hari, terlebih dahulu diterapkan oleh jajaran manajemen dan kemudian diikuti oleh segenap karyawan. Melalui penerapan yang konsisten, tegas dan berkesinambungan dari seluruh pelaku bisnis.

Perusahaan menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang baik dengan meningkatkan semangat kerja, akuntabilitas, keadilan, transparansi dan tanggung jawab. Memperbaiki pengelolaan dan control Perseroan untuk memastikan bahwa standar-standar di bidang hukum dan keuangan berjalan dalam kerangka tata kelola yang diatur berdasarkan hukum dan perundang-undangan serta Anggaran Dasar Perseroan. *Good corporate governance* meliputi:

- **Laporan Keuangan**

Perseroan mengumumkan Laporan Keuangan Triwulanan, Tengah Tahunan dan Tahunan ke masyarakat secara tepat waktu. Laporan Keuangan dan catatannya dipersiapkan berdasarkan prinsip-prinsip Akuntansi yang diterapkan secara konsisten.

- **Rapat Umum Pemegang Saham**

Setiap tahun Perseroan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk melaporkan kinerja dan tata laksana keuangan Perseroan untuk tahun buku yang telah berjalan untuk mendapatkan persetujuan dari Para Pemegang Saham serta penunjukan Akuntan Publik.

- **Dewan Komisaris**

Dewan Komisaris Perseroan bertugas untuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap Direksi Perseroan.

- **Direksi**

Direksi diharuskan menjalankan tugas nya secara professional dan memenuhi sistim serta prosedur yang telah ditetapkan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan

- **Komisaris Independen**

Dalam kerangka tata kelola Perusahaan, Dewan Komisaris dalam tugasnya melaksanakan fungsi penawasan terhadap Direksi, haruslah independen. Komisaris Independen diharuskan tidak mempunyai hubungan dengan Direksi maupun Para Pemegang Saham.

- **Komite Audit**

Komite Audit bertugas untuk memastikan kepatuhan (compliance) perusahaan terhadap Hukum dan Peraturan Perundang-undangan, memastikan kelayakan dan ketelitian dari Laporan Keuangan yang mencakup Laporan Keuangan dari Auditor Independen, mengamati efektifitas sistim pengwasan internal perusahaan yang dibuat oleh Dewan Komisaris dan Direksi.

Penerapan GCG di Indonesia

Komite Nasional Kebijakan *corporate governance* (KNKCG) berpendapat bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia mempunyai tanggung jawab untuk menerapkan standar GCG yang telah diterapkan di tingkat internasional. Namun, walau menyadari pentingnya GCG, banyak pihak yang melaporkan masih rendahnya perusahaan yang menerapkan prinsip tersebut. Masih banyak perusahaan menerapkan prinsip GCG karena dorongan regulasi dan menghindari sanksi yang ada dibandingkan yang menganggap prinsip tersebut sebagai bagian dari kultur perusahaan. Kondisi pelaksanaan *corporate governance* oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia dapat digambarkan sebagai berikut (dalam Aries, 2008):

1. Hasil survai internasional memberikan nilai yang rendah kepada perusahaan-perusahaan di Indonesia dalam mewujudkan prinsip-prinsip *good corporate*

governance, bahkan jika dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya. Hasil survei tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

- a. Survei yang dilakukan oleh Credit Lyonnais Securities Asia (CLSA) terhadap standar-standar *corporate governance* yang dilakukan oleh 495 perusahaan di 25 negara berkembang selama bulan Februari sampai dengan bulan April tahun 2001 menunjukkan bahwa rata-rata skor total untuk perusahaan-perusahaan di Indonesia yang disurvei hanya sebesar 37,81 dari skala 0,00-100,00 (100,00 adalah nilai tertinggi). Skor ini lebih rendah jika dibandingkan dengan skor total untuk perusahaan-perusahaan yang disurvei di negara Singapura (64,50), Malaysia (56,60), India (55,60), Thailand (55,10), Taiwan (54,60), Cina (49,10), Korea (47,10), dan Pilipina (43,90) (Aries 2008,). Dalam hal ini, terdapat 7 (tujuh) aspek yang dinilai oleh CLSA, yaitu: transparansi, kedisiplinan manajemen, kemandirian, akuntabilitas, tanggung jawab, keadilan, dan kepedulian sosial dari perusahaan.
- b. Pada tahun 2002, dengan menggunakan standar penilaian yang sama dengan tahun sebelumnya, survei yang dilakukan oleh CLSA terhadap 475 perusahaan di 20 negara (termasuk Asia) menunjukkan bahwa rata-rata skor total untuk perusahaan-perusahaan di Indonesia yang disurvei hanya sebesar 38,20 dari skala 0,00-100,00. Walaupun skor ini lebih tinggi dibandingkan dengan skor yang diperoleh pada tahun sebelumnya, namun skor ini tetap lebih rendah dibandingkan dengan skor negara-negara Asia lainnya. Singapura mempunyai skor 65,40, Malaysia mempunyai skor 64,10, India mempunyai skor 62,20, Thailand mempunyai skor 60,00, Taiwan mempunyai skor 59,20, Cina mempunyai skor 50,80, Korea mempunyai skor 62,00, dan Pilipina mempunyai skor 44,00
- c. Pada tahun 2003, CLSA pertama kali bekerja sama dengan Asian *corporate governance* Association (ACGA) dalam melakukan survei terhadap pelaksanaan *corporate governance* oleh perusahaan-perusahaan di kawasan Asia. Survei ini masih menggunakan standar penilaian yang sama dengan tahun 2001 dan 2002 dan dilakukan terhadap 380 perusahaan di 10 (sepuluh) negara Asia. Hasil survei menunjukkan bahwa rata-rata skor total untuk perusahaan-perusahaan di Indonesia yang disurvei hanya sebesar 43,00 dari skala 0,00-100,00. Walaupun skor ini tampak lebih tinggi dibandingkan dengan skor pada tahun sebelumnya, namun masih lebih rendah dibandingkan dengan skor dari kebanyakan negara Asia lainnya. Hanya ada satu negara yang disurvei yang memiliki skor lebih rendah dibandingkan Indonesia, yaitu Pilipina. Singapura mempunyai skor 69,50, Malaysia mempunyai skor 65,00, India mempunyai skor 64,80, Thailand mempunyai skor 60,20, Taiwan mempunyai skor 58,70, Cina mempunyai skor 57,40, Korea mempunyai skor 70,80, dan Pilipina mempunyai skor 39,80 (Gill dan Allen, 2003)

- d. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2004, CLSA dan ACGA melakukan penilaian pelaksanaan *corporate governance* berdasarkan pada 5 (lima) aspek makro, yaitu: (i) hukum dan praktek, (ii) penegakan hukum, (iii) lingkungan politik, (iv) standar-standar akuntansi dan audit, serta (v) budaya *corporate governance*. Masing-masing aspek mempunyai sejumlah pernyataan yang harus dijawab dengan jawaban 'ya' atau 'tidak' atau 'kadang-kadang'. Jawaban 'ya' diberi nilai satu, jawaban 'tidak' diberi nilai nol, dan jawaban 'kadang-kadang' diberi nilai setengah. Hasil survai pada tahun 2004 ini menunjukkan bahwa Indonesia mempunyai skor yang masih rendah dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya, yaitu 40,00. Sebagai perbandingan, Singapura mempunyai skor 75,00, Hong Kong mempunyai skor 67,00, India mempunyai skor 62,00, Malaysia mempunyai skor 60,00, Taiwan mempunyai skor 55,00, Korea mempunyai skor 58,00, Thailand mempunyai skor 53,00, Pilipina mempunyai skor 50,00, dan Cina mempunyai skor 48,00 (Allen, 2004)
 - e. Pada tahun 2005, dengan menggunakan standar penilaian yang sama dengan tahun 2004, hasil survai dari CLSA dan ACGA menunjukkan bahwa Indonesia masih menempati posisi yang terendah dengan skor sebesar 37,00. Sebagai perbandingan, Singapura mempunyai skor 70,00, Hong Kong mempunyai skor 69,00, India mempunyai skor 61,00, Malaysia mempunyai skor 56,00, Taiwan mempunyai skor 52,00, Korea dan Thailand mempunyai skor 50,00, Pilipina mempunyai skor 46,00, dan Cina mempunyai skor 44,00 (Gill dan Allen, 2005).
 - f. Pada tahun 2007, dengan menggunakan standar penilaian yang sama dengan tahun 2004 dan 2005, hasil survai dari CLSA dan ACGA terhadap 582 perusahaan yang terdaftar pada bursa saham di 11 (sebelas) negara Asia menunjukkan bahwa Indonesia masih menempati posisi yang terendah dengan skor sebesar 37,00. Sebagai perbandingan, Hong Kong mempunyai skor 67,00, Singapura mempunyai skor 65,00, India mempunyai skor 56,00, Taiwan mempunyai skor 54,00, Jepang mempunyai skor 52,00, Korea dan Malaysia mempunyai skor 49,00, Thailand mempunyai skor 47,00, Cina mempunyai skor 45,00, dan Pilipina mempunyai skor 41,00 (Gill dan Allen, 2007).
2. Hasil survei yang dilakukan oleh IICG (The Indonesian Institute for *corporate governance*) tentang persepsi *good corporate governance* di Indonesia dalam bentuk *Good corporate governance Perception Index* menunjukkan bahwa pada perusahaan-perusahaan yang telah terbuka saja yang pada dasarnya mempunyai tanggung jawab kepada publik dan secara kebetulan menjadi responden dalam survai, ternyata tidak semuanya menempatkan *good corporate governance* sebagai perhatian utama. Disamping itu, sejak survai pertama yang dilakukan oleh IICG (tahun 2001) sampai dengan survai keenam (tahun 2006), rata-rata perusahaan yang

bersedia mengikuti survei kurang dari 10 (sepuluh) persen terhadap total perusahaan terbuka yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta dan (Djarmiko, 2004)

3. Hasil penelitian Sulistyanto dan Nugraheni menunjukkan bahwa *corporate governance* belum mampu mengurangi manipulasi laporan-laporan keuangan yang dipublikasikan oleh perusahaan-perusahaan terbuka yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta (BEJ) (Sulistyanto dan Wibisono, 2003)

Penerapan GCG di Sektor Non Perbankan

Dalam pelaksanaan GCG, terdapat perbedaan pelaksanaannya di tiap Negara, hal ini disebabkan oleh berbagai faktor antara lain seperti kerangka hukum, maupun hal-hal yang tidak tertulis namun memiliki pengaruh yang luar biasa pada tingkat keberhasilan penerapan prinsip-prinsip *governance* yang baik.

Salah satu kesimpulan dari studi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga dunia, seperti Booz-Allen & Hamilton, McKinsey dan Bank Dunia terhadap kinerja perekonomian Indonesia adalah rendahnya praktik *Good corporate governance* (GCG). Secara umum, GCG sendiri berarti suatu proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis dan akuntabilitas perusahaan dengan tujuan utama mempertinggi nilai saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders lain. Dari pengertian tersebut, selanjutnya dapat dijelaskan bahwa GCG tidak lain adalah permasalahan mengenai proses pengelolaan perusahaan, yang secara konseptual mencakup diaplikasikannya prinsip-prinsip *transparency, accountability, fairness* dan *responsibility*. (Umar Farouk, 2001)

Dunia usaha Indonesia telah menarik pelajaran mahal dan pahit tentang absennya praktik GCG selama booming pertumbuhan ekonomi tahun 90-an yang berujung pada krisis moneter yang terjadi pada pertengahan 1997. Di sisi mikro, perusahaan di Indonesia pernah terlena dengan optimisme pertumbuhan ekonomi makro pada rentang waktu tersebut dan terjerat praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme karena menganggap hal tersebut sebagai *the only game in town* saat itu. Krisis ekonomi menjadi *moment of the truth* bagi dunia bisnis dan perusahaan Indonesia. Ada saat itu kita menyaksikan dunia bisnis Indonesia dipaksa untuk berubah oleh kondisi eksternal. Proses perubahan dari luar ke dalam atau *outside-in* ini tak jarang berujung kegagalan dan memakan korban karena perubahan tersebut bukan merupakan pilihan sadar dan tidak dipersiapkan dengan matang. Geger akibat perubahan yang dipaksakan ini tidak jarang meninggalkan trauma yang panjang bagi perusahaan.

Kebalikan dari perubahan *outside-in* adalah perubahan yang dimulai dari dalam (*inside-out*). Perubahan ini biasanya diawali dengan kesadaran para pemimpin perusahaan untuk segera berubah, daripada diubah oleh keadaan. Dalam kondisi ini, perubahan dapat dipersiapkan dengan lebih matang dan proses *buy-in* dari semua anggota organisasi terhadap rencana, arah dan strategi perubahan pun dapat dijalankan secara lebih memadai.

Kesadaran dan keinginan untuk berubah menjadi lebih baik menuju GCG merupakan modal bagi proses lebih lanjut yang disebut transformasi perusahaan. Transformasi memiliki intensitas yang lebih dalam dari perubahan. Transformasi membutuhkan kontrol yang lebih kuat terhadap skenario dan proses oleh para pelaku transformasi tersebut.

Konsultan manajemen McKinsey (2004) mendefinisikan transformasi sebagai perubahan yang dilakukan secara sadar dan berkelanjutan menuju tingkat kinerja yang lebih tinggi berdasar pada kapabilitas dan budaya organisasi. Transformasi yang berhasil mensyaratkan arsitektur program yang artikulatif dan konsisten pada tiga tingkat: agenda perubahan secara keseluruhan, pokok-pokok kinerja yang ingin dicapai, dan inisiatif individual.

Daniri (2008) menyampaikan dalam Bisnis Indonesia bahwa ada Tiga tingkat perubahan itu sejalan dengan Pedoman Umum *Good corporate governance* (GCG) Indonesia yang diluncurkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) pada 2007. Pada level agenda perubahan, GCG membutuhkan komitmen dari seluruh jajaran perusahaan dan skenario yang jelas tentang kemana arah yang dituju dengan penerapan GCG.

Pokok-pokok kinerja juga perlu disepakati: mulai dari pemenuhan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan (compliance), kesesuaian dengan standar dan international best practice (conformance), hingga mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh pemangku kepentingan, yang dapat diartikan sebagai pencapaian (achievement) yang ingin diraih dari penerapan GCG.

Menyedihkan sejak 5 tahun lebih yang lalu, pemerintah telah mencanangkan penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance/GCG*). Bahkan di awal 2003, 10 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menjadi proyek percontohan penerapan GCG telah memaklumkan komitmen bersama untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG. Sejumlah konsultan kaliber dunia disambat untuk memberi masukan. Hasilnya? "Boleh dibilang proses bisnis yang kini berlangsung masih sama saja dengan sebelum pencanangan penerapan GCG," ungkap seorang petinggi di sebuah BUMN yang sudah go public. (Teguh, 2005)

Pengakuan jujur petinggi tadi sejalan dengan temuan survei *corporate governance* Perception Index (CGPI) yang dilakukan Indonesia Institute for *corporate governance* (IICG) dan Majalah SWA. Inilah survei tahunan keempat yang dilakukan sejak 2001. CGPI 2004 merupakan survei dan pemeringkatan penerapan GCG pada perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek Jakarta (BEJ). Tahun 2004, survei dilakukan pada emiten yang terdaftar Juni-Desember 2004 secara sukarela (Teguh, 2005)

Penerapan GCG di Sektor Perbankan

Survei yang dilakukan oleh Bank Dunia – McKinsey Consulting Group mengindikasikan bahwa investor asing (Asia, Eropa, Amerika Serikat) bersedia memberikan premium sebesar 26% - 28% bagi perusahaan Indonesia yang secara efektif telah mengimplementasikan praktik GCG. Kesimpulan yang dapat ditarik dari survei tersebut adalah bahwa semakin rendah tingkat budaya GCG pada suatu negara maka premium yang akan diberikan akan semakin tinggi kepada perusahaan yang menerapkan GCG. Dalam hal ini, para investor akan sangat menghargai manajemen perusahaan yang berani melakukan hal positif di dalam tata kelola perusahaan walaupun lingkungannya tidak mendukung. Namun demikian, ternyata peringkat penerapan GCG Indonesia berada pada peringkat terendah dan jauh lebih buruk dibanding Jepang, Taiwan, Korea, Thailand dan Malaysia. Hal ini menjadi tantangan bagi pelaku bisnis khususnya sektor perbankan. (Mohamad Fajr, 2006)

Bank Indonesia, mengeluarkan Peraturan BI Nomor 8/4/PBI/2006 menunjukkan tingkat kesadaran yang tinggi dari Bank Indonesia akan kian pentingnya perbankan nasional menerapkan GCG. Diharapkan dengan adanya penilaian pelaksanaan GCG ini, masyarakat akan dapat menilai dan menjatuhkan kepercayaannya kepada bank yang benar-benar telah menerapkan tata kelola perusahaan dengan baik, sehingga masyarakat pun akan merasa aman menyimpan dananya di bank tersebut.

Lebih detilnya prinsip-prinsip GCG diterapkan dalam beberapa ketentuan PBI antara lain sebagai berikut :

1. Kepemilikan bank oleh badan hukum Indonesia setinggi-tingginya sebesar modal sendiri bersih badan hukum yang bersangkutan, yang wajib dipenuhi pada saat badan hukum yang bersangkutan melakukan penyetoran modal untuk pendirian Bank atau pada saat badan hukum yang bersangkutan melakukan penambahan modal disetor Bank.
2. Pemegang Saham Pengendali wajib memenuhi persyaratan bahwa yang bersangkutan bersedia untuk mengatasi kesulitan permodalan dan likuiditas yang dihadapi Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya (Comfort Letter).
3. Bilamana benturan kepentingan terjadi, anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi, Pejabat Eksekutif dan Pemimpin Kantor Cabang dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan Bank (dalam hal ini termasuk mengurangi keuntungan Bank) dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan.
4. Adanya larangan merangkap jabatan bagi anggota dewan Komisaris dan anggota Direksi.

5. Mayoritas anggota Direksi wajib berpengalaman dalam operasional bank sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai Pejabat Eksekutif pada bank, dan dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua termasuk besan dengan sesama anggota Direksi atau anggota dewan Komisaris; serta Direktur Utama wajib berasal dari pihak yang independen terhadap Pemegang Saham Pengendali.
6. Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dilarang memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain; dan
7. Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.
8. Pelanggaran atas ketentuan kewajiban menyampaikan comfort letter, benturan kepentingan, larangan perangkapan jabatan komisaris dan larangan bagi Direksi sebagaimana tersebut di atas, Bank dapat dikenakan sanksi administratif sesuai Pasal 52 UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998.

Di bawah ini hasil *corporate governance Perception Index* 2007 yang dikeluarkan oleh Indonesian Institute for *corporate governance* (IICG), dimana peringkat tertinggi adalah dari sektor Perbankan, yang kemudian disusul oleh BUMN Non Bank

Peringkat	Perusahaan	Skor	Predikat
1	Bank Mandiri	88,66	Sangat Terpercaya
2	Bank Niaga	87,90	Sangat Terpercaya
3	Aneka Tambang	82,07	Terpercaya
4	Adhi Karya	81,79	Terpercaya
5	United Tractors	81,53	Terpercaya
6	Tambang Batubara Bukit Asam	80,87	Terpercaya
7	Astra Graphia	80,30	Terpercaya
8	Kalbe Farma	79,70	Terpercaya
9	Bank BNI	79,46	Terpercaya
10	Bank Permata	78,85	Terpercaya

Sumber: IICG, 2007.

Sektor Perbankan mendapat posisi tertinggi, Salah satu sebabnya karena perbankan memang merupakan industri yang highly regulated, sehingga kepatuhan dan sikap kehati-hatian telah terinternalisasi dalam praktik bisnis sehari-hari. Selain itu, fenomena sektor perbankan ini juga mengindikasikan pentingnya regulasi dan penegakannya dalam mendorong penerapan GCG (Daniri, 2008).

Bank Indonesia (BI) menemukan sekitar 69,3% bank yang beroperasi di Indonesia belum memenuhi ketentuan *good corporate governance* (GCG) atau tata kelola yang baik. Dari hasil evaluasi BI, sekitar 69,3% bank di Indonesia belum comply terhadap ketentuan GCG," ungkap Peneliti Senior Tim API BI, Emmy Prabawani, di hotel Bumikarsa, Jl Jend Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (27/2/2008). Hasil evaluasi ini diperoleh dari percobaan BI mengenai penerapan beberapa pasal dari ketentuan GCG terhadap industri perbankan di Indonesia. Evaluasi dilakukan terhadap 101 bank pada periode September 2007 lalu.

"Ada beberapa sebab belum terpenuhinya ketentuan GCG, antara lain: 53,5% bank belum memiliki Komisaris Independen sesuai ketentuan, 30,7% bank belum membentuk komite secara lengkap, dan 18,8% bank belum memiliki jumlah komisaris yang lebih besar dari jumlah direksi," jelas Emmy.

Untuk itu, Emmy mengatakan perlu ditingkatkan peran kerja komisaris-komisaris, dan pembentukan komite sebagaimana yang telah ditentukan. Selain itu, diperlukan suatu law enforcement beserta kode etik yang dapat mendorong peningkatan kualitas GCG. Kemudian juga dilakukan pemberian GCG Award dengan tujuan mendorong bank-bank menjadi role model bagi bank lainnya," papar Emmy. (Bagus, 2008).

Penyebab GCG Belum Berjalan Secara Optimal di Indonesia

Ketiga kondisi di atas menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia belum mampu melaksanakan *corporate governance* dengan sungguh-sungguh sehingga perusahaan mampu mewujudkan prinsip-prinsip *good corporate governance* dengan baik. Hal ini disebabkan oleh adanya sejumlah kendala yang dihadapi oleh perusahaan-perusahaan tersebut pada saat perusahaan berupaya melaksanakan *corporate governance* demi terwujudnya prinsip-prinsip *good corporate governance* dengan baik. Kendala ini dapat dibagi tiga, yaitu kendala internal, kendala eksternal, dan kendala yang berasal dari struktur kepemilikan.

Kendala internal meliputi kurangnya komitmen dari pimpinan dan karyawan perusahaan, rendahnya tingkat pemahaman dari pimpinan dan karyawan perusahaan tentang prinsip-prinsip *good corporate governance*, kurangnya panutan atau teladan yang diberikan oleh pimpinan, belum adanya budaya perusahaan yang mendukung terwujudnya prinsip-prinsip *good corporate governance*, serta belum efektifnya sistem pengendalian internal (Djarmiko, 2004). Kendala eksternal dalam pelaksanaan *corporate governance* terkait dengan perangkat hukum, aturan dan penegakan hukum (law-enforcement). Indonesia tidak kekurangan produk hukum. Secara implisit ketentuan-ketentuan mengenai GCG telah ada tersebar dalam UUPT, Undang-undang dan Peraturan Perbankan, Undang-undang Pasar Modal dan lain-lain. Namun penegakannya oleh pemegang otoritas, seperti Bank Indonesia, Bapepam, BPPN, Kementerian Keuangan, BUMN, bahkan pengadilan sangat lemah. Oleh karena itu diperlukan test-case atau kasus preseden untuk membiasakan proses, baik

yang yudisial maupun quasi-yudisial dalam menyelesaikan praktik-praktik pelanggaran hukum perusahaan atau GCG.

Baik kendala internal maupun kendala eksternal sama-sama penting bagi perusahaan, namun demikian, jika kendala internal bisa dipecahkan maka kendala eksternal akan lebih mudah diatasi (Djarmiko, 2004). Kendala yang ketiga adalah kendala yang berasal dari struktur kepemilikan. Berdasarkan prosentasi kepemilikan dalam saham, kepemilikan terhadap perusahaan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kepemilikan yang terkonsentrasi dan kepemilikan yang menyebar. Kepemilikan yang terkonsentrasi terjadi pada saat suatu perusahaan dimiliki secara dominan oleh seseorang atau sekelompok orang saja (40,00% atau lebih). Kepemilikan yang menyebar terjadi pada saat suatu perusahaan dimiliki oleh pemegang saham yang banyak dengan jumlah saham yang kecil-kecil (satu pemegang saham hanya memiliki saham sebesar 5% atau kurang). Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan oleh struktur kepemilikan adalah perusahaan tidak dapat mewujudkan prinsip keadilan dengan baik karena pemegang saham yang terkonsentrasi pada seseorang atau sekelompok orang dapat menggunakan sumber daya perusahaan secara dominan sehingga dapat mengurangi nilai perusahaan. Sama seperti halnya kendala eksternal, dampak negatif yang ditimbulkan dari struktur kepemilikan dapat diatasi jika perusahaan memiliki sistem pengendalian internal yang efektif, seperti mempunyai sistem yang menjamin pendistribusian hak-hak dan tanggung jawab secara adil diantara berbagai partisipan dalam organisasi (Dewan Komisaris, Dewan Direksi, manajer, pemegang saham, serta pemangku kepentingan lainnya), dan dampak negatif ini juga akan hilang jika dalam struktur organisasinya, perusahaan mempunyai Komisaris Independen dengan jumlah tertentu dan memenuhi kualifikasi yang ditentukan (syarat-syarat yang ditentukan untuk menjadi Komisaris Independen). Keberadaan Komisaris Independen ini diharapkan mampu mendorong dan menciptakan iklim yang lebih independen, obyektif, dan menempatkan keadilan sebagai prinsip utama yang memperhatikan kepentingan pemegang saham minoritas dan pemangku kepentingan lainnya. Peran Komisaris Independen ini diharapkan mampu mendorong diterapkannya prinsip dan praktik *corporate governance* pada perusahaan-perusahaan publik di Indonesia, termasuk BUMN. Upaya perusahaan untuk menghadirkan sistem pengendalian internal yang efektif tersebut terkait dengan upaya perusahaan untuk mengatasi kendala internalnya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dampak negatif dari struktur kepemilikan akan hilang jika perusahaan mampu mengatasi permasalahan yang terkait dengan kendala internalnya. (Aries, 2008)

Tanggung jawab Sosial (CSR)

Di beberapa negara kegiatan CSR sudah lazim dilakukan oleh suatu korporasi. Bukan karena diatur oleh pemerintahnya, melainkan untuk menjaga hubungan baik dengan stakeholders. Di Indonesia, setiap perusahaan yang berkaitan dengan sumber daya alam harus melakukan CSR yang sebenarnya merupakan kegiatan sukarela.

Tanggung jawab sosial perusahaan atau *corporate social responsibility* (CSR) mungkin masih kurang populer dikalangan pebisnis nasional. Namun, tidak bagi pelaku usaha asing. Kegiatan kemasyarakatan yang dilakukan secara sukarela itu, sudah biasa dilakoni oleh perusahaan-perusahaan multinasional ratusan tahun lalu.

Berbeda dengan Indonesia. Di sini, kegiatan CSR baru dimulai beberapa tahun belakangan. Kegiatan ini makin ngetop tatkala DPR mengetuk palu tanda disetujuinya klausul CSR masuk ke dalam Undang-undang No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) dan UU No. 25/2007 tentang Penanaman Modal (UU PM).

Adalah Pasal 74 UU PT yang menyebutkan bahwa setiap perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Jika tidak dilakukan, maka perseroan tersebut bakal dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Aturan lebih tegas sebenarnya juga sudah ada di UU PM. Dalam Pasal 15 huruf b disebutkan, setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Jika tidak, maka dapat dikenai sanksi mulai dari peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal, atau pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal (Pasal 34 ayat (1) UU PM).

Beberapa kasus, seperti: lumpur Lapindo di Porong, lalu konflik masyarakat Papua dengan PT Freeport Indonesia, konflik masyarakat Aceh dengan Exxon Mobile yang mengelola gas bumi di Arun, pencemaran lingkungan oleh Newmont di Teluk Buyat, dan sebagainya. Alasan lainnya adalah kewajiban CSR juga sudah diterapkan pada perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Perusahaan-perusahaan pelat merah itu, wajib memberikan bantuan kepada pihak ketiga dalam bentuk pembangunan fisik. Kewajiban itu diatur dalam Keputusan Menteri BUMN maupun Menteri Keuangan sejak tahun 1997. "Oleh karena itu, kami berpikir bahwa perusahaan yang ada di Indonesia sudah waktunya turut serta memikirkan hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan dimana perusahaan itu berada.

D. KESIMPULAN

Penerapan Tata Kelola Perusahaan kian menjadi faktor penentu yang strategis bagi perusahaan agar dapat senantiasa meningkatkan nilai serta memelihara proses pertumbuhan yang berkelanjutan. Oleh karenanya, setiap perusahaan perlu terus meningkatkan kerja kerasnya agar dapat mengambil manfaat dari Penerapan Tata Kelola Perusahaanyang baik. Percayalah, kita mampu jika kita memang sungguh-sungguh mau melakukannya.

Jika prinsip GCG ini dilaksanakan secara sungguh-sungguh, bisa dipastikan perusahaan akan memiliki landasan yang kokoh dalam menjalankan bisnisnya. Secara eksternal, perusahaan akan lebih dipercaya investor, yang berarti nilai pasar sahamnya

akan terus membubung. Mitra kerja pun tak ragu mengembangkan hubungan bisnis lebih luas lagi. Para pemasok memiliki pegangan yang jelas dan terpercaya serta yakin akan diperlakukan secara adil sehingga bisa memberikan harga yang terbaik, yang berarti menciptakan efisiensi bagi perusahaan. Para kreditor pun memiliki kepercayaan tinggi untuk mengucurkan kreditnya yang mungkin kita perlukan buat perluasan usaha.

Secara internal, suasana kerja juga menjadi lebih kondusif. Karena dengan menerapkan GCG secara benar dan konsisten, berarti perusahaan sudah menerapkan sistem pengelolaan perusahaan sesuai dengan pembagian peran masing-masing, di tingkatan direksi, komisaris, komite-komite, dan lain-lain serta aturan main yang baku berdasarkan prinsip GCG tadi. Tak kalah pentingnya, terciptanya keseimbangan kekuatan di antara struktur internal perusahaan -- direksi, komisaris, komite audit, dan lain sebagainya. Sehingga, pengambilan keputusan bisa menjadi lebih dipertanggungjawabkan (accountable), juga hati-hati dan bijaksana (prudent).

Bukan rahasia lagi, hingga saat ini praktik korupsi, penggelembungan biaya, kolusi serta nepotisme masih tumbuh subur dan terus dipupuk di banyak perusahaan swasta atau pemerintah. Penerapan GCG ini sebenarnya merupakan antibiotik yang sangat ampuh untuk memberantas praktik-praktik yang menciptakan radang yang merongrong perusahaan tersebut yang pada gilirannya merugikan konsumen karena adanya praktik biaya ekonomi tinggi. Mengingat manfaatnya itu, para otoritas GCG perlu lebih agresif lagi mendorong penerapan GCG, terutama di perusahaan publik, lembaga keuangan nonpublik dan BUMN.

Tidak bisa diingkari, masih banyak penerapan GCG yang sekadar untuk kosmetik atau mendongkrak citra perusahaan dan tak konsisten untuk jangka panjang. Karena itu, perlu komitmen yang lebih tinggi lagi terutama dari pimpinan dan pemilik perusahaan. Begitu pula, survei seperti ini pun selalu mempunyai kelemahan, karena tak bisa sebebaskan-bebasnya menguak apa yang tersembunyi di balik tameng rahasia perusahaan. Kita ingat, Bank BNI menempati peringkat ke-7 CGPI 2002, yang berarti perusahaan ini cukup bagus menerapkan prinsip GCG. Faktanya, pada 2003 terbongkar kasus skandal Rp 1,7 triliun yang melibatkan pejabat bank ini. Semoga, tim IICG dan SWA semakin cermat dalam menilai implementasi GCG suatu perusahaan sehingga kasus serupa tak akan terulang.

Para pendiri Perseroan memberikan dukungan untuk menjadikan Perseroan sebagai warga korporasi yang baik dan bermanfaat bagi Bangsa dan Negara di samping untuk meningkatkan nilai perusahaan. Seluruh jajaran manajemen dan organisasi Perseroan berkeyakinan teguh bahwa tujuan tersebut hanya dapat dicapai jika penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan, yaitu sebagai bagian dari sikap keseharian atau budaya perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Black, B., Jang, H., dan Kim, W. (2003) : Does *corporate governance* Affect Firm Value? Evidence from Korea, Research Paper Series,, KDI School of Public Policy and Management, 05/11.
- Daniri, 2008, Saatnya Berubah Dengan GCG, *Bisnis Indonesia*, Edisi: 30-MAR-2008
- Daniri dan Angela, 2008, Membangun GCG melalui perubahan Kultur, <http://www.madani-ri.com/2008/11/21>.
- Djarmiko, H.E. (2004) : Ada Kemajuan, Banyak Keprihatinan, SWA, XX, 4.
- Bagus, Indro SU, 2008, 69,3% Bank Belum Penuhi GCG, *detik Finance*, diakses Rabu, 27/02/2008 11:02 WIB.
- Indaryanto, K.G. (2004) : Konsepsi *Good corporate governance*, dalam Suprayitno, G., Indaryanto, K.G, Yasni, S., Krismatono, D., Rita, L., dan Rahayu, R.G., *Komitmen Menengakkan Good corporate governance*, The Indonesian Institute for *corporate governance*, Jakarta, Indonesia.
- Kotler, P. (2005) : *Corporate Social Responsibility: Doing the Most Good for Your Company and Your Cause*, John Wiley & Sons, Inc., United State of America.
- Learmount, S. (2002) : Theorizing *corporate governance* New Organizational Alternatives, *Journal of Interdisciplinary Economics*, 14, 1, 159 – 173.
- Maher, M. dan Andersson, T. (2000) : *corporate governance: Effect on Firm Performance and Economic Growth*, Paper Series, *Social Science Research Network*.
- McKinsey & Company,(2002): Global Investor Survey: Key Findings, <http://mckinsey.com/...../organizaationleadership/service/corpgovernance/GlobalInvestorOpinionSurvey2002.pdf>.
- Mohamad Fajri dan Sofyan,Djalil, 2006, Penilaian GCG Perbankan, *Harian Suara Karya*, Kamis 16 Maret 2006.
- Sulistiyanto 2003, *GOOD corporate governance: Berhasilkah Diterapkan Di Indonesia?* *Jurnal Widya Warta*, No.2 Tahun XXVI.
- Susana Iriyani, 2008, penerapan tata kelola usaha, internet, diakses Rabu, 2 April 2008, 12:09.

Susanti, Aries, 2008, Hubungan Antara Fungsi Elemen Organisasi dengan Terwujudnya Prinsip *Good corporate governance*. Institute Teknologi Bandung.

Syakhroza, A. (2003) : Best Practices *corporate governance* dalam Konteks Kondisi Lokal Perbankan Indonesia, Aritkel, 32, 5, 16 – 24, <http://lib.pascafe.ui.ac.id/opac/>

Teguh Poeradisastrta, 2005, GCG, Antibiotik yang Ditakuti Perusahaan, internet, Kamis, 28 April 2005.

Umar Farouk, 2001, Tinjauan Kritis Implementasi GCG di Indonesia Majalah *Jurnal Bank & Manajemen*, Jakarta.

PERBEDAAN PERSEPSI MAHASISWA AKUNTANSI SEMESTER AWAL DAN SEMESTER AKHIR TERHADAP PROFESI AKUNTAN (Studi Kasus di Fakultas Ekonomi Universitas Lampung)

Pigo Nauli⁶

ABSTRAK

Research titling "The difference perception between the early and the late university student to accountant profession" was reinvestigated by narrowing the number of samples, that is university student of economics faculty majoring in accountancy to see more clearly the level of difference existing between both the groups with narrower space. The aim of research is to test the difference perception between the early and the late university student to accountant profession, which in this context was limited on 4 aspects, namely job opportunity, income, professionalism, and carrier choice.

Analysis was taken from 60 research respondents consisting of 30 early university students and 30 late university students. The data were collected by distributing the questioners on stratified random sampling. The data were analyzed by using Mann Whitney (U-test) and T-test. To examine the difference perception both university students, the validity and reliability test were added, to test both the accuracy and consistency of the data's

Keywords: perception, accountant profession, university student

A. PENDAHULUAN

Pendidikan akuntansi sekarang ini mengalami perkembangan yang sangat luar biasa, apalagi di era globalisasi saat ini. Kebutuhan perusahaan terhadap laporan keuangan sebagai alat evaluasi kinerja dan bahan pertimbangan pengambilan keputusan semakin membutuhkan sumber daya manusia yang banyak dan kompeten untuk dapat mewujudkan laporan keuangan tersebut. Diperkuat lagi adanya peraturan perundang-undangan pemerintah yang sengaja dikeluarkan untuk memenuhi tanggung jawab fiskal mereka kepada pihak pemerintah. Peraturan ini mewajibkan mereka untuk membuat laporan keuangan. Tuntutan ini mengarahkan mereka untuk memiliki unit atau departemen tertentu yang khusus bertanggung jawab untuk menyelesaikan laporan tersebut. Dampak ini melatarbelakangi para civitas akademik untuk mempersiapkan tenaga ahli yang diharapkan mampu menyelesaikan tugas-tugas tersebut.

Dalam perkembangannya profesi akuntan memang sangat diminati para lulusan sekolah menengah, hasil SPMB (Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru) sekarang

⁶ Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Lampung

berubah mejadi Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negri (SNMPTN) menunjukkan bahwa selama lima tahun terakhir rating Jurusan Akuntansi sangat dimininati para siswa. Hal ini menunjukkan adanya antusiasme sebagian mereka untuk memilih Jurusan Akuntansi. Umumnya para mahasiswa mempercayai bahwa profesi akuntan sangat diminati karena beberapa alasan yang selama ini dapat mereka lihat sendiri di lapangan bagaimana kehidupan mereka yang bekerja pada profesi akuntan telah menghantarkan kepada kehidupan yang lebih baik, profesi akuntan sangat memberikan peluang buat mereka untuk bisa memperoleh penghasilan yang cukup memadai, prestise dalam lingkungan keseharian, dan kesempatan atau peluang kerja yang masih sangat terbuka lebar di bidang studi ini. Hal ini juga menjadikan lembaga-lembaga pendidikan non pemerintah berlomba-lomba untuk menjadikan banyak sarjana akuntansi, maka beberapa universitas swasta banyak yang membuka jurusan ini dan tercatat banyak mahasiswa yang tidak terjaring melalui program seleksi penerimaan mahasiswa baru (SPMB) untuk perguruan tinggi negri memilih untuk meneruskan pendidikannya ke perguruan tinggi swasta yang membuka jurusan Akuntansi.

B. KERANGKA PEMIKIRAN

Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang maha Esa telah dianugrahi kemampuan untuk menilai atau menentukan jalan hidup yang terbaik bagi dirinya, dengan memanfaatkan akal dan hati nurani sebagai rahmat pemberian-Nya. Hal inilah yang menyebabkan perbedaan persepsi tiap-tiap manusia. Menurut sumber Rahmat Jalaluddin, persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan mengumpulkan informasi dan menafsirkan pesan atau dengan perkataan lain memberikan makna pada stimula indrawi.

Persepsi atas pekerjaan atau profesi adalah sudut pandang individu terhadap pekerjaan yang akan dilakukannya. Pekerjaan merupakan sekumpulan tugas dan atau posisi yang memiliki kesamaan kewajiban dan tugas-tugas pokok dalam suatu organisasi atau profesi merupakan urutan pekerjaan utama yang diduduki seseorang sejak remaja sampai pensiun selama rentang kehidupan (Healy, 1982:8).

Profesi akuntan menurut Theodorus Tuannakotta terbagi empat kelompok besar yaitu Akuntan Publik, Akuntan Interen Perusahaan, Akuntan Pemerintah, dan Akuntan Pendidik. Horngren, Harrison, Robimson, dan Secokusumo (1997), membagi posisi akuntansi dalam bidang akuntansi menjadi dua area pengelompokan yang umum, pembagian tersebut adalah akuntan intern perusahaan dan akuntan publik.

C. PERMASALAHAN DAN BATASAN MASALAH

Sarjana dari Jurusan Akuntansi memiliki kekhususan tersendiri dibanding sarjana dari jurusan lain, karena lulusan sarjana Akuntansi dapat lebih leluasa berkiprah kemudian dijadikan sebagai profesi. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa profesi akuntan banyak diminati oleh para lulusan sekolah menengah, sehingga jurusan Akuntansi menjadi pilihan favorit bagi mereka untuk meneruskan ke jenjang perguruan tinggi. Dilain hal sebagian besar mahasiswa yang sudah mengikuti perkuliahan dalam proses yang cukup panjang mulai memahami dan mengetahui persoalan yang nyata ada pada dunia profesi akuntan dari berbagai aspek diantaranya: serapan tenaga kerja, besar penghasilan, pendidikan profesi akuntansi, pembagian profesi (Akuntan Publik, Akuntan Pendidik, Akuntan Manajemen, Analisis Pasar Modal, dll), dan aktivitas lainnya.

Pada penelitian ini penulis bermaksud memberikan batasan-batasan untuk menciptakan fokus penelitian yang lebih akurat. Batasan masalah yang dilakukan yaitu melakukan analisa terhadap perbedaan persepsi antara para mahasiswa Akuntansi semester awal (semester 1) dan mahasiswa semester akhir (semester 7) di Fakultas Ekonomi Universitas Lampung terhadap profesi akuntan pada empat aspek yaitu: kesempatan kerja yang tersedia untuk para lulusan sarjana Akuntansi, penghasilan, Pendidikan Profesi Akuntan (PPA), dan pilihan profesi/karir.

Berdasarkan kerangka pemikiran, permasalahan dan batasan masalah tersebut maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

- H01 = Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara persepsi mahasiswa akuntansi semester awal dan semester akhir terhadap kesempatan kerja untuk sarjana Akuntansi
- Ha1 = Terdapat perbedaan persepsi yang signifikan antara mahasiswa semester awal dan semester akhir terhadap kesempatan kerja untuk sarjana Akuntansi.
- H02 = Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara persepsi mahasiswa akuntansi semester awal dan semester akhir terhadap besaran gaji untuk sarjana Akuntansi
- Ha2 = Terdapat perbedaan persepsi yang signifikan antara mahasiswa semester awal dan semester akhir terhadap besaran gaji untuk sarjana Akuntansi
- H03 = Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara persepsi mahasiswa akuntansi semester awal dan semester akhir terhadap profesionalisme kerja
- Ha3 = Terdapat perbedaan persepsi yang signifikan antara mahasiswa semester awal dan semester akhir terhadap profesionalisme kerja

H04 = Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara persepsi mahasiswa akuntansi semester awal dan semester akhir terhadap pilihan profesi/karir akuntan

Ha4 = Terdapat perbedaan persepsi yang signifikan antara mahasiswa semester awal dan semester akhir terhadap pilihan profesi/karir akuntan

D. DESAIN PENELITIAN

1. Metodologi Penelitian

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data dilakukan dengan dua cara yaitu pengumpulan data sekunder dengan penelitian kepustakaan dan pengumpulan data primer dengan observasi langsung dan penyebaran kuisioner.

2. Uji Coba Alat Ukur Instrumen

Alat ukur/instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuisioner. Sebelum disebar kepada responden maka pertamakali yang dilakukan adalah menguji instrumen tersebut. Tujuannya adalah untuk menilai sejauh mana butir-butir pertanyaan dapat dipahami dan dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Pengujian dilakukan dengan menetapkan sampel dari populasi dengan menggunakan teknik acak berdasarkan strata (Stratified random sampling) yaitu Pemilihan sampel secara acak dilakukan dengan terlebih dahulu mengklasifikasikan suatu populasi ke dalam sub-sub populasi berdasarkan karakteristik tertentu dari elemen-elemen populasi (misal jenis kelamin, jenis industri, tahun angkatan). Sampel kemudian dipilih dari sub populasi dengan metode acak sederhana. (Nur Indriantoro dan Bambang Supomo :1999).

Kemudian kuisioner disebar dan dilakukan uji validitas dan reabilitas. Uji validitas digunakan untuk mengetahui apa yang seharusnya diukur dan bukan mengukur sesuatu yang lain, Sekaran, dalam Suprihatin (2000). Menggunakan rumus correlation produk moment

$$r_{xy} = \frac{n \cdot \sum xy - \sum x \cdot \sum y}{\sqrt{n \cdot \sum x^2 - (\sum x)^2} \left[\sum y^2 - (\sum y)^2 \right]}$$

dimana :

r = Koefisien korelasi antara x dan y

x = Jumlah skor variabel x

y = Jumlah skor variabel y

xy = jumlah hasil kali antara x dan y

n = jumlah responden

Bila $r_{hitung} > r_{tabel}$ berarti pertanyaan dalam kuisioner adalah valid dan dapat digunakan sebagai alat ukur

Sementara uji realibilitas Pengujian reabilitas adalah berkaitan dengan masalah adanya kepercayaan terhadap alat test (instrumen). Suatu pertanyaan dapat memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi jika hasil pengujian pertanyaan tersebut menunjukkan hasil yang tetap (konsisten). Uji reabilitas digunakan untuk melihat stabilitas dan konsistensi instrumen dalam mengukur konsep, Sekaran dalam Suprihatin (2000). Pengujian reabilitas ini dilakukan dengan uji statistik yaitu dengan teknik Alpha Cronbach, rumus untuk koefien alpha:

$$\alpha = \left[\frac{k}{k-1} \right] \left[1 - \frac{\sum S_j^2}{S_x^2} \right]$$

dimana:

- lambi = reliabilitas yang dicari
- K = Banyaknya belahan test
- Sj = varians belahan j (j=1,2)
- Sx = Varians skore test

Selanjutnya indeks reliabilitas diinterpprestasikan dengan menggunakan tabel interpretasi r, untuk menyimpulkan bahwa alat ukur yang digunakan cukup reliabel atau tidak. Pada penelitian ini validitas dan reliabilitas data di uji dengan menggunakan SPSS (Statistical Package for the Social Sciens)

3. Alat Analisis

Analisis dilakukan dengan model kualitatif yang menghasilkan data deskriptif yaitu berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati, analisis ini di dukung dengan studi dan literatur atau kepustakaan berdasarkan pendalaman kajian pustaka berupa data dan angka, sehingga realitas dapat dipahami.

Kemudian dilakukan analisis kuantitatif dengan menggunakan alat uji beda rata-rata dengan menggunakan alat statistik Uji Normalitas dan Uji Mann Whitney (U-Test) dan Uji T-test

Rumus Mann-Whitney (U-test)

$$U_1 = n_1 \cdot n_2 + \frac{n_1 (n_1 + 1)}{2} - R_1$$

dan

$$U_2 = n_1 \cdot n_2 + \frac{n_2 (n_2 + 1)}{2} - R_2$$

dimana :

- n1 = jumlah sampel 1
- n2 = jumlah sampel 2
- U1 = jumlah peringkat 1
- U2 = jumlah peringkat 2
- R1 = Jumlah rangking pada sampel n1
- R2 = Jumlah rangking pada sampel n2

Pengujian hipotesis dengan menggunakan uji Mann-Whitney U (U-test) pada tingkat keyakinan 95% ($\alpha = 0,05$) dapat dilihat dari hasil tingkat signifikansi (p-value/Asymp. Sig)

Keputusan :

Apabila p-value/asysimp. sig < $\alpha = 0.05$ maka Ho ditolak dan Ha diterima

Apabila p-value/asysimp. sig > $\alpha = 0.05$ maka Ho diterima dan Ha ditolak

Rumus T-test.

$$t = \frac{(\bar{x}_1 - \bar{x}_2)}{Sx_1 - Sx_2}$$

Dimana:

= rata-rata X1

= rata-rata X2

$Sx_1 - Sx_2$ = standard.error.beda

Pengujian hipotesis dengan menggunakan uji-t pada tingkat keyakinan 95% dan tingkat kesalahan 5%, dengan ketentuan degree of freedom (d.f) = $n1 + n2 - 2$ atau dapat dilakukan juga dengan melihat p- value, maka keputusan

Apabila $t_{hit} > t_{tabel}$: Ho ditolak dan Ha diterima, $\alpha=0,05$, df $n1 + n2 - 2$

Apabila $t_{hit} < t_{tabel}$: Ho diterima dan Ha ditolak, $\alpha 0,05$; df $n1 + n2 - 2$

Atau

Apabila p-value/asysimp. sig < $\alpha = 0.05$ maka Ho ditolak dan Ha diterima

Apabila p-value/asysimp. sig > $\alpha = 0.05$ maka Ho diterima dan Ha ditolak

E. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Pengujian Instrumen Penelitian

Uji validitas pada kuisioner kepada 30 responden yang telah ditentukan sebelumnya. Pengujian ini disebut juga construct validity, construct validity dilakukan dengan menggunakan SPSS (statistical package for the Sosial Sciens), dengan menggunakan rumus Person correlation/Produk momen. Instrumen/pertanyaan dikatakan memiliki validitas yang baik bila $r_{\text{hitung}} > r_{\text{tabel}}$. (r_{tabel} untuk $N=30$ dengan taraf keyakinan 5% adalah 0,361)

Pada tabel berikut dapat dilihat uji validitas untuk butir-butir pertanyaan tentang profesi akuntan. Tabel 8 terlihat bahwa nilai r hitung untuk pertanyaan tentang variabel kesempatan kerja berkisar antara 0,456 sampai dengan 0,665 ini menunjukkan bahwa butir-butir pertanyaan memiliki validitas yang baik karena berada di atas 0,361.

Tabel 8. pertanyaan yang berstatus valid.

No	Variabel	Pertanyaan	r_{hitung}	r_{tabel}	Status
1	Kesempatan Kerja/Peluang karir (X_1)	1	0,574	0,361	valid
		2	0,456	0,361	valid
		3	0,595	0,361	valid
		4	0,502	0,361	valid
		5	0,665	0,361	valid
2	Besarnya penghasilan/Penhargaan (X_2)	6	0,373	0,361	valid
		7	0,393	0,361	valid
		8	0,596	0,361	valid
		9	-0,196	0,361	tidak valid
		10	0,004	0,361	tidak valid
3	Profesionalise (X_3)	11	-0,006	0,361	tidak valid
		12	0,466	0,361	valid
		13	0,39	0,361	valid
		14	0,545	0,361	valid
		15	0,656	0,361	valid
		16	0,652	0,361	valid
		17	0,465	0,361	valid
4	Pilihan Karir/profesi (X_4)	18	0,373	0,361	valid
		19	0,467	0,361	valid
		20	0,628	0,361	valid
		21	0,372	0,361	valid
		22	0,621	0,361	valid

Kemudian butir-butir pertanyaan untuk variabel penghasilan berkisar antara 0,373 sampai dengan 0,596, kecuali untuk butir pertanyaan sembilan, sepuluh dan sebelas

yang memiliki nilai r hitung $-0,196$; $0,004$, dan $-0,006$. karena kurang dari nilai $0,361$ maka ke 3 butir pertanyaan ini tidak valid, sehingga butir-butir pertanyaan tersebut tidak dimasukkan ke dalam uji reliabilitas, uji normalitas dan uji hipotesis. Sedangkan butir-butir pertanyaan untuk variabel profesionalisme dan variabel pilihan karir berkisar antara $0,372$ sampai dengan $0,656$. ini menunjukkan untuk kedua variabel ini memiliki validitas yang baik. Jadi secara umum semua butir pertanyaan untuk semua variabel adalah valid.

Pengujian reliabilitas ini dilakukan dengan uji statistik yaitu dengan teknik Alpha Cronbach, tes ini merupakan pengujian konsistensi jawaban terhadap semua item pertanyaan dalam kuisisioner. Teknik ini dipilih karena merupakan teknik pengujian yang paling populer dan menunjukkan indeks konsistensi reliabilitas antar item pertanyaan yang cukup sempurna.

Adapun hasil pengujian dapat dilihat pada lampiran uji reliabilitas dengan hasil perolehan koefisien reliabilitas sebesar $0,845$. Artinya pertanyaan dalam kuisisioner memiliki ketepatan sebesar 84% dan kesalahan pengukuran 16% karena disebabkan faktor-faktor lain dalam penelitian. Nilai koefisien reliabilitas tersebut dikonsultasikan dengan menggunakan tabel interpretasi nilai r . Karena nilai koefisien reliabilitas $0,8451$ maka posisinya berada pada nilai r tabel diantara $0,800$ hingga $0,1000$. Dengan demikian dapat diartikan bahwa alat ukur yang digunakan dapat dipercaya.

Diskripsi data dan Hasil Penelitian

data-data yang didapatkan berupa data primer yang berasal dari hasil penyebaran kuisisioner kepada 60 responden terpilih melalui mekanisme pemilihan acak sederhana terhadap dua kelompok sampel yaitu mahasiswa akuntansi semester awal dan semester akhir, kuisisioner yang kembali adalah 60 eksemplar atau 100% tingkat pengembalian. Hal yang menyebabkan tingginya tingkat pengembalian kuisisioner adalah bantuan dosen mata kuliah karena penyebaran kuisisioner memanfaatkan momen pengajaran di dalam kelas.

Selanjutnya setelah kuisisioner ini terkumpul adalah melakukan penyeleksian, hal ini dilakukan guna mengetahui kelengkapan jawaban dari tiap kuisisioner yang diisi. Dari hasil seleksi yang dilakukan. Setelah kuisisioner tersebut diseleksi tahap selanjutnya adalah memberikan kode kepada tiap eksemplar kuisisioner, hal ini dilakukan guna menghindari pengulangan memasukkan data dalam kuisisioner yang akan dianalisis.

Demografi responden yang mengirim kembali dapat dilihat dalam tabel 5 Dari tabel tersebut terlihat bahwa responden didominasi oleh perempuan yaitu sekitar 75% (24 responden semester awal dan 21 semester akhir) sisanya sebesar 25% adalah laki-laki, pendidikan terakhir mereka selepas Sekolah Menengah Umum banyak berasal dari Lampung yaitu $68,3\%$, sedangkan dari luar Lampung sebesar $31,7\%$. Jumlah semester awal yang menjadi responden sebanyak 30 orang (100%) adalah semester satu, sedangkan jumlah semester akhir yang menjadi responden sebanyak 27 orang (90%)

dari semester tujuh dan 3 orang (10%) dari semester 9. Keberadaan semester 9 diduga mereka mengikuti perkuliahan Teori Akuntansi bersama semester 7.

Pada tabel juga menunjukkan pilihan mahasiswa semester awal dan semester akhir terhadap profesi akuntan, semester awal dan semester akhir lebih menyukai untuk menjadi akuntan manajemen atau profesi akuntan yang bekerja pada perusahaan, 56,8% mahasiswa semester awal memilih untuk menjadi akuntan manajemen, 20% memilih untuk menjadi akuntan publik, sedangkan untuk mahasiswa semester akhir lebih mendominasi yaitu 66,7% dari 30 responden memilih untuk menjadi akuntan manajemen, sebesar 26,7% memilih untuk menjadi akuntan publik sedangkan sisanya memilih untuk menjadi staf ahli perpajakan (3,3%) dan akuntan pendidik (3,3%)

Tabel 5 Profil Responden

Semester awal	No	%	Semester akhir	No	%	Total	%
1. Jenis Kelamin			1. Jenis Kelamin				
a. Laki-laki	6	20	a. Laki-laki	9	30	15	25
b. Perempuan	24	80	b. Perempuan	21	70	45	75
Total	30	100	Total	30	100	60	100
2. Riwayat Pendidikan			2. Riwayat Pendidikan				
a. SMU asal Lampung	26	13,3	a. SMU asal Lampung	15	50	41	68,3
b. SMU luar Lampung	4	86,7	b. SMU luar Lampung	15	50	19	31,7
Total	30	100	Total	30	100	60	100
3. Konsentrasi Pilihan			3. Konsentrasi Pilihan				
a. Manajemen	2	6,7	a. Manajemen	17	56,7	19	31,7
b. Keuangan	28	93,3	b. Keuangan	13	43,3	41	68,3
Total	30	100	Total	30	100	60	100
4. Jumlah SKS			4. Jumlah SKS				
a. < 50	30	100	a. < 50	0	0	30	50
b. 50-100	0	0	b. 50-100	0	0	0	0
c. > 100	0	0	c. > 100	30	100	30	50
Total	30	100	Total	30	100	60	100
5. Semester			5. Semester				
a. satu	30	100	a. satu	0	0	30	50
b. Tujuh	0	0	b. Tujuh	27	90	27	90
c. Sembilan	0	0	c. sembilan	3	10	3	10
Total		100	Total	30	100	60	100
6. Pilihan Profesi			6. Pilihan Profesi				
a. Akuntan Publik	6	20	a. Akuntan Publik	8	26,7	14	23,3
b. Akuntan Manajemen	17	56,8	b. Akuntan Manajemen	20	66,7	37	61,7
c. Akuntan Pemerintah	2	6,6	c. Akuntan Pemerintah	0	0	2	3,3
d. Akuntan Pendidik	2	6,6	d. Akuntan Pendidik	1	3,3	3	5
e. Analis Pasar Modal	0	0	e. Analis Pasar Modal	0	0	0	0
f. Staf Ahli Perpajakan	3	10	f. Staf Ahli Perpajakan	1	3,3	4	6,7
Total	30	100	Total	30	100	60	100

Hasil Perhitungan dan Analisis Deskriptif

Gambaran umum tentang sampel yang diobservasi dapat dilihat dari tabel 6 berikut ini. Data pada tabel 6 menunjukkan bahwa mean kesempatan kerja adalah 3,14, mean besar penghasilan adalah 2,53, mean profesionalisme 3,13, mean pilihan karir 3,53 dan mean secara keseluruhan adalah 3,08.(batas range sangat memadai)

Tabel 6. Statistik Deskriptif

Variabel	Mean	Jumlah Pertanyaan	Min	Mak	Sum
Kesempatan Kerja	3,14	5	1	4	943
Besar Penghasilan	2,53	6	1	4	922
Profesionalisme	3,13	7	1	4	1313
Pilihan Karir	3,53	4	1	4	848
Mean Keseluruhan	3,08	22			

Sumber : lampiran 8 (data diolah)

Sedangkan diskripsi penilaian dapat dilihat pada tabel 7 tabulasi dibawah ini, tabulasi penilaian digunakan sebaga alat untuk menguji data secara kualitatif yang bersifa argumentataif dari penulis.

Tabel 7 Tabulasi Nilai Persepsi Mahaiswa terhadap variabel

Variabel	Ptn	Tanggapan Responden (%)									
		Semester Awal					Semester Akhir				
		TS	KS	S	SS	TTL	TS	KS	S	SS	TTL
Kesempatan Kerja	1	0	0	40	60	100	0	10	63,3	26,7	100
	2	3,3	3,3	53,3	40	100	0	3,3	70	26,7	100
	3	0	6,7	73,3	20	100	0	16,7	50	33,3	100
	4	3,3	33,3	50	13,4	100	3,3	23,3	46,7	26,7	100
	5	3,3	6,7	56,7	33,3	100	0	23,3	60	16,7	100
Penghasilan	6	0	23,3	60	16,7	100	0	36,7	50	13,3	100
	7	3,3	26,7	33,3	36,7	100	3,3	40	23,3	33,4	100
	8	0	3,3	46,7	50	100	0	26,6	43,3	30	100
	9	60	30	10	0	100	46,7	46,7	6,6	0	100
	10	3,3	16,7	63,3	16,7	100	6,7	23,3	60	10	100
Profesionalisme	11	46,7	43,3	6,7	3,3	100	23,3	40	30	6,7	100
	12	3,3	20	60	16,7	100	6,7	43,3	43,3	6,7	100
	13	3,3	23,3	33,4	40	100	10	46,7	30	13,3	100
	14	3,3	3,3	60	33,4	100	6,7	10	60	23,3	100
	15	0	3,3	60	36,7	100	3,3	13,4	63,3	20	100
	16	0	16,7	50	33,3	100	0	20	56,7	23,3	100
	17	0	0	33,3	66,7	100	0	6,7	40	53,3	100
Pilihan Karir	18	0	0	50	50	100	0	3,3	46,7	50	100
	19	0	0	80	20	100	0	0	40	60	100
	20	0	0	40	60	100	0	0	56,7	43,3	100
	21	0	6,7	40	53,3	100	3,3	16,7	56,7	23,3	100
	22	0	0	13,3	86,7	100	0	0	40	60	100

Sumber Lampiran 8 (Data diolah)

Keterangan :

- TS = Tidak Setuju
 KS = Kurang Setuju
 S = Setuju
 SS = Sangat Setuju

Hasil Perhitungan dan Pengujian Hipotesis

Untuk menjawab hipotesis yang diajukan, dasar argumentasi yang digunakan adalah hasil perhitungan statistik yang ditunjukkan pada tabel

Tabel 9. Hasil perhitungan Persepsi Mahasiswa Semester Awal dan Semester Akhir

Pertanyaan tentang Profesi akuntan	t-test			Mann Withney	
	t-value	t-tbel	p-value	z-value	p-value
Kesempatan kerja (pertanyaan no 1s.d 5)	-0,921	1,670	0,361	-0,887	0,375
Penghasilan (pertanyaan no 6 s.d 9)	-2,106	1,670	0,04	-2,14	0,032
Profesionalisme (pertanyaan no12 s.d18)	-2,516	1,670	0,015	-2,375	0,018
Pilihan profesi (pertanyaan no 19 s.d 22)	-2568	1,670	0,013	-2,326	0,02

Sumber: Lampiran 3

Hasil perhitungan hipotesis 1

Dapat dilihat pada tabel 9 menunjukkan bahwa angka yang terdapat pada kolom p-value pada uji-t-test dan mann witney adalah 0,361 dan 0,375 (diatas 0,05) atau nilai t hitung (0,921) lebih kecil dari nilai t-tabel (1,670), yang berarti bahwa H_0 diterima, H_a ditolak. Ini berarti menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara persepsi mahasiswa akuntansi semester awal dan semester akhir terhadap kesempatan kerja. (peluang pekerjaan untuk sarjana akuntansi).

Hasil perhitngan hipotesis 2

Berdasarkan tabel 9 lampiran dapat disimpulkan bahwa dari pengujian dengan menggunakan t-test maupun dengan menggunakan Mann Withney (U-test) menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara persepsi mahasiswa akuntansi semester awal dan semester akhir terhadap penghasilan . Ini dapat dilihat pada kolom p-value pada uji t-test dan Mann Withney (U-test) adalah 0,04 dan 0,032 (di bawah 0,05) atau nilai t hitung (2,106) lebih besar dari nilai t-tabel (1,670), yang berarti bahwa H_0 ditolak , H_a diterima.

Hasil perhitngan hipotesis 3

Berdasarkan tabel 9 lampiran dapat disimpulkan bahwa dari pengujian dengan menggunakan t-test maupun dengan menggunakan Mann Withney (U-test) menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara persepsi mahasiswa akuntansi

semester awal dan semester akhir terhadap profesionalisme dalam hal keinginan untuk meneruskan ke pendidikan profesi akuntan dan keinginan mengikuti pelatihan-pelatihan yang diharapkan mampu meningkatkan keterampilan/profesional. Ini dapat dilihat pada kolom p-value pada uji t-test dan Mann Withney adalah 0,015 dan 0,018 (di bawah 0,05) atau nilai t hitung (2,516) lebih besar dari nilai t-tabel (1,670), yang berarti bahwa H_0 ditolak, H_a diterima.

Hasil perhitungan hipotesis 4

Berdasarkan tabel 9 dapat disimpulkan bahwa dari pengujian dengan menggunakan t-test maupun dengan menggunakan Mann Withney (U-test) menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara persepsi mahasiswa akuntansi semester awal dan semester akhir terhadap pilihan profesi/karir. Ini dapat dilihat pada kolom p-value pada uji t-test dan Mann Withney (U-test) adalah 0,013 dan 0,02 (di bawah 0,05) atau nilai t hitung (2,568) lebih besar dari nilai t-tabel (1,670), yang berarti bahwa H_0 ditolak, H_a diterima.

F. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Dari hasil analisis dan pembahasan mengenai perbedaan persepsi mahasiswa semester awal dan semester akhir terhadap profesi akuntansi dengan melakukan uji t-test dan uji Mann Withney pada tingkat kepercayaan 95 % dapat diambil beberapakesimpulan sebagai berikut

- a. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara mahasiswa Akuntansi semester awal dan semester akhir terhadap kesempatan kerja yang tersedia untuk para sarjana akuntansi. Ini dibuktikan dengan nilai p-value $> 0,05$ yakni sebesar 0,361 untuk uji t-test dan sebesar 0,375 untuk U-test.
- b. Terdapat perbedaan yang signifikan antara mahasiswa semester awal dan semester akhir terhadap besar penghasilan yang akan mereka terima. Ini dibuktikan dengan nilai p-value $< 0,05$ yakni sebesar 0,04 untuk uji t-test dan 0,032 untuk uji U-test.
- c. Terdapat perbedaan yang signifikan antara mahasiswa semester awal dan semester akhir terhadap profesionalisme. Ini dibuktikan dengan nilai p-value $< 0,05$ yakni sebesar 0,015 untuk uji t-test dan 0,018 untuk uji U-test
- d. Terdapat perbedaan yang signifikan antara mahasiswa semester awal dan semester akhir terhadap pilihan profesi yang akan mereka terima. Ini dibuktikan dengan nilai p-value $< 0,05$ yakni sebesar 0,013 untuk uji t-test dan 0,02 untuk U-Test

Saran

Berdasarkan beberapa simpulan di atas dapat disampaikan saran-saran sebagai bahan pertimbangan bagi jurusan akuntansi khususnya dan Fakultas Ekonomi secara umum sebagai pihak yang berkepentingan untuk menciptakan para sarjana akuntansi yang bisa bersaing di pasar kerja

- a. Jurusan akuntansi harus melakukan sosialisasi atau memberikan pemahaman kepada mahasiswa khususnya mahasiswa semester akhir mengenai pendidikan profesi akuntan mengenai manfaat, tujuan, visi, misi serta harapan yang akan mereka dapatkan jika mengikuti program tersebut. mengingat simpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi mahasiswa semester akhir lebih rendah dibandingkan dengan mahasiswa semester awal.
- b. Jurusan akuntansi diharapkan bisa membuka komunikasi dan kerjasama ke berbagai pihak baik pemerintah maupun swasta untuk mengadakan program-program pendidikan dan pelatihan yang dikhususkan untuk para mahasiswa agar kemampuan dan keterampilan dalam bidang akuntansi, perpajakan para mahasiswa semakin baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Alhusin, Syahri. 2003. *Apilikasi Statistik Praktis Dengan Menggunakan SPSS 10 For Windows*. Graha ilmu. Yogyakarta.
- Alam, S. 2004. *Akuntansi Untuk SMA* kurikulum 2004 untuk kelea XI. Jakarta.
- Erlane, dkk. Differences Perception Towards Accounting Career Between First and final Year undergraduates: The Malaysian Scenario. *The 5th Indonesian Conference on Accounting* (September) Semarang, 2002.
- Nasir, Moh. 1999. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Nurgiyantoro, burhan dkk. 2002. *Statistik Terapan Untuk Penelitian Ilmu Sosial*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Pratomo, Aryo. 2001. *Persepsi mahasiswa fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi*. Universitas Lampung. Bandar Lampung.
- Rubyarto, May. 2004. *Analisis Minat Mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Lampung untuk memperoleh gelar Akuntan*. Bandar Lampung.

- Roswandy, Hendy. 2003. Analisis Kesipan Sumber Daya Manusia Pemerintah Daerah Dalam Membuat Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Universitas Lampung untuk memperoleh gelar Akuntan. Bandar Lampung.
- Seri Ekayani, Ni Nengah. Persepsi Akuntan Dan Mahasiswa Bali terhadap etika Bisnis. Symposium Nasional Akuntansi III. (Oktober) Surabaya, 2003.
- Siegel, Sidney. 1988. *Statistik Nonparametrik Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. PT Gramedia. Jakarta.
- Tuanakotta, Theodorus. M. 1997, *Auditing-petunjuk Pemeriksaan Akuntan Publik*, Jakarta. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.
- Yusuf, Muri, A. 2002. *Kiat Sukses dalam Karir*.Ghalia Indonesia. Padang.
- , 2002. "PPA: Usaha Menghasilkan Akuntan Profesional" *Media Akuntansi*, Edisi 28/Maret. Jakarta. Intan Artha Indonusa

WHY FIRMS DISCLOSE ENVIRONMENTAL INFORMATION? A REVIEW OF LITERATURE

Susi⁷

ABSTRACT

Tulisan ini bertujuan untuk membangun suatu kerangka konseptual yang menjelaskan bahwa visibilitas lingkungan (environmental visibility) adalah faktor utama mengapa perusahaan melakukan pengungkapan informasi lingkungan. Tulisan ini berpendapat bahwa untuk memelihara legitimasi dan mencegah terjadinya biaya politik, perusahaan-perusahaan yang visibel dalam masalah lingkungan (environmentally visible) akan mengungkapkan informasi lingkungan lebih banyak dibandingkan perusahaan-perusahaan yang tidak visibel dalam masalah lingkungan..

Dalam membangun kerangka konseptual ini, motif perusahaan untuk melakukan pengungkapan lingkungan dilihat dari dua perspektif, yaitu perspektif sosial dan perspektif ekonomi. Yang termasuk ke dalam perspektif sosial adalah teori-teori yang berdasarkan pada pendekatan-pendekatan etis atau normatif, seperti teori pemangku kepentingan (stakeholder theory), teori akuntabilitas (accountability theory) dan teori legitimasi (legitimacy theory). Termasuk di dalam perspektif ekonomi adalah teori biaya pengungkapan sukarela (theory of proprietary cost of voluntary disclosures) dan teori biaya politik (political cost theory), yang secara murni berfokus pada analisis cost-benefit.

Menurut kedua perspektif tersebut, perusahaan-perusahaan yang riskan terhadap tekanan politik dalam bidang lingkungan hidup (misalnya perusahaan yang besar, industri yang sensitif terhadap lingkungan, dan berkinerja lingkungan yang buruk) akan menanggung biaya politik di bidang lingkungan. Perusahaan seperti ini dapat dikatakan sebagai perusahaan yang visibel dalam masalah lingkungan (environmentally visible firms). Perusahaan yang memiliki visibilitas lingkungan yang tinggi akan mengadopsi strategi-strategi untuk mengurangi biaya politik, misalnya dengan melakukan pengungkapan informasi lingkungan lebih banyak.

Keywords : environmental disclosure, environmental visibility, legitimacy, political cost, political pressures.

A. INTRODUCTION

This paper intends to develop a conceptual framework in which environmental visibility underpins a firm's motives for environmental disclosures. Essentially, this paper argues that to maintain legitimacy and avoid political costs, environmentally visible firms will disclose more environmental information more extensively. In developing the framework, firm incentives for environmental disclosure are

⁷ Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Lampung

considered from two perspectives widely used in the literature—the social and economic perspectives.

The social perspective includes theories that rely on ethical or normative approaches to environmental disclosure, such as stakeholder theory, accountability theory and legitimacy theory (e.g. Shocker 1973; Guthrie & Parker 1989; Elsbach & Sutton 1992; Roberts 1992; Clarkson 1995; Mitchell et al. 1997). The economic perspective includes the theory of proprietary cost of voluntary disclosures and political cost theory, which purely focus on cost-benefit analysis (Walden 1993; Yue et al. 1997; Bae 1998; Ahmad et al. 2003; Patten & Trompeter 2003; Clarkson et al. 2006). Under both perspectives, it is hypothesised that firms that are vulnerable to political pressure regarding environmental issues need to respond to their stakeholders by adopting strategies to reduce such pressures. These firms are referred to as environmentally visible.

B. FIRM INCENTIVES TO DISCLOSE ENVIRONMENTAL INFORMATION

Early attempts in the 1980s to explain why firms disclose environmental information associated environmental disclosure with environmental performance. Studies from this time present conflicting results (e.g. Ingram & Frazier 1980; Wiseman 1980; Wiseman 1982; Rockness 1985). Ullmann (1985) argues that one reason for the inconsistency was a lack of theory. As such, this researcher emphasised the importance of conceptualisation and the operationalisation of terms. Since the late 1980s, more attention has been placed on theoretical approaches to examine firm incentives for environmental disclosure (e.g. Freedman 1990; Roberts 1991; Patten 1992; Walden 1993; Deegan & Rankin 1996; Barth et al. 1997; Wilmshurst & Frost 2000; Deegan 2002; O'Donovan 2002; Patten 2002a). Most studies from this period have associated firm disclosure incentives with one of two perspectives—social or economic motives.

The social perspective of environmental disclosure rests mainly with legitimacy theory (Guthrie & Parker 1989; Elsbach & Sutton 1992; Patten 1992; Mathews 1993), stakeholder theory (Roberts 1992; Clarkson 1995; Mitchell et al. 1997), social contract theory (Shocker 1973) and accountability theory (Gray et al. 1988; Gray 1992). The economic perspective of environmental disclosure has two main branches—voluntary disclosure theory (Mitchell 1994; Yue et al. 1997; Clarkson et al. 2006) and political cost theory (Walden 1993; Bae 1998; Ahmad et al. 2003; Patten & Trompeter 2003; Nurhayati et al. 2006).

1. Social Perspective of Environmental Disclosure

Social theories that have emerged in the past decade are generally rooted in the concept of a social contract (e.g. Shocker 1973) between a social institution (including a business) and its society. This implies that corporations have an unwritten social obligation to act in the manner society expects (O'Donovan 2002). An ethical or normative approach seems inevitable from the social perspective. In the environmental disclosure context, this means that firms are obliged to undertake environmental initiatives as part of their corporate social responsibility (Deegan 2000; O'Dwyer 2002). Legitimacy theory and the managerial perspective of stakeholder theory also take a positive approach. They recognise how corporations undertake different strategies to manage the influence of different stakeholders and prioritize more powerful stakeholders.

Social theories view the disclosure of environmental information as a communication tool. This tool is used by corporations to convey their accountability and social responsibility and to maintain the legitimacy of operations that affect the environment and society. The following sections outline the approaches to corporate environmental disclosure from the social perspective—namely, stakeholder theory, accountability theory and legitimacy theory.

Stakeholder Theory

The principal focus of stakeholder theory is that corporations practicing stakeholder management will be relatively successful in conventional performance terms (e.g., profitability, stability and growth) (Donaldson & Preston 1995). Mitchell (Mitchell 1994) describes stakeholder theory as an attempt to identify which groups are stakeholders deserving or requiring attention and which are not. Their influence in the corporation's survival is highly recognized in social theories that seek to explain why corporations undertake environmental initiatives. Stakeholders include customers, suppliers, employees, shareholders, competitors, regulators, community and other elements of society. By identifying each stakeholder group and its interests, management is able to respond to the issues that might affect its existence (Clarkson 1995).

Stakeholder theory can be broken down into branches—the positive/managerial branch and the ethical/normative branch. The positive branch posits that organisations will respond to stakeholders asymmetrically, favouring the powerful or those who can have significant impact upon the organisation (O'Dwyer 2002). From a managerial perspective, the focus of stakeholder theory is to gain approval for corporate decisions by groups whose support is required for the firm to achieve its objectives (Tricker 1983). On the other hand, the ethical branch argues that 'all stakeholders have the right to be treated fairly by an organisation, and that issues of stakeholder power are not directly relevant' (Deegan 2000).

In other words, the managerial perspective focuses on the identification of important stakeholders and the assessment of such importance in attempts to achieve corporate objectives. The positive branch is similar to the economic perspective of environmental disclosure in that corporate decisions are based on the interests of the parties with the greatest influence or power. Meanwhile, the ethical branch is opposed to the assumptions of self-interest used in the economic perspective and views the issue normatively. However, both elements of stakeholder theory recognise the potential influence of stakeholders on a company's prospects.

Accountability Theory

Accountability theory is based on the relationship between principals and agents. In this sense, this theory is similar to agency theory, which is also part of the economic perspective of environmental disclosure. However, while the underlying principle of agency theory is the self-interest of the agents and principals, accountability theory focuses on the responsibility of the party given the account (i.e., the agent) to undertake actions to the other party giving such account (i.e., the principal). Accountability theory does not consider the self-interest of the parties involved.

Similar to the ethical branch of stakeholder theory, the framework of accountability theory indicates the use of an ethical approach. For example, the theory assumes that the agent must act in a manner which the principal approves of (or at least does not disapprove of) and they must report how such action was undertaken (O'Donovan 2002). In the environmental disclosure context, that corporations provide information to stakeholders involves some sort of obligation of the agent (i.e., the company) to the principal (i.e., society). This theory does not consider the influence of shareholders, to whom management might perceive greater accountability. This might be justified by treating management and shareholders as either a single party (which may be appropriate if there is a majority shareholder) or as two different parties with congruent objectives.

Legitimacy Theory

Stakeholder influence is also acknowledged in legitimacy theory. According to this theory, a legitimacy gap is created when there is conflict between a firm's economic pursuits and the norms, values, beliefs and definitions held by the surrounding society (Suchman 1995). When such a gap is seen or noticed by society, a firm becomes politically visible. Bowen (2000) argues that organisations are visible when they can be easily seen by relevant constituents and that they must respond to constituent demands and perceptions in order to maintain their social legitimacy (Oliver 1991; Goodstein 1994)

However, because society's perceptions are involved in assessing norms, values and beliefs, legitimacy theory also suggests that management can influence stakeholders'

perceptions by adopting different strategies. Lindblom (1994) classifies these strategies into four categories:

- a) educating stakeholders about the company's intentions
- b) .changing stakeholder perceptions of issues/events
- c) distracting or manipulating attention away from the issue/event of concern
- d) changing external expectations about the company's performance.

Lindblom (1994) also argues that communication is a key factor for a company to be able to carry out any of these strategies for the stakeholders. Environmental reporting is one means of communication that enable companies to maintain the congruence between firm intentions and societal perceptions on environmental issues and, thus, reduce their environmental visibility.

The ethical perspective of this argument is apparent, particularly at point (1), where a company is assumed to have intentions or motives. This is also consistent with the accountability framework (Gray et al. 1988) that promotes the moral responsibility of companies to make corporate social disclosures to all stakeholders beyond the minimum requirements legally mandated, such as voluntary environmental initiatives and disclosures.

However, legitimacy theory also suggests that in an attempt to reach congruence between the company's objectives and societal perceptions, a company can either substantially or symbolically comply with these societal demands (Savage et al. 2000). Substantial compliance means conducting substantive activity that involves a real, material change to organisational goals, structures and processes or socially institutionalized practices. Symbolic compliance means carrying out symbolic activity that does not involve real changes but attempts to portray corporate activities as compatible with societal norms and values. The former means that the company would improve its actual performance and communicate the results to stakeholders whereas the latter is similar to the legitimation strategies suggested by Lindblom (1994). In essence, the social perspective of environmental disclosure explains firm strategies to respond to societal demands and, hence, reduce their environmental visibility.

2. Economic Perspective of Environmental Disclosure

Most studies of environmental disclosure that adopt the economic perspective employ the theories of: (1) proprietary cost; or (2) political cost. Both theories are similar to each other and underpinned by the same self-interest assumption of positive accounting theory. However, their emphases are somewhat different. The proprietary costs of voluntary disclosure include all types of costs associated with the dissemination of proprietary information, including those imposed by the

competitors in a market entry game. Political cost theory focuses on the political components of the proprietary costs as the incentive for visible companies to disclose environmental information.

Proprietary Costs of Environmental Disclosures

Grossman (Grossman 1981) and Milgrom (Milgrom 1981) posit that firms will disclose information about their 'type' to distinguish themselves from poor performers. This view is based on the argument that information asymmetry between seller and buyers occurs in the market (Akerlof 1970). When credible signals are feasible, full disclosure is optimal (Dye 1985). However, discretionary disclosure is possible because of: (1) proprietary costs or (2) outsiders' uncertainty about whether firms have the private information. It is argued that firms will provide additional information only when the benefits exceed the costs of generating it (Verrechia 1983; Dye 1985; Watts & Zimmerman 1986). However, uninformed observers cannot tell whether information is withheld because it is: (1) bad news or (2) good news but not good enough to warrant incurring the proprietary costs (Verrechia 1983).

Dye (1985) defines proprietary information as information whose disclosure reduces the present value of cash flows of the firm endowed with the information. Verrechia (1983) refers to it as potentially damaging and asserts that firms will withhold information to avoid proprietary costs. Environmental information can be proprietary in nature if interested parties can impose costs to targeted companies based on such information. Yue et al. (1997:441) point out some possible costs imposed by stakeholders on environmental information:

Government agencies could use such information as a pretext for investigations that would increase compliance costs. Moreover, disclosure could invite costly litigation by previously uninformed victims of environmental incidents; affect the availability of debt and equity capital, benefit competitors' green marketing strategies aimed at environmentally conscious consumers; and provide ammunition for environmental protection groups, such as Greenpeace, to press for stricter legislation or boycotts of the company's products.

Uncertain financial consequences from endowing private information may prevent firms from disclosing full information regarding their environmental performance and management systems. Yue et al. (1997) suggest at least three dimensions of uncertainty involved in environmental disclosures—legal, technical and political. Legal uncertainties are driven by changes in environmental legislation. Technical uncertainties exist because clean-up technologies are changing and the costs involved are not certain. Political uncertainties are those coming from changes in society's demands, as noted by the social theories. The political component of proprietary costs becomes the focus of the political cost theory of environmental disclosure, which relates such costs to firms' environmental visibility.

Political Cost Theory of Environmental Disclosure

As indicated above, the development of disclosure theories has been influenced by the advancement of other accounting theories, such as agency theory and positive accounting theory (Jensen & Meckling 1976; Watts & Zimmerman 1978). In agency theory (Jensen & Meckling 1976), a firm is treated as a nexus of contract in which interested parties are trying to maximise their welfare. According to this assumption, it does not make sense to assume that a firm has a motive (e.g. to engage in environmental or social commitments) such as that highlighted by the social perspective discussed earlier. The personalisation of a firm contradicts the agency concept, which assumes that conflicting individual objectives (although some may be congruent) are brought into disclosure equilibrium.

Using this self-interest assumption, Watts and Zimmerman (1978) argue that certain groups in society, such as government and non-government organisations, trade unions, and consumer groups, act upon their own interests to maximize their utility. These groups of stakeholders will lobby the political sector to impose costs on corporations through wealth transfer devices, such as taxes, wage claims, product boycotts and subsidies. It seems that the notion of proprietary costs is more comprehensive than political costs because proprietary costs include political costs and other costs (e.g. competition in a market entry game). However, due to the difficulty of measuring the other types of proprietary costs, most studies of the economic motives of environmental disclosure have used the political costs notion .

Watts and Zimmerman (1978) suggest that the magnitude of political costs is highly dependent upon political visibility. Politically visible firms easily attract public attention and become the potential targets of interested parties. These firms need to address visibility issues in order to reduce public attention and its consequences. In order to do so, these firms may employ a variety of devices, such as a media campaign, government lobbying and discretionary accounting practices to reduce reported earnings (Watts & Zimmerman 1978). Several studies provide evidence that visibility triggers public scrutiny, which leads to political costs and gives incentive for corporate responses to social, environmental and political issues (Belkaoui & Karpik 1989; Friske 1994; Bowen 2000; Belen & Manuel 2005; Gill-de-Albornoz & Illueca 2005).

Firm visibility comes in different forms depending on the aspect that constitutes the visibility. For example, a firm can be visible in social and political aspects (e.g. underpaid labour, occupational health and safety, monopoly power) as well as environmentally (e.g. polluting, involved in environmental accidents, exploiting natural resources). In the environmental disclosure literature, it is argued that firms will disclose more environmental information to avoid the political costs that come from environmental issues (e.g. Yue et al. 1997; Bae 1998; Patten & Trompeter 2003). The following sections describe the concept of environmental visibility as a

subset of political visibility and the fundamental incentives for environmental disclosure.

C. ENVIRONMENTAL VISIBILITY AS AN UNDERLYING MOTIVE FOR ENVIRONMENTAL DISCLOSURE

Environmental visibility is the relative extent to which a firm's environmental characteristics and actions or events that affect it are: (1) likely to attract the attention of stakeholders and (2) are observable by the constituents. Thus, the level of environmental visibility of a firm is affected by its characteristics (e.g. whether it is large or profitable), whether it engages in activities that affect the environment (e.g. deforestation or discharging emissions) and its association with environmentally sensitive events (e.g. environmental incidents or environmental monitoring by a government agency).

The term 'environmental visibility' has not been previously used in research on environmental disclosures. This notion was used by Bowen (2000) in an environmental management study as a trigger for green organisational responses. Her matrix for environmental visibility was extracted from semi-structured interviews with 24 senior managers in the United Kingdom. She found that, at the corporate level, environmental visibility can be divided into organisational and issue visibility. The former includes company size, name recognition, national/financial media coverage, advertising expenditure, having a prominent logo and the number of customers. The latter includes environmental incidents, corporate citizenship reputation and history of environmental reporting.

Environmental visibility is not limited to the unfavourable characteristics of a firm (e.g. polluting). It may also be the result of favourable conditions. For example, firms with superior environmental performance can be as visible as those with poor environmental performance. Furthermore, firms that previously disclosed environmental information extensively can be more visible than those who did not. Such favourable characteristics still reflect firm environmental visibility and attract public attention. As such, they trigger firms to respond in an environmentally accepted behaviour.

The term 'environmental visibility' is more focused than 'political pressures', which is the term commonly used in the research to describe the incentive for environmental disclosure. Political pressure is often identified as a result of environmentally unfavourable circumstances only (e.g. membership of a polluting industry, having poor environmental performance or involvement in environmental accidents) (Patten 1991; Walden 1997; Neu et al. 1998; Halkos & Evangelinos 2002; Patten 2002a; Patten & Trompeter 2003; Cormier et al. 2005). In this study, the potential political pressures (and their associated costs) are considered as the consequences of firm environmental visibility in positive and negative ways. It is the

firm's visibility, not the political pressure itself, that triggers a firm to respond to the potential pressures by disclosing environmental information.

Different concepts have been used in other studies. Some of the most common are political pressures (Patten & Trompeter 2003), future regulatory costs (Blacconiere & Patten 1994; Patten & Trompeter 2003), public policy pressures (Walden 1997), prosecution by an environmental authority (Deegan & Rankin 1996) and exposure to public pressure (Cormier & Irene 2001; Patten 2002b; Patten 2002a; Patten & Trompeter 2003). While these terms express circumstances (i.e. pressures) from external parties imposed against the firm, environmental visibility describes the internal attributes of firms that create or invite such external pressures. These attributes of environmental visibility are discussed in Bowen's (2000) matrix, which was mentioned above, and in other environmental disclosure studies. Some of them are consistent with the size hypotheses in political costs theory (Watts & Zimmerman 1978).

As noted earlier, environmental visibility can be measured by a firm's actions, events and characteristics that are associated with environmental issues. Thus, environmental visibility may have different meanings and interpretations depending on how it is measured. Based on its source, indicators of environmental visibility can be broken down into two categories—internal and external. Internal sources of environmental visibility include firm size, industry type, firm reputation and performance (financial and market measures). External determinants of environmental visibility include environmental performance ratings, environmental incidents in the industry and media coverage regarding a firm's environmental performance.

REFERENCES

- Ahmad, Z., Hassan, S., Mohammad, J., 2003. Determinants of Environmental Reporting in Malaysia. *International Journal of Business Studies* 11, 69.
- Akerlof, G.A., 1970. The Market for "Lemons": Quality Uncertainty and the Market Mechanism. *The Quarterly Journal of Economics* 84, 488-500.
- Bae, B.-R., 1998. *Accounting Choices for Reporting Environmental Liabilities: Their Relation with Firm Characteristics and Earnings Response Coefficients*. 9910984. Temple University.
- Barth, M.E., McNichols, M.F., Wilson, G.P., 1997. Factors Influencing Firms' Disclosures about Environmental Liabilities. *Review of Accounting Studies* 2, 35-64.

- Belen, G.-d.-A., Manuel, I., 2005. Earnings management under price regulation: Empirical evidence from the Spanish electricity industry. *Energy Economics* 27, 279.
- Belkaoui, A., Karpik, P.G., 1989. Determinants of the Corporate Decision to Disclose Social Information. *Accounting, Auditing & Accountability Journal* 2.
- Blaconiere, W.G., Patten, D.M., 1994. Environmental Disclosures, Regulatory Costs, and Changes in Firm Value. *Journal of Accounting and Economics* 18.
- Bowen, F.E., 2000. Environmental Visibility: A Trigger of Green Organizational Response? *Business Strategy and the Environment* 9, 92.
- Cahan, S., Chavis, B., Elmendorf, R., 1997. Earnings Management of Chemical Firms in Response to Political Costs From Environmental Legislation. *Journal of Accounting, Auditing, and Finance* 12, 37-66.
- Clarkson, M.B.E., 1995. A Stakeholder Framework for Analyzing and Evaluating Corporate Social Performance. *The Academy of Management Review* 20, 92-117.
- Clarkson, P., Li, Y., Richardson, G., Vasvari, F., 2006. Revisiting the Relation Between Environmental Performance and Environmental Disclosure: An Empirical Analysis In: CAAA 2006 Annual Conference.
- Cormier, D., Irene, M.G., 2001. An examination of social and environmental reporting strategies. *Accounting, Auditing & Accountability Journal* 14, 587
- Cormier, D., Magnan, M., Velthoven, B.V., 2005. Environmental Disclosure Quality in Large German Companies: Economic Incentives, Public Pressures or Institutional Conditions? *European Accounting Review* 14, 3-39
- Deegan, C., 2000. *Financial accounting theory*. McGraw Hill, Sydney.
- Deegan, C., 2002. The Legitimising Effect of Social and Environmental Disclosures - A Theoretical Foundation. *Accounting, Auditing & Accountability Journal* 15, 282-311.
- Deegan, C., Rankin, M., 1996. Do Australian Companies Report Environmental News Objectively? An Analysis of Environmental Disclosures by Firms Prosecuted Successfully by the Environmental Protection Authority. *Accounting, Auditing & Accountability Journal* 9, 50.
- Donaldson, T., Preston, L.E., 1995. The Stakeholder Theory of the Corporation: Concepts, Evidence, and Implications. *The Academy of Management Review* 20, 65-91.

- Dye, R.A., 1985. Disclosure of Nonproprietary Information. *Journal of Accounting Research*, 23, 123-145.
- Elsbach, K., Sutton, R., 1992. Acquiring organizational legitimacy through illegitimate actions: a marriage of institutional and impression management theories *Academy of Management Journal* (pre-1986) 35, 699-738.
- Filbeck, G., Gorman, R.F., 2004. The Relationship between the Environmental and Financial Performance of Public Utilities. *Environmental and Resource Economics* 29, 137.
- Freedman, M., 1990. The association between environmental performance and environmental disclosure in annual reports and 10-Ks. *Advances in Public Interest Accounting* 3, 183-193.
- Friske, K.A.B., 1994. *An examination of the effects of standard setting and earnings management in the oil and gas industry: The lesson of SFAS No. 96*. Ph.D. Texas A&M University.
- Gill-de-Albornoz, B., Illueca, M., 2005. Earnings management under price regulation: Empirical evidence from the Spanish electricity industry. *Energy Economics* 27, 279-304.
- Goodstein, J.D., 1994. Institutional Pressures and Strategic Responsiveness: Employer Involvement in Work-Family Issues. *The Academy of Management Journal* 37, 350-382.
- Gray, R., 1992. Accounting and environmentalism: an exploration of the challenge of gently accounting for accountability, transparency and sustainability. *Accounting, Organizations and Society* 17, 399-425.
- Gray, R., Owen, D., Maunders, K., 1988. Corporate Social Reporting: Emerging Trends in Accountability and the Social Contract. *Accounting, Auditing & Accountability Journal* 1.
- Grossman, S., 1981. The informational role of warranties and private disclosure about product quality. *Journal of Law and Economics* 24, 461-483.
- Guthrie, J.E., Parker, L.D., 1989. Corporate social reporting: a rebuttal of legitimacy theory. *Accounting and Business Research*. 9, 343-52.
- Halkos, G.E., Evangelinos, K.I., 2002. Determinants of environmental management systems standards implementation: evidence from Greek industry. *Business Strategy and the Environment* 11, 360.

- Ingram, R.W., Frazier, K.B., 1980. Environmental Performance and Corporate Disclosure. *Journal of Accounting Research* 18, 614-662.
- Jensen, M., Meckling, W., 1976. Theory of the firm: Managerial Behaviour, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics* 3.
- Lindblom, C.K., 1994. The implications of organizational legitimacy for corporate social performance and disclosure. In: *Critical Perspectives on Accounting Conference*, New York.
- Mathews, M.R., 1993. *Socially Responsible Accounting*. Chapman & Hall, London.
- Milgrom, P.R., 1981. Good News and Bad News: Representation Theorems and Applications. *The Bell Journal of Economics* 12, 380-391.
- Mitchell, N.C., 1994. *The relationship of certain environmental performance indicators and financial statements*. 9503027. Cleveland State University.
- Mitchell, R.K., Agle, B.R., Wood, D.J., 1997. Toward a theory of stakeholder identification and salience: Defining the principle of who and what really counts. *Academy of Management Review* 22, 853-86.
- Mitra, S., Crumbley, D.L., 2003. Earnings Management and Political Sensitivity Environments: Another Test. *Petroleum Accounting and Financial Management Journal* 22, 1.
- Neu, D., Warsame, H., Pedwell, K., 1998. Managing public impressions: environmental disclosures in annual reports. *Accounting, Organizations and Society* 23, 265-282.
- Nurhayati, R., Brown, A., Tower, G., 2006. A Developing Country's Natural Environment Disclosure Index. In: *Accounting and Finance Association of Australia and New Zealand*, Wellington, New Zealand.
- O'Donovan, G., 2002. Environmental disclosures in the annual report: Extending the applicability and predictive power of legitimacy theory. *Accounting, Auditing & Accountability Journal* 15, 344-371.
- O'Dwyer, B., 2002. Managerial perceptions of corporate social disclosure: An Irish story. *Accounting, Auditing & Accountability Journal* 15, 406-436.
- Oliver, C., 1991. Strategic Responses to Institutional Processes. *The Academy of Management Review* 16, 145-179.
- Patten, D.M., 1991. Exposure, legitimacy, and social disclosure. *Journal of Accounting and Public Policy* 10, 297-308.

- Patten, D.M., 1992. Intra-industry environmental disclosures in response to the Alaskan oil spill: a note on legitimacy theory. *Accounting, Organizations and Society* 17, 471-5.
- Patten, D.M., 2002a. Media exposure, Public Policy Pressure, and Environmental Disclosure: An Examination of the Impact of TRI Data Availability. *Accounting Forum* 26, 153-171.
- Patten, D.M., 2002b. The Relation between Environmental Performance and Environmental Disclosure: A Research Note. *Accounting, Organizations and Society* 27, 763-773.
- Patten, D.M., Trompeter, G., 2003. Corporate responses to political costs: an examination of the relation between environmental disclosure and earnings management. *Journal of Accounting and Public Policy* 22, 83-94.
- Roberts, C.B., 1991. Environmental Disclosures: A Note on Reporting Practices in Mainland Europe. *Accounting, Auditing and Accountability Journal* 4.
- Roberts, R.W., 1992. Determinants of Corporate Social Responsibility Disclosure: an Application of Stakeholder Theory. *Accounting, Organization and Society* 17, 595-612.
- Rockness, J.W., 1985. An assessment of the relationship between US corporate environmental performance and disclosure. *Journal of Business Finance and Accounting* 12, 339-54.
- Savage, A., Cataldo, A.J., Rowlands, J., 2000. A multi-case investigation of environmental legitimization in annual reports. *Advance in Environmental Accounting and Management* 1.
- Shocker, A.D., 1973. An Approach to Incorporating Societal Preferences in Developing Corporate Action Strategies. *California Management Review* (pre-1986) 15, 97.
- Suchman, M.C., 1995. Managing Legitimacy: Strategic and Institutional Approaches. *The Academy of Management Review* 20, 571-610.
- Tricker, R.I., 1983. *Corporate Responsibility, Institutional Governance and the Roles of Accounting Standards*. Accounting Standards Setting An International Perspective, 27-41.
- Ullmann, A.A., 1985. Data in Search of a Theory: A Critical Examination of the Relationships among Social Performance, Social Disclosure, and Economic Performance of U. S. Firms. *The Academy of Management Review* 10, 540-557.

- Verrechia, R.E., 1983. Discretionary Disclosure. *Journal of Accounting and Economics* 5, 179-194.
- Walden, W.D., 1993. *An empirical investigation of environmental disclosures analyzing reactions to public policy and regulatory effects*. 9426356. Virginia Commonwealth University.
- Walden, W.D., 1997. Environmental Disclosure and Public Policy Pressure. *Accounting and Public Policy* 16, 125-154.
- Watts, R.L., Zimmerman, J.L., 1978. Towards Positive Theory of the Determination of accounting Standards. *The Accounting Review* 53, 112-134.
- Watts, R.L., Zimmerman, J.L., 1986. *Positive Accounting Theory*. Prentice-Hall, New Jersey.
- Wilmshurst, T.D., Frost, G.R., 2000. Corporate environmental reporting A test of legitimacy theory. *Accounting Auditing & Accountability Journal* 13, 10.
- Wiseman, J., 1982. An evaluation of environmental disclosures made in corporate annual reports. *Accounting Organizations and Society* 7, 53-63.
- Wiseman, J.W., 1980. *An Empirical Examination of the Contents and Accuracy of Voluntary Corporate Pollution Control Disclosures*. 8104437. The University of North Carolina at Chapel Hill.
- Yue, L., Gordon, D.R., Daniel, B.T., 1997. Corporate disclosure of environmental liability information: Theory and evidence. *Contemporary Accounting Research* 14, 435.

Pedoman Penulisan

1. Naskah berupa ringkasan hasil penelitian lapangan (empiris), penelitian kepustakaan dan karya ilmiah populer dalam Bahasa Indonesia yang belum pernah dipublikasikan dalam media cetak lain.
2. Penulis artikel harus menyerahkan dua copy artikel yang ditulis dengan spasi double dan dicetak satu sisi pada kertas kuarto, serta dalam disket 3,5". *Fonts* yang dipergunakan adalah *Times New Roman* dengan ukuran 12 dan *compatible* dengan MS-Word. Halaman depan atau halaman judul menunjukkan judul tulisan serta identitas penulis, nama, alamat, telepon, serta *email* untuk korespondensi. Halaman kedua judul dan abstrak, selanjutnya adalah isi artikel. Lampiran riset seperti daftar pertanyaan dan instrumen lainnya harus dikirim bersama naskah. Pemuatan lampiran pada jurnal tergantung tersedianya ruang (halaman).
3. **Keaslian tulisan.** Penulis harus dapat menjamin keaslian artikel yang dikirim. Pelanggaran hak cipta dan etika akademis menjadi tanggung jawab penulis.
4. **Panjang artikel** yang diserahkan antara 15-20 halaman, serta dilengkapi dengan abstrak sebanyak 100-250 kata. Penulisan abstrak menggunakan Bahasa Inggris dan disertai dengan *keywords*.
5. Sistematika penulisan disusun dengan urutan sebagai berikut:
 - a) Judul, nama penulis, lembaga dan biodata.
 - b) Abstrak.
 - c) Batang tubuh:
 - Untuk penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan:
 1. Pengantar berupa latar belakang dan masalah.
 2. Metode penelitian.
 3. Hasil dan pembahasan.
 4. Simpulan dan saran.
 - Untuk karya ilmiah populer:
 1. Pengantar berupa latar belakang dan masalah.
 2. Landasan teori (jika ada).
 3. Pembahasan.
 4. Simpulan.
 - d) Referensi
6. **Penomoran** sub judul mempergunakan huruf A, B, C, D, sedang sub judul dengan angka Arab dan seterusnya.
7. **Persamaan.** Semua persamaan matematika atau rumus dituliskan pada garis terpisah di tengah halaman (*centered*). Persamaan atau rumus diberi nomor berurutan dengan angka Arab di dalam kurung pada *margin* kanan.
8. **Catatan kaki.** Catatan kaki pada halaman depan mempergunakan tanda *asteriks* (*), sedang pada teks mempergunakan angka Arab secara urut. Catatan kaki hanya untuk penjelasan tulisan.
9. **Tabel.** Penomoran tabel mempergunakan angka Arab. Setiap tabel diberikan judul yang diikuti dengan penjelasan *legend* yang sesuai dengan isi tabel. Tabel yang dicetak pada kertas berukuran lebih besar, diserahkan apa adanya, tanpa perlu diperkecil dengan fotocopy. Tabel dicetak pada halaman terpisah di akhir tulisan. Letak tabel di dalam teks harus ditunjukkan secara tepat dan jelas, sehingga pembaca dapat memahaminya tanpa harus membaca isi teks.
10. **Gambar, diagram, grafik.** Penomorannya mempergunakan angka Romawi, dicetak di tengah halaman (*centered*) terpisah dari teks, dan diletakkan pada akhir tulisan. Letak gambar, tabel, grafik di dalam teks harus ditunjukkan secara tepat dan harus jelas, sehingga pembaca dapat memahaminya tanpa harus membaca isi teks.
11. **Referensi.** Refensi dicetak di halaman akhir sebelum tabel dan gambar, spasi double, terpisah dari teks, urut abjad, dan dengan judul REFERENSI.
 - a) Refensi yang dikutip pada teks dapat dituliskan sebagai berikut:
 - o Pinches dan Taingo (1973) melaporkan bahwa.....
 - o Nilai-nilai sosial ditunjukkan..... (Stolle, 1976).
 - o Penyebutan halaman referensi yang diutip, hanya untuk kutipan langsung. Nomor halaman dituliskan setelah tahun dan tanda titik dua. Contoh:
§ (Pinches dan Taingo, 1973:17)
§ Pinches dan Taingo (1973: 17)
 - o Penulisan sumber referensi di dalam teks dengan penulis lebih dari dua, dapat dituliskan satu nama dengan menambahkan dkk. Contoh:
§ (Zikmund dkk., 1977)
§ Zikmund dkk. (1977)
 - b) Penulisan referensi dalam daftar referensi.
 - o Buku teks (*monograph*).
Sekaran, Uma. 1992. *Research Methods for Business*. Edisi 2. New York. John Willey.
 - o Artikel (*Periodicals*).
Fiscfer, Paul E., dan Robert E. Verrecchia. 1998. Correlated Forecast Errors. *Journal of Accounting Research*. Vol. 3. No. 2. April. 91-110.
 - o Artikel pada penerbitan kolektif.
Brennan, Michael J. dan Eduardo S. Schwartz. 1994. A New Approach to Evaluating Natural Resource Investments, dalam edisi Stern, Joel M. Dan Donald H. Chew Jr. *The Revolution in Corporate Finance*. Edisi 2. Massachusetts. Blackwell Publisher. 107-117.